



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2022**



BUPATI GOWA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan taufiq-Nya semua aktivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa, termasuk dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2021 dapat terselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Gowa ini sebagai laporan atas pelaksanaan program kerja pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan, tugas umum pemerintahan maupun tugas pembantuan, serta laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban konstitusional Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat, maka penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini merupakan suatu kewajiban konstitusi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69, sedangkan sistematika pelaporan dan waktu penyampaiannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana substansi dari laporan ini merupakan progres report atas pelaksanaan tugas-tugas pokok pemerintahan yang dilaksanakan, dengan beberapa permasalahan yang dihadapi disertai solusi yang dilakukan, maupun tingkat kemajuan serta prestasi yang telah diraih.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Gowa Tahun 2021 ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan karena telah melalui tahapan revidi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa.

Pemerintah Kabupaten Gowa memiliki komitmen yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah, hal ini dapat kita rasakan dari banyaknya program yang menyentuh langsung kepada masyarakat seperti program pendidikan gratis, program kesehatan gratis, program pencerahan qolbu jum'at ibadah, program kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mengirim putra putri terbaik kita untuk disekolahkan dengan dibiayai oleh pemerintah.



Akhirnya kami menyadari sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kekurangan dalam penyusunannya, oleh karena itu kami sangat berharap adanya masukan, kritik dan saran konstruktif agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan di Kabupaten Gowa dapat lebih maju dan lebih berhasil.

Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian. Amin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sungguminasa, Maret 2022



BUPATI GOWA,

PURICHTA ICHSAN YL, SH, MH



BAB I P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya undang - undang tersebut juga mendefinisikan daerah otonomi sebagai Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, dengan definisi kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Daerah diselenggarakan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, yang menggunakan konsep otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab, yang sesuai dengan tuntutan zaman yang tidak terhindarkan. Selain karena landasan filosofinya mengarah pada peningkatan demokrasi dan kinerja daerah, otonomi daerah juga dipandang akan mengurangi beban pemerintah pusat.

Secara umum Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat serta Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat, merupakan salah satu sarana yang sangat penting untuk mengevaluasi proses serta perkembangan penyelenggaraan kewenangan daerah dan juga sebagai perekat hubungan hirarkis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan di daerah dan antara Pemerintah Daerah sebagai lembaga eksekutif di daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif di daerah.

Dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah disebutkan adanya kesetaraan dan kemitraan hubungan antara Kepala Daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dengan DPRD yang menjalankan fungsi legislatif dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya hubungan *checks and balances* yang lebih seimbang antara Kepala Daerah dengan DPRD.



Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa “*Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*”.

Atas dasar tersebut, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 disusun untuk menjelaskan arah prioritas pembangunan daerah yang meliputi visi, misi, arah kebijakan, strategi dan prioritas serta program kerja dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan, sehingga secara terperinci nampak hasil - hasil yang dicapai, permasalahan yang dihadapi, serta upaya pemecahan masalah dan berbagai hal yang dianggap penting selama tahun 2021.

1.1.1 PENJELASAN UMUM

A. UNDANG - UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH

Wilayah Kabupaten Gowa terbentuk berdasarkan Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi.

B. DATA GEOGRAFIS WILAYAH

Kabupaten Gowa berada pada 119,3773° Bujur Barat dan 120,0317° Bujur Timur serta 5,0829342862° Lintang Utara dan 5,577305437° Lintang Selatan; di mana wilayahnya terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 1.883,33 km², atau setara dengan 4,02% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan.

Keadaan geografis wilayah Kabupaten Gowa terdiri atas dataran tinggi seluas 1.509,87 km² atau setara dengan 80,17% yang meliputi sembilan kecamatan yakni Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Sedangkan dataran rendah seluas 373,46 km² atau setara dengan 19,83% yang juga terdiri dari sembilan kecamatan yaitu Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bajeng, Bajeng Barat, Pallangga, Barombong, Somba Opu, Bontomarannu dan Pattallassang. Kabupaten Gowa berbatasan dengan 8 (delapan) kabupaten/kota, yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone;
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng;
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kota Makassar.

Letak wilayah administrasi menempatkan Kabupaten Gowa pada posisi yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan (Kota Makassar) yang merupakan pusat pelayanan jasa dan perdagangan di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Posisi strategis ini menjadikan Kabupaten Gowa memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif yang berdampak signifikan terhadap



percepatan peningkatan aktivitas sosial kemasyarakatan dan perekonomian masyarakat Kabupaten Gowa.

C. JUMLAH PENDUDUK

Penduduk Kabupaten Gowa pada tahun 2021 tercatat sebanyak 768.868 jiwa yang terdiri dari 380.564 jiwa penduduk laki-laki, dan 388.304 jiwa penduduk perempuan. Dengan demikian jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk laki-laki. Angka perbandingan penduduk laki - laki dengan penduduk perempuan (*sex ratio*) sebesar 96,96 ini berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 97 jiwa penduduk laki-laki.

Kepadatan penduduk yang merupakan angka perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah dan dinyatakan dalam satuan jiwa per kilometer. Kepadatan penduduk dapat dijadikan parameter tingkat kepadatan penduduk suatu wilayah. Pada tahun 2021 kepadatan penduduk Kabupaten Gowa adalah 397 jiwa/km². Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kepadatan penduduk adalah faktor lingkungan, historis dan sosio kultural.

Penduduk Kabupaten Gowa mayoritas beragama Islam memiliki jiwa dan semangat pengabdian kepada masyarakat yang dilandasi dengan ketaatan dalam melaksanakan ajaran dan nilai-nilai agama. Kondisi ini telah terbentuk sejak lama dan telah melahirkan seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepahlawanan dalam pengabdian kepada masyarakat, yaitu Sultan Hasanuddin Raja Gowa XIV dengan gelar Ayam Jantan dari Timur bernama asli I Mallombassi Daeng Mattawang, seorang sufi penyebar Agama Islam ternama Syekh Yusuf Tuanta Salamaka Al Makassar serta yang terbaru Karaeng Pattingalloang.

Jiwa kepahlawanan yang dimiliki oleh **Sultan Hasanuddin** dan **Karaeng Pattingalloang** serta ajaran nilai-nilai agama yang ditanamkan oleh **Syekh Yusuf Tuanta Salamaka Al Makassar** membuat keduanya diangkat oleh Negara sebagai Pahlawan Nasional. Kedua tokoh tersebut telah melahirkan jiwa kepahlawanan yang menjiwai nurani masyarakat Gowa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

D. JUMLAH KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN

Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan, 121 desa, 46 kelurahan, dan 675 dusun/lingkungan.

E. JUMLAH PERANGKAT DAERAH, UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI PEMERINTAH

Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah didukung oleh 3 (tiga) Staf Ahli; Sekretariat Daerah yang membawahi 3 (tiga) Asisten dan 10 (sepuluh) Bagian; Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); Inspektorat Daerah; 24 (dua puluh empat) Dinas dan 6 (enam) Badan serta ditambah dengan 18 (delapan belas) Pemerintahan Kecamatan. Jumlah pegawai yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebanyak 6.925 Orang.



F. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Kebijakan Umum Keuangan Daerah Kabupaten Gowa ditempuh dengan tujuan utama meningkatkan kapasitas keuangan daerah. Oleh karena itu, kebijakan optimalisasi pendapatan daerah diarahkan untuk melaksanakan dan mengamankan kebijakan pemerintah daerah pada umumnya dan anggaran pendapatan daerah pada khususnya, sehingga substansi dari aturan tersebut adalah mempertegas dan memperjelas ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah dengan desentralisasi pengelolaan keuangan sampai dengan tingkat manajemen terendah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Dinas/Badan/Sekretariat serta Kecamatan dan menuntun kita dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik. Dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, sedangkan wewenang sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dilimpahkan dan dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengguna anggaran dan barang di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

Kemudian dalam penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dilakukan secara realistis sesuai potensi riil sumber-sumber pendapatan yang ada pada masing-masing unit kerja/pengelola pendapatan. Di samping itu, dilakukan pula pengembangan potensi sumber-sumber pendapatan yang sudah ada dan mengupayakan ekstensifikasi sumber PAD baru yang tidak memberatkan masyarakat serta memperhitungkan kebijakan ekonomi biaya tinggi; meningkatkan pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sarana, prasarana dan sistem serta prosedur/mechanisme administrasi pelayanan; pendayagunaan asset-asset daerah yang dapat menghasilkan PAD; mempertahankan keseimbangan antara anggaran belanja dengan anggaran pendapatan, memobilisir potensi sumber daya dan dana masyarakat secara berkelanjutan, adil dan merata. Prinsip prudential atau kehati-hatian dalam menggunakan sumber dana menjadi komitmen bersama. sehingga dalam merencanakan anggaran belanja benar-benar diupayakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.



Selanjutnya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai potensi dan kewenangan yang didukung sumber daya aparatur pengelola pendapatan daerah serta kemampuan masyarakat dengan pendekatan kemitraan, koordinasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Dengan demikian, dalam melaksanakan pembiayaan, strategi yang ditempuh dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk Tahun Anggaran 2021 jumlah Pendapatan direncanakan sebesar Rp.1.854.081.087.633,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.1.872.136.404.847,22 atau sebesar 100,97 persen yang terdiri dari :

- a. **Pendapatan Asli Daerah** yang ditargetkan Rp.232.504.180.420,00 telah terealisasi sebesar Rp.256.759.755.064,22 atau 110,43 persen, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pajak Daerah yang ditargetkan sebesar Rp.117.579.635.430,00 dengan realisasi sebesar Rp.133.918.488.887,50 atau 113,90 persen.
 - Retribusi Daerah dengan target sebesar Rp.51.131.043.203,00 dengan realisasi sebesar Rp.49.614.791.303,25 atau 97,03 persen.
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp.5.020.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.4.069.728.564,00 atau 81,07 persen.
 - Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp.58.773.501.787,00 dengan realisasi sebesar Rp.69.156.746.309,47 atau 117,67 persen.
- b. **Pendapatan Transfer** dari target sebesar Rp.1.506.990.886.470,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.504.212.221.783,00 atau 99,82 persen, dengan perincian sebagai berikut :
 - Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dari target Rp.1.415.008.115.014,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.411.479.987.069,00 atau 99,75 persen.
 - Pendapatan Transfer Antar Daerah, dari target Rp.91.982.771.456,00 dengan realisasi sebesar Rp.92.732.234.714,00 atau 100,81 persen.
- c. **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**, dengan target sebesar Rp.114.586.020.743,00 dengan realisasi sebesar Rp.111.164.428.000,00 atau 97,01 persen, dengan perincian sebagai berikut :
 - Pendapatan Hibah, dari target Rp.24.057.068.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.24.057.068.000,00 atau 100 persen.
 - Lain - lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dari target Rp.90.528.952.743,00 dengan realisasi sebesar Rp.87.107.360.000,00 atau 96,22 persen.



2. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Pengelolaan Belanja Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Fokus kebijakan umum keuangan daerah pada tahun anggaran 2020 adalah peningkatan profesionalisme dan kinerja pengelolaan belanja daerah yang tetap mengacu pada otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Jumlah kebutuhan Belanja untuk Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp.2.223.019.356.393,95 dan terealisasi sebesar Rp.1.799.858.544.933,58 atau 80,96 persen dari yang dianggarkan yang terdiri dari :

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp. 1.341.163.957.966,87 yang terealisasi sebesar Rp. 1.227.599.778.183,08 atau 91,53 persen dari yang dianggarkan.

b. Belanja Modal

Untuk tahun anggaran 2021 Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 648.468.552.981,08 dengan realisasi sebesar Rp. 340.906.332.049,501 atau 52,57 persen dari yang dianggarkan.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.421.422.832 atau 56,86 persen dari yang dianggarkan.

d. Transfer

Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp. 230.886.845.446,00 dengan realisasi sebesar Rp. 229.931.011.869,00 atau 99,59 persen dari yang dianggarkan.

1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. PERMASALAHAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan suatu aturan - aturan yang dibuat oleh Pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintahan untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu. Adapun strategi dan arah kebijakan dalam pembangunan Kabupaten Gowa tahun 2021 - 2026 yang tertuang dari beberapa misi sebagai berikut:

MISI 1: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat yang Unggul dan Inklusif

- 1) Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan dasar pendidikan", diterapkan:

Strategi 1 : Meningkatkan akses, kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana pendidikan yang merata, terjangkau dan berkarakter, meningkatkan kualitas guru, meningkatkan peran pemuda dalam



pembangunan serta meningkatkan mutu proses pembelajaran dan penumbuhan budaya literasi pada satuan pendidikan.

- 2) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat“, diterapkan:
Strategi 2 : Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan kualitas layanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat baik bersifat kuratif, promotif maupun preventif, meningkatkan kuantitas dan kapasitas tenaga medis dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesehatan.
- 3) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Daerah “, diterapkan:
Strategi 3 : Meningkatkan akselerasi pembangunan pemuda, pengarusutamaan hak-hak anak baik akses, partisipasi, manfaat maupun control dalam proses pembangunan termasuk bagi kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

MISI 2: Memperkokoh Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi

- 4) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya inovasi, produktivitas dan nilai tambah sektor komoditas unggulan daerah“, diterapkan:
Strategi 4 : Meningkatkan perekonomian daerah melalui peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah yaitu sektor pertanian, pariwisata dan UMKM, pengmebnagan inovasi daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).
- 5) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah“, diterapkan:
Strategi 5 : Meningkatkan kesempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat termasuk penyediaan informasi bursa kerja dan pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan.
- 6) Untuk mencapai sasaran “Berkembangnya kegiatan ekonomi golongan masyarakat kurang mampu serta usaha mikro dan kecil, diterapkan:
Strategi 6 : Mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat marginal dan meningkatkan program atau kegiatan perlindungan sosial terhadap pemenuhan kebutuhan dasar.
- 7) Untuk mencapai sasaran “Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat“, diterapkan:
Strategi 7 : Mendorong lebih banyak dan lebih baik kualitas pekerjaan, pendapatan yang lebih tinggi dan kesempatan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat dengan menjalin kemitraan antara pihak pengusaha dengan UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah.

**MISI 3: Meningkatkan Infrastruktur Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan**

- 8) Untuk mencapai sasaran “Terpenuhinya infrastruktur layanan publik yang terpadu dan terintegrasi“, diterapkan:

Strategi 8 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur melalui pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas infrastruktur transportasi, jalan, sumber daya air, air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, telekomunikasi dan informatika, ketenagalistrikan, fasilitas perkotaan, fasilitas pendidikan, fasilitas olahraga dan kesenian, pariwisata, kesehatan, perumahan rakyat serta pelibatan masyarakat dalam pemeliharannya.

- 9) Untuk mencapai sasaran “Berkembangnya infrastruktur sosial ekonomi masyarakat perdesaan“, diterapkan:

Strategi 9 : Meningkatkan aktivitas pembangunan dan pembinaan masyarakat desa dan pengembangan ketersediaan akses layanan publik dan akses kegiatan ekonomi yang berwawasan lingkungan menuju terciptanya desa maju dan mandiri.

- 10) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup“, diterapkan:

Strategi 10 : Meningkatkan perlindungan lingkungan hidup melalui tindakan preventif, penanggulangan dan penanganan bencana terutama banjir dan longsor dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup serta pemenuhan penyelesaian kasus lingkungan.

MISI 4: Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas

- 11) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik“, diterapkan:

Strategi 11 : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan dan kualitas layanan publik melalui pengembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

- 12) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah“, diterapkan:

Strategi 12 : Meningkatkan kualitas layanan publik dan penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui penyederhanaan birokrasi, penerapan manajemen kinerja, pengelolaan keuangan dan aset, meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur serta penerapan teknologi dan komunikasi.

B. VISI DAN MISI KABUPATEN GOWA

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan terwujud pada akhir periode perencanaan. Visi sangat terkait dengan cita-cita atau keinginan suatu daerah untuk menggunakan seluruh potensinya yang dideskripsikan secara ringkas dan jelas yang dapat



dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui implementasi rencana strategis yang telah ditetapkan. Penjabaran mengenai visi yang menjadi tujuan dalam konteks perencanaan strategis senantiasa mempertimbangkan nilai-nilai luhur yang dianut organisasi. Kabupaten Gowa sebagai perwujudan organisasi pemerintah daerah, telah mengejawantahkan nilai-nilai kultural dan historis yang dimiliki menjadi sumber inspirasi dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Bertitik tolak dari filosofi itu pula yang mendasari pembangunan Kabupaten Gowa untuk mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai dalam perspektif jangka panjang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025, yakni mencapai visi mewujudkan ***“Gowa Menjadi Andalan Sulawesi Selatan dan Seajar Daerah Termaju di Indonesia dalam Mensejahterakan Masyarakat”***.

Untuk mewujudkan visi di atas, telah ditetapkan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Gowa, yaitu:

1. Meningkatkan daya saing daerah
2. Mendorong kemandirian pembangunan yang berkelanjutan.
3. Mengembangkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Strategi untuk pelaksanaan visi daerah tersebut telah memasuki tahapan terakhir periode lima tahunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan dua tahapan periode lima tahunan sebelumnya (2005-2010 dan 2010-2015). Untuk mencapai visi jangka panjang daerah tersebut, maka dalam perumusan Visi RPJMD periode pertama ini didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan dan pencapaian RPJMD 2 (dua) periode sebelumnya serta isu dan permasalahan strategis yang dihadapi pada tahun 2021-2026.

Selanjutnya bertolak dari kondisi aktual dewasa ini dan merujuk pada Visi Bupati/Wakil Bupati Gowa terpilih serta dengan memperhatikan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 yaitu ***“Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur”*** dan Visi Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yaitu ***“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”***, maka dirumuskan visi lima tahunan Kabupaten Gowa yang merupakan penuntun dalam pelaksanaan pembangunan, juga sebagai pengejawantahan dari cita-cita dan aspirasi masyarakat di daerah ini yang telah dikrisralisasikan dan diformulasikan dalam perspektif 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Visi Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik”***.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dapat dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, sehingga seluruh masyarakat dan pihak yang berkepentingan (stakeholder) mengetahui program-program dan hasil yang dapat diperoleh di masa yang depan. Sejalan dengan visi yang telah



ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi obyektif yang dimiliki Kabupaten Gowa, dirumuskan Misi Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif.
2. Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi.
3. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan.
4. Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas

Misi “Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif” merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang inklusif, kesetaraan gender, perlindungan dan pemenuhan hak anak serta kualitas sumber daya manusia yang religius dan berbudaya.

Misi “Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan dan ekonomi kerakyatan” merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengembangkan potensi unggulan daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Misi “Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi” merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengembangkan potensi unggulan daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Misi “Meningkatkan pembangunan infrastruktur berorientasi pada interkoneksi antar wilayah dan sektor” merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang serta kualitas perumahan dan kawasan permukiman.

Misi “Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan” merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang serta kualitas perumahan dan kawasan permukiman.

Misi “Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas” yang diwujudkan melalui upaya perbaikan layanan publik secara terpadu dan terintegrasi dan peningkatan kualitas birokrasi.

C. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengacu pada prioritas pembangunan provinsi dan nasional sebagaimana tertuang dalam rencana kerja pemerintah dan rencana pembangunan daerah provinsi Sulawesi Selatan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Gowa di dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 menetapkan tema pembangunan yaitu **“Memperkokoh ketangguhan Pembangunan Infrastruktur, SDM dan Daya**



Saing Daerah serta Pelayanan Dasar Berkualitas”. Selanjutnya mengacu pada visi dan misi serta tema pembangunan tersebut ditetapkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gowa Tahun 2021 yaitu:

1. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas aksesibilitas pendidikan dan kesehatan;
2. Optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah yang terpadu dan berkelanjutan;
3. Penguatan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui pengembangan sektor potensial daerah;
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Program prioritas pembangunan daerah tersebut diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis tahun 2021, antara lain:

- 1). Belum optimalnya kualitas hidup masyarakat;
- 2). Belum optimalnya perekonomian daerah dan masyarakat;
- 3). Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik;

Tabel 1.1
Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	KINERJA		SKPD	KET		
				INDIKATOR	TARGET				
1.	Peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas aksesibilitas pendidikan dan kesehatan	Peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan	1.	Pendidikan Gratis	Angka Partisipasi Kasar (APK)	SD : 100% SMP : 96,85%	Dinas Pendidikan		
			2.	Investasi SDM Seperempat Abad	Jumlah siswa yang mengikuti program Investasi SDM Seperempat Abad	1483 Orang			
			1.	Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan	Angka Kelulusan	SD : 100% SMP : 100%			
			2.	Imtaq Indonesia (Pengganti Calistung Kelas 1 dan 2)	Persentase sekolah yang menerapkan Imtaq Indonesia	100% (412 SD)			
				3.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya		100%	
		Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan melalui penambahan jumlah tenaga, peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	1.	Kesehatan Gratis	Cakupan pelayanan	100 %		Dinas Kesehatan	
			2.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%		SKPD Penanggung Jawab	
			3.	Peningkatan Puskesmas Non Perawatan menjadi Puskesmas Perawatan	Persentase puskesmas perawatan	17%		Dinas Kesehatan	
			4.	Peningkatan Pelayanan Standar Pelayanan Minimal (Akreditasi Puskesmas)	Persentase puskesmas terakreditasi	25 Puskesmas Terakreditasi		Dinas Kesehatan	



			5.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%	SKPD Penanggung Jawab	
Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai - nilai keagamaan	1.	Pencerahan Qalbu Jum'at Ibadah	Rata - rata partisipasi masyarakat dan aparatur dalam mengikuti pencerahan qalbu jum'at ibadah	3945 Orang	Dinas Sosial			
	2.	Pemberian insentif bagi guru mengaji	Jumlah guru mengaji dan Pembina TK/TPA yang mendapatkan insentif	628 Orang	Dinas Sosial			
	3.	Pemberian insentif bagi imam dusun/ lingkungan	Cakupan imam dusun/ lingkungan yang mendapatkan insentif	1385 Orang	Dinas Sosial			
Peningkatan kemandirian para fakir miskin komunitas adat terpencil dan PMKS	1.	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan	90%	Dinas Sosial			
	2.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%	SKPD Penanggung Jawab			
Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM	1.	Pengembangan UMKM Unggulan	Tercapainya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif	167 UMKM Unggulan	Dinas Koperasi dan UMKM			
	2.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%	SKPD penanggung jawab urusan			
Pengar-us-utama-an gender	1.	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Jumlah SKPD yang berpartisipasi dalam vocal point	48 SKPD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
	2.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%	SKPD penanggung jawab urusan			
Peningkatan pemenuhan kebutuhan anak dasar anak	1.	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender	Jumlah sarana dan prasarana pada lembaga perlindungan perempuan dan anak	1 Unit	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
	2.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%	SKPD penanggung jawab urusan			
Penyadaran KB pada keluarga miskin dan pendidikan kesehatan reproduksi	1.	Program keluarga berencana	Persentase peserta KB aktif MKJP	11%	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB			
Penguatan kelembagaan organisasi kepemudaan dan fasilitas cabang olahraga	1.	Pemberdayaan pemuda	Jumlah kegiatan pemuda	74 Kegiatan	Dinas Pemuda dan Olahraga			
	2.	Pembinaan Olahraga	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	31,03%	Dinas Pemuda dan Olahraga			



			3.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%	SKPD penanggung jawab urusan		
		Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan perlindungan lingkungan serta melibatkan masyarakat dalam rangka menjamin keberlangsungan pembangunan sanitasi	1.	Program lingkungan sehat	Persentase rumah tangga bersanitasi	75,20%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
			2.	Percepatan pembangunan sanitasi perkotaan	Rasio rumah layak huni	73,32%	Dinas Perkimtan dan Dinas Sosial		
			3.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%	SKPD penanggung jawab urusan		
2.	Optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah yang terpadu dan berkelanjutan	Peningkatan fasilitas perlengkapan jalan	1.	Proram pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Tersedianya prasarana jalan dan jembatan	2127 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
					Terpeliharanya tingkat keandalan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	150 Km			
				2.	Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan	Angka kecelakaan lalu lintas	149 kejadian	Dinas Perhubungan	
				3.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%	SKPD penanggung jawab urusan	
		Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pertanian, peternakan dan perikanan	1.	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan sumber daya air lainnya	Rasio jaringan irigasi	90,16%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Program peningkatan sarana dan prasarana produksi (bantuan bibit dan pupuk)				Produksi dan produktivitas padi dan palawija	Padi : 405.616 ton Jagung : 253.101 ton	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura		
					Produktivitas hortikultura	Kentang : 21,20 ton/ha Cabe : 6,6 ton/ha	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura		
					Areal tanaman kakao dan kopi	Kakao : 1.850 ton Kopi : 2.650 ton	Dinas Peternakan dan Perkebunan		
			3.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%	SKPD penanggung jawab urusan		
		Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset	1.	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jenis dokumen per tahun	8 Dokumen	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		
	2.				Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi AFP	75%	Inspektorat Daerah	
						Opini BPK	WTP	Inspektorat Daerah	



			3.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%	SKPD penanggung jawab urusan	
		Pengembangan wisata alam dan wisata budaya	1.	Pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah dan kualitas pengelolaan destinasi yang dikembangkan	5 objek daerah tujuan wisata (OTDW)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			2.	Pemeliharaan Cagar Budaya	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dipelihara	93 buah	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			3.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%	SKPD penanggung jawab urusan	
		Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau	1.	Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah	27,11	Dinas PUPR &DLH	
			2.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%	SKPD penanggung jawab urusan	
		Pengembangan kawasan strategis secara terpadu	1.	Optimalisasi pemanfaatan kawasan strategis	Persentase kawasan yang dikelola	46,15	Dinas PUPR	
			2.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%	SKPD penanggung jawab urusan	
3.	Penguatan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui pengembangan sektor potensial daerah	Peningkatan ketersediaan pangan	1.	Ketahanan pangan	Ketersediaan pangan utama (ton)	168.886	Dinas Ketahanan Pangan	
			2.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%	SKPD penanggung jawab urusan	
		Peningkatan peluang dan kesempatan kerja	1.	Program peningkatan kesempatan kerja	Angka pengangguran terbuka (%)	3,22 Km	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			2.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%	SKPD penanggung jawab urusan	
		Pengembangan wisata alam dan wisata budaya	1.	Peningkatan pemasaran wisata (penyelenggaraan Kota Raya Malino)	Kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	127.092 Orang	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			2.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%	SKPD penanggung jawab urusan	
		Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM	1.	Pengembangan UMKM Unggulan	Tercapainya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	167 UMKM Unggulan	Dinas Koperasi dan UKM Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
			2.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%	SKPD penanggung jawab urusan	



		Memantapkan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan serta lembaga adat dan sosial budaya masyarakat	1.	Fasilitasi Pengembangan UMKM Unggulan	Persentase Desa/Kelurahan cepat berkembang	20,96%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			2.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%	SKPD penanggung jawab urusan	
		Pengembangan peluang investasi	1.	Peningkatan perluasan informasi barang dan jasa serta peluang investasi daerah yang dapat dikembangkan	Nilai investasi (Rp)	796.496,94	Dinas PM & PTSP	
			2.	Peningkatan kualitas perdagangan berbasis pasar rakyat	Laju inflasi	4,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
			3.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%	SKPD penanggung jawab urusan	
		Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa	1.	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase lembaga ekonomi pedesaan yang berkembang	18,01%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			2.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%	SKPD penanggung jawab urusan	
4.	Peningkatan kualitas pelayanan melalui pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik	Pengembangan SDM Aparatur dan pembinaan karier yang lebih efektif	1.	Peningkatan kapasitas birokrasi	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat	40%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			2.	Pengembangan SDM Aparatur, Pembinaan karier berbasis kompetensi	Proporsi PNS dengan standar kompetensi pegawai (SKP) pada kategori baik (%)	100%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset	1.	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jenis dokumen per tahun	8 Dokumen	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
			2.	Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi AFP	75%	Inspektorat Daerah	
					Opini BPK	WTP	Inspektorat Daerah	
			3.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%	SKPD penanggung jawab urusan	
		Penanganan pengaduan masyarakat	1.	Kualitas pelayanan publik	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	71,43	Dinas PM & PTSP Disdukcapil Bapenda Unit Layanan Publik Lainnya	
			2.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%	SKPD penanggung jawab urusan	



	Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	1.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Angka kriminalitas	827	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		2.	Peningkatan pembinaan partai politik dan organisasi politik	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	72% (Pemilukada Kabupaten)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		3.	Program peningkatan, pencegahan dan kesiagapan menghadapi bencana	Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen bencana (menit)	<60	Dinas Pemdam Kebakaran dan BPBD
		4.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%	SKPD penanggung jawab urusan
	Penguatan dukungan sarana dan prasarana	1.	Peningkatan pengawasan dan pemantauan status baku mutu air	Tingkat pencemaran lingkungan (baku mutu)	<baku mutu	Dinas Lingkungan Hidup
		2.	Pemenuhan penyelesaian kasus lingkungan	Penegakan huum lingkungan (%)	100	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase penanganan sampah (%)	59,66	Dinas Lingkungan Hidup
		3.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%	SKPD penanggung jawab urusan
	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	1.	Pembinaan perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang berkualitas dan tepat waktu	Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100	Bappeda
				Penjabaran program RKPD ke dalam APBD (%)	100	Bappeda
		2.	Program penunjang lainnya	Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya	100%	SKPD penanggung jawab urusan

Sumber : RKPD Kabupaten Gowa Tahun 2021.

1.1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat, Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas (2) dua jenis urusan yaitu Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh semua



daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah.

Kebijakan terkait dengan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam pasal ini disebutkan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum. Kemudian dalam Pasal 9 Ayat (3) menyebutkan Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Dalam Pasal 11 Ayat (2) disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dalam Pasal 18 Ayat (1) disebutkan bahwa Penyelenggara Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam Ayat (2) disebutkan bahwa pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Cakupan pelayanan dasar sebagaimana urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial. Pengaturan standar pelayanan dalam kategori minimal dengan berpedoman pada standar yang ditetapkan sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang kemudian secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Standar Pelayanan Minimal merupakan tolak ukur untuk menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dan harus mampu dicapai oleh setiap daerah sesuai dengan batas waktu capaian yang ditentukan. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah Kabupaten Gowa untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal. Di Kabupaten Gowa SKPD pelaksana SPM adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Satuan Polisi Pamong Praja, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Sosial.



B. DASAR HUKUM

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa antara lain sebagai berikut :

1. UNDANG - UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA

Undang - undang yang mengatur tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, perubahan, menggabungkan, memisahkan dan/atau mengganti, pembubaran/menghapus kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintah, non kementerian dan pemerintah daerah serta pengangkatan dan pemberhentian menteri atau menteri koordinasi berisi penataan kembali keseluruhan kelembagaan pemerintahan sesuai dengan nomenklatur seperti departemen, kementerian negara, lembaga pemerintah non kementerian maupun instansi pemerintah lain termasuk lembaga nonstruktural.

2. UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Otonomi Daerah menjadi sangat penting berkaitan dengan upaya peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pelaksanaan pembangunan agar terwujud desentralisasi yang dapat menghasilkan peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan guna semakin mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menghadapi dinamika kehidupan, baik di dalam maupun di luar negeri, maka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sesuai prinsip - prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat. Upaya ini merupakan langkah strategis sekaligus peluang bagi daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam upaya mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah. Urusan pemerintahan yang menjadi rujukan pelaksanaan SPM adalah urusan wajib pelayanan dasar.



4. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan pemukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sosial.

5. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan agar pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, keterkaitan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*), dengan penganggaran (*budget*) oleh pemerintah daerah, lebih sinkron dengan berbagai kebijakan pemerintah, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

6. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 100 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Petunjuk teknis terkait pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal meliputi format laporan penerapan standar pelayanan minimal pemerintah daerah serta target dan indikator penerima layanan standar pelayanan minimal.

7. PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005 - 2025

RPJPD Kabupaten Gowa 2005 - 2025 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- Menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan.
- Terwujudnya keterpaduan, konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah.
- Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- Menjaga kesinambungan pembangunan jangka menengah yang dilaksanakan per lima tahunan.

8. PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, maka pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan Potensi Daerah.



9. PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026

Penetapan RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk mengarahkan seluruh pelaku pembangunan baik bagi jajaran pemerintah, masyarakat maupun swasta untuk menyusun kerangka perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya secara lebih terarah, terukur dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi dan potensi serta kebutuhan daerah selama kurun waktu 2021-2026.

10. PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA 4 NOMOR TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2021, DAN PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2021

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Daerah merupakan kerja bersama antara eksekutif dan legislatif memuat program kerja tahunan, dan menjadi pedoman kerja dan sekaligus sebagai indikator kinerja yang akan dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa pada Tahun 2021.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gowa merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa, sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa yang diturunkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gowa Tahun 2021 untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA PPAS APBD) Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021. Selain itu, juga disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD tahun sebelumnya baik pada aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021, diprioritaskan dalam mencapai target-target pembangunan Kabupaten Gowa Tahun 2021, serta digunakan dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Harapan dari hal tersebut adalah agar pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2021 dapat semakin mengarah pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gowa serta pada pencapaian Visi Kabupaten Gowa yaitu Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas, Mandiri dan Berdaya Saing dengan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.



Kebijakan umum daerah Kabupaten Gowa dalam rencana penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal telah dituangkan dalam RPJMD yang digambarkan sebagai berikut:

1. Kebijakan umum di bidang pendidikan yaitu peningkatan sarana dan prasarana layanan pendidikan berkualitas serta kemudahan dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan informasi,
2. Kebijakan umum di bidang kesehatan yaitu peningkatan sarana dan prasarana layanan kesehatan berkualitas beserta sarana penunjang kesehatan.
3. Kebijakan umum di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman yaitu peningkatan penataan infrastruktur perkotaan yang didukung dengan peningkatan sistem jaringan prasarana perkotaan dan pengendalian lingkungan hidup.
4. Kebijakan umum di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yaitu pengembangan dan pemeliharaan nilai-nilai budaya lokal masyarakat, pembinaan mental spiritual masyarakat serta penyebarluasan informasi produk-produk hukum kepada masyarakat.
5. Kebijakan umum di bidang sosial yaitu pemberian bantuan pada penyandang masalah kesejahteraan sosial.



BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut ini:

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Makro Kabupaten Gowa

NO.	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	PERUBAHAN (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	70.14	70.29	0.21%
2	Angka Kemiskinan	7.38%	7.54%	2.17%
3	Angka Pengangguran	6.44%	4.30%	-33.23%
4	Pertumbuhan Ekonomi	1.76%	7.26%	312.5%
5	Pendapatan Perkapita	Rp 27.450.000,00	Rp 30.440.000,00	10.89%
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0.345	0.358	3.768%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Gowa, 2022.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gowa berada di angka 70.29 naik 0.21 persen dibandingkan pada tahun 2020 yang berada di angka 70.14. Hasil ini menunjukkan tren positif dibandingkan tahun sebelumnya. Hasil berbeda ditunjukkan pada angka kemiskinan di Kabupaten Gowa. Pada tahun 2021 angka kemiskinan berada pada posisi 7.54%, mengalami kenaikan sebesar 2.17 % dari tahun 2020 yang berada pada posisi 7.38%.

Angka Pengangguran di Kabupaten Gowa pada tahun 2021 adalah 4.30% turun 33.22% dari tahun 2020 yang berada pada 6.44%. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 berada pada 7.26% naik 312.5% dari tahun 2020 yang berada pada 1.76%. Badan Pusat Statistik mencatat besaran pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Gowa pada tahun 2020 sebesar Rp 27.450.000,00 sedangkan untuk tahun 2021 sebesar Rp 30.440.000,00 dan ketimpangan pendapatan atau dikenal dengan *gini ratio* Kabupaten Gowa pada tahun 2021 berada pada posisi 0.358 mengalami kenaikan 3.768% dari tahun 2020 yang berada di angka 0.345.

2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.

**2.2.1 INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN**

Adapun capaian indikator kinerja kunci keluaran dapat digambarkan sebagai berikut ini:

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Kunci Keluaran Tahun 2021

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD			
1		Jumlah satuan pendidikan anak usia dini terakreditasi (Negeri dan Swasta)	473	Dinas Pendidikan	
2		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Tidak Ada	Dinas Pendidikan	
3		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	13.925 Org	Dinas Pendidikan	
4		Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	940 Org	Dinas Pendidikan	
5		Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	984 Org	Dinas Pendidikan	
6		Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	594 Org	Dinas Pendidikan	
7		Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non formal dari lembaga pemerintah	145 Org	Dinas Pendidikan	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar			
1		Jumlah SD Negeri terakreditasi	414	Dinas Pendidikan	
2		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Tidak Ada	Dinas Pendidikan	
3		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	72.750 Org	Dinas Pendidikan	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	4.630 Org	Dinas Pendidikan	
5	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	2.372 Org	Dinas Pendidikan	
6	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	400 Org	Dinas Pendidikan	
7	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	400 Org	Dinas Pendidikan	
8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.825 Org	Dinas Pendidikan	
9	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	367 Org	Dinas Pendidikan	
10	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA	429 Org	Dinas Pendidikan	
Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah				
1	Jumlah SMP Negeri terakreditasi	82	Dinas Pendidikan	
2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Tidak Ada	Dinas Pendidikan	
3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	22.500 Org	Dinas Pendidikan	
4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.881 Org	Dinas Pendidikan	
5	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	869 Org	Dinas Pendidikan	
6	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	357 Org	Dinas Pendidikan	
7	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	88 Org	Dinas Pendidikan	
8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	763 Org	Dinas Pendidikan	
9	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	62 Org	Dinas Pendidikan	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		10	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA	315 Org	Dinas Pendidikan	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
		1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	30	Dinas Pendidikan	
		2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	2.598 Org	Dinas Pendidikan	
		3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	2.598 Org	Dinas Pendidikan	
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	552 Org	Dinas Pendidikan	
		5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	458 Org	Dinas Pendidikan	
		6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	458 Org	Dinas Pendidikan	
		9	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Tidak Perlu Diisi		
		10	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Tidak Perlu Diisi		
2	Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan				
		1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	1	RSUD Syekh Yusuf Gowa	
		Persentase RS Rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi				
		1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	2	Dinas Kesehatan	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5 Jenis	Dinas Kesehatan	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal sesuai standar	500 Org	Dinas Kesehatan	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 Jenis	Dinas Kesehatan	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	600 Org	Dinas Kesehatan	
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	6 Jenis	Dinas Kesehatan	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	533 Org	Dinas Kesehatan	
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	9 Jenis	Dinas Kesehatan	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	578 Org	Dinas Kesehatan	
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5 Jenis	Dinas Kesehatan	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	356 Org	Dinas Kesehatan	
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2 Jenis	Dinas Kesehatan	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	26 Org	Dinas Kesehatan	
Persentase usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 Jenis	Dinas Kesehatan	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	180 Org	Dinas Kesehatan	
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 Jenis	Dinas Kesehatan	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	162 Org	Dinas Kesehatan	
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 Jenis	Dinas Kesehatan	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	143 Org	Dinas Kesehatan	
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4 Jenis	Dinas Kesehatan	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	52 Org	Dinas Kesehatan	
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	7 Jenis	Dinas Kesehatan	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	26 Org	Dinas Kesehatan	
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4 Jenis	Dinas Kesehatan	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	26 Org	Dinas Kesehatan	



3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota					
		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Tidak Ada Data	Dinas PUPR		
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Tidak Ada Data	Dinas PUPR		
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi, erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Tidak Ada Data	Dinas PUPR		
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Tidak Ada Data	Dinas PUPR		
		5	Rencana Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan/ Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air WS Kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada Data	Dinas PUPR		
		6	Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan/ Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada Data	Dinas PUPR		
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Tidak Ada Data	Dinas PUPR		
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten/kota					
		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Tidak Ada Data	Dinas PUPR		
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Tidak Ada Data	Dinas PUPR		
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi, erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Tidak Ada Data	Dinas PUPR		
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Tidak Ada Data	Dinas PUPR		
		5	Rencana Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan/ Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air WS Kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada Data	Dinas PUPR		
		6	Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan/ Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada Data	Dinas PUPR		
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Tidak Ada Data	Dinas PUPR		
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi					



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		1	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	56.57%	Dinas PUPR		
		2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	91%	Dinas PUPR		
		3	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	43.89%	Dinas PUPR		
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota					
		1	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada	Dinas PUPR		
		2	Tersusunnya dan ditetapkannya JAKSTRADA Kabupaten/Kota	Tidak Ada	Dinas PUPR		
		3	Jumlah BUMD dan UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	PDAM Tirta Je'neberang	Dinas PUPR		
		4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	1 (Satu) Izin	Dinas PUPR		
		5	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain	Tidak Ada	Dinas PUPR		
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik					
		1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S	503 RT	Dinas PUPR		
		2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	Tidak ada Pembangunan	Dinas PUPR		
		3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T	503 RT	Dinas PUPR		
		4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	Tidak Ada Data	Dinas PUPR		
		5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	Tidak Ada Data	Dinas PUPR		
		6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	3.206 RT	Dinas PUPR		
		7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses dasar	90.3%	Dinas PUPR		



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

	8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses aman	90.1%	Dinas PUPR	
	9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-T akses aman	Tidak Ada Data	Dinas PUPR	
	10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	3.4%	Dinas PUPR	
	11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	0%	Dinas PUPR	
	12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	0%	Dinas PUPR	
	13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	15.69%	Dinas PUPR	
	14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Belum Ada Jasa Penyedotan	Dinas PUPR	
	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota				
	1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	0.005%	Dinas PUPR	
	2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	5987 IMB	Dinas PUPR	
	3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Perda No. 4 Tahun 2014	Dinas PUPR	
	4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Belum Ada	Dinas PUPR	
	5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Tidak Ada Data	Dinas PUPR	
	6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Tidak Ada Data	Dinas PUPR	
	7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	105 Unit	Dinas PUPR	
	8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara dan dirawat	18 Unit	Dinas PUPR	
	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota				



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kab/kota	74.80%	Dinas PUPR		
		2	Panjang jalan yang dibangun	0 km	Dinas PUPR		
		3	Panjang jembatan yang dibangun	68 m	Dinas PUPR		
		4	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	36.28 km	Dinas PUPR		
		5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	30 m	Dinas PUPR		
		6	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	0 m	Dinas PUPR		
		7	Panjang jembatan yang direhabilitasi	0 m	Dinas PUPR		
		8	Panjang jalan yang dipelihara	40.13 km	Dinas PUPR		
		9	Panjang jembatan yang dipelihara	36.3 m	Dinas PUPR		
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi					
		1	Jumlah pelatihan tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	1 Kegiatan	Dinas PUPR		
		2	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	44 Orang	Dinas PUPR		
		3	Jumlah tenaga konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	48 Orang	Dinas PUPR		
		4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Tidak Ada Data	Dinas PUPR		
		5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Tidak Ada Data	Dinas PUPR		
		6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Tidak Ada Data	Dinas PUPR		
		7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Tidak Ada Data	Dinas PUPR		



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Tidak Ada Data	Dinas PUPR	
		9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Tidak Ada Data	Dinas PUPR	
		10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	Tidak Ada Data	Dinas PUPR	
		11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Tidak Ada Data	Dinas PUPR	
		12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Tidak Ada Data	Dinas PUPR	
		13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Tidak Ada Data	Dinas PUPR	
		14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak Ada Data	Dinas PUPR	
		15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	100 Pengawasan	Dinas PUPR	
		16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada Data	Dinas PUPR	
		17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada Data	Dinas PUPR	
		18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	Tidak Ada Data	Dinas PUPR	
		19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kab/kota	Tidak Ada Data	Dinas PUPR	
		20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah kab/kota	Tidak Ada Data	Dinas PUPR	
		21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kab/kota	Tidak Ada Data	Dinas PUPR	
		22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak Ada Data	Dinas PUPR	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada Data	Dinas PUPR		
		24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada Kecelakaan	Dinas PUPR		
		25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	100 Pengawasan	Dinas PUPR		
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi					
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota					
		1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan		
		2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan		
		3	Jumlah RT, KK dan jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan		
		4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan		
		5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan		
		6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan		
		7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan		
		8	Jumlah RT, KK dan jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan		
		9	Jumlah luasan dan lokasi pencadangan lahan	Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan		
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota					
		1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan		
		2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan		



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan		
		4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan		
		5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan		
		6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan		
		Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/kota yang ditangani					
		1	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	3 Ha	Dinas Perkimtan		
		2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	48 Unit	Dinas Perkimtan		
		3	Jumlah luasan (Ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	3 Ha	Dinas Perkimtan		
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)					
		1	Jumlah rumah di kabupaten/kota	151.474 Unit	Dinas Perkimtan		
		2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	48 Unit	Dinas Perkimtan		
		3	Jumlah rumah tidak layak huni	6.915 Unit	Dinas Perkimtan		
		4	Jumlah rumah yang tidak dihuni	0 Unit	Dinas Perkimtan		
		5	Rasio rumah dan KK	1.39	Dinas Perkimtan		
		6	Jumlah rumah pembangunan baru	250 Unit	Dinas Perkimtan		
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)					
		1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	226 Unit	Dinas Perkimtan		



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	151.474 Unit	Dinas Perkimtan		
		3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	151.474 Unit	Dinas Perkimtan		
		4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site/off site)	151.474 Unit	Dinas Perkimtan		
		5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	28 Unit	Dinas Perkimtan		
		6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan		
		7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	45 Pengembang	Dinas Perkimtan		
		8	Jumlah pengembang yang terregistrasi	45 Pengembang	Dinas Perkimtan		
		9	Jumlah pengembang yang mendapatkan penyuluhan atau pelatihan	15 Pengembang	Dinas Perkimtan		
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan					
		1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kabupaten/kota yang ditangani	5 Kasus	Satpol PP		
		2	Jumlah satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	29 Org	Satpol PP		
		3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	7 Perda	Satpol PP		
		4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	3 Org	Satpol PP		
		5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Ada	Satpol PP		
		6	Tersedianya sarana dan prasarana minimal	21 Unit	Satpol PP		
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan					
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana					



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	BPBD	
2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	BPBD	
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				
1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100%	BPBD	
2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100%	BPBD	
3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	1.4%	BPBD	
4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	4.25%	BPBD	
5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	0.59%	BPBD	
6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	0.59%	BPBD	
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				
1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100%	BPBD	
2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	50%	BPBD	
3	Persentase jumlah petugas aktif dalam penanganan darurat bencana	25%	BPBD	
4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	83.3%	BPBD	
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				
1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kabupaten/kota	2 Jenis	Dinas Damkar	
2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana dan prasarana damkar, sarana dan prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada di 2 Kecamatan	Dinas Damkar	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		3	Tersedianya aparatur selama 24 jam yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Ada	Dinas Damkar		
		4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana/prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	Tidak Ada	Dinas Damkar		
		5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	5 Jenis	Dinas Damkar		
		6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	33 Orang	Dinas Damkar		
		7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	60 Orang	Dinas Damkar		
		8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Tidak Ada Kegiatan	Dinas Damkar		
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran					
6	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti					
		1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	1 Unit	Dinas Sosial		
		2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	3.628 Orang	Dinas Sosial		
		3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1 Tim (TAGANA)	Dinas Sosial		
		4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	3.628 Orang	Dinas Sosial		
		5	Jumlah kendaraan roda empat yang berakses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	1 Unit	Dinas Sosial		
		6	Jumlah penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	150 Orang	Dinas Sosial		
		7	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Tidak Ada	Dinas Sosial		
		8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	150 Orang	Dinas Sosial		



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	Tidak Ada Data	Dinas Sosial	
10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	Tidak Ada	Dinas Sosial	
11	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	1 Unit	Dinas Sosial	
12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	Tidak Ada Data	Dinas Sosial	
13	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	Tidak Ada Data	Dinas Sosial	
14	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	7 Orang	Dinas Sosial	
15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	Tidak Ada Kegiatan	Dinas Sosial	
16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	Tidak Ada Kegiatan	Dinas Sosial	
17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	38 Orang	Dinas Sosial	
18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	7 Orang	Dinas Sosial	
19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	2 Orang	Dinas Sosial	
20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	5 Orang	Dinas Sosial	
21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	3 Orang	Dinas Sosial	
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota				
1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	515 Orang	Dinas Sosial	
2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	515 Orang	Dinas Sosial	
3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	1 Unit	Dinas Sosial	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	515 Orang	Dinas Sosial	
		5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	515 Orang	Dinas Sosial	
		6	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	6 Orang	Dinas Sosial	
7	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja				
		1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten	Ada	Dinas Nakertrans	
		2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	0%	Dinas Nakertrans	
		3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	Belum Ada	Dinas Nakertrans	
		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi				
		1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	100%	Dinas Nakertrans	
		2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	52.46%	Dinas Nakertrans	
		3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	25.42%	Dinas Nakertrans	
		4	Persentase LPK yang terakreditasi	16.67%	Dinas Nakertrans	
		5	Persentase LPK yang memiliki perizinan	100%	Dinas Nakertrans	
		6	Jumlah penganggur yang dilatih	240 Orang	Dinas Nakertrans	
		7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	99.16%	Dinas Nakertrans	
		8	Persentase penyerapan lulusan	99.16%	Dinas Nakertrans	
		9	Lulusan bersertifikat kompetensi	36.97%	Dinas Nakertrans	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	0 Orang	Dinas Nakertrans	
11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0 Orang	Dinas Nakertrans	
Tingkat produktivitas tenaga kerja				
1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	40.42%	Dinas Nakertrans	
2	Data tingkat produktivitas total		Dinas Nakertrans	
Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)				
1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	10.18%	Dinas Nakertrans	
2	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	100%	Dinas Nakertrans	
3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	8 Buah	Dinas Nakertrans	
4	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	100%	Dinas Nakertrans	
5	Persentase perusahaan yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	100%	Dinas Nakertrans	
6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	2.10%	Dinas Nakertrans	
7	Jumlah mogok kerja	Tidak Ada	Dinas Nakertrans	
8	Jumlah penutupan perusahaan	1 Unit	Dinas Nakertrans	
9	Jumlah perselisihan kepentingan	0 Kasus	Dinas Nakertrans	
10	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0 Kasus	Dinas Nakertrans	
11	Jumlah perselisihan PHK	10 Kasus	Dinas Nakertrans	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

12	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	20 Orang	Dinas Nakertrans	
13	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	10 Kasus	Dinas Nakertrans	
14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	0 LKS	Dinas Nakertrans	
15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	60%	Dinas Nakertrans	
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota				
1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	106 Buah	Dinas Nakertrans	
2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kabupaten/kota	2.439 Orang	Dinas Nakertrans	
3	Jumlah bursa kerja khusus (BKK) wilayah kabupaten/kota	6 Unit	Dinas Nakertrans	
4	Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0 Orang	Dinas Nakertrans	
5	Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	1 Orang	Dinas Nakertrans	
6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kabupaten/kota	3 Unit	Dinas Nakertrans	
7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota	6 Kerjasama	Dinas Nakertrans	
8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	366 Orang	Dinas Nakertrans	
9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	0%	Dinas Nakertrans	
10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	0 Orang	Dinas Nakertrans	
11	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	0%	Dinas Nakertrans	
12	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0%	Dinas Nakertrans	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0%	Dinas Nakertrans	
		14	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	0 LTSA	Dinas Nakertrans	
8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
			Persentase ARG pada belanja langsung APBD			
		1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	54 Lembaga	DP3A	
		2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	3 Program	DP3A	
			Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota			
		1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	2 Media	DP3A	
		2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	2 Unit	DP3A	
		3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	DP3A	
		4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan pelatihan	2 Unit	DP3A	
		5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemkab/kota (APBD kab/kota)	2 Unit	DP3A	
			Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)			
		1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Tidak Ada	DP3A	
		2	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	2 Orang	DP3A	
		3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pelatihan	7 Lembaga	DP3A	
		4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	2 Lembaga	DP3A	
		5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1 Program	DP3A	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		6	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	3 Unit	DP3A		
		7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	DP3A		
9	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)					
		1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada	Dinas Ketapang		
		2	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ya	Dinas Ketapang		
		3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ya	Dinas Ketapang		
		4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ya	Dinas Ketapang		
		5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	Dinas Ketapang		
		6	Tertanganinya kerawanan pangan	Ya	Dinas Ketapang		
		7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ya	Dinas Ketapang		
		8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ya	Dinas Ketapang		
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan					
		1	SK Izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota	Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan		
		2	SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Tanah Objek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee dan Daftar Subjek	Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan		
		3	SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan		
		4	Dokumen izin membuka tanah	Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan		



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		5	Dokumen perencanaan penggunaan tanah kabupaten/kota	Tidak Ada Data	Dinas Perkimtan	
			Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum			
			Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal			
			Tersedianya Tanah Objek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee			
			Tersedianya tanah untuk masyarakat			
			Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi			
11	Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota			
		1	Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) Indeks kualitas udara (IKU) b. Indeks kualitas tutupan lahan (ITLH) c. Indeks tutupan hutan (ITH)	50.00 85.58 43.51 0	DLH	
			Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota			
		1	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Ada Ada Tidak Ada	DLH	
			Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota			
		1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	DLH	
		2	Rasio pejabat pengawas LH (PPLHD) di kabupaten/kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	0%	DLH	
		3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota	0%	DLH	
		4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0%	DLH	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		5	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0%	DLH		
		6	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani	100%	DLH		
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP Elektronik					
		1	Penerbitan akta perkawinan		100%	Dinas Dukcapil	
		2	Penerbitan akta perceraian		100%	Dinas Dukcapil	
		3	Penerbitan akta kematian		96.80%	Dinas Dukcapil	
		4	Penyajian data kependudukan		100%	Dinas Dukcapil	
		Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA					
		Kepemilikan akta kelahiran					
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama					
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal					
		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		Tidak Ada	Dinas PMPD	
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya		Tidak Ada	Dinas PMPD	
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		Tidak Ada	Dinas PMPD	
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		Tidak Ada	Dinas PMPD	
Persentase peningkatan status desa mandiri							



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	121 Desa	Dinas PMPD			
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	121 Desa	Dinas PMPD			
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	7.042 Lembaga	Dinas PMPD			
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Tidak Ada	Dinas PMPD			
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR (Total Fertility Rate)/Angka Kelahiran Total						
		1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan			Ada	Dinas PP&KB	
		2	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun			21	Dinas PP&KB	
		3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)			28.04	Dinas PP&KB	
		4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)			80%	Dinas PP&KB	
		5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK			5 Jenis	Dinas PP&KB	
		Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)						
		1	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP			100%	Dinas PP&KB	
		2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			69.69%	Dinas PP&KB	
		3	Pemerintah Daerah kabupaten/kota memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif			54 Pokja	Dinas PP&KB	
		4	Persentase pelayanan KB pasca melahirkan			52.78%	Dinas PP&KB	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)						
		1	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah			12.34%	Dinas PP&KB	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	71.47%	Dinas PP&KB		
15	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota					
		1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C		100%	Dinas Perhubungan	
		2	Terlaksananya pelayanan uji berkala		488.8%	Dinas Perhubungan	
		3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi		Tidak Ada	Dinas Perhubungan	
		4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas		97.8%	Dinas Perhubungan	
		V/C Ratio di jalan kabupaten/kota					
		1	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota		97.8%	Dinas Perhubungan	
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo					
		1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo		100%	Dinas Kominfo SP	
		2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo		100%	Dinas Kominfo SP	
		3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah		Video Conferences, Daftar IP Phone, Mail OPD	Dinas Kominfo SP	
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi					
		1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan subdomain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015		Tidak Ada Data	Dinas Kominfo SP	
		2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal atau situs web yang sesuai standar		100%	Dinas Kominfo SP	
3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		100%	Dinas Kominfo SP			



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	40.74%	Dinas Kominfo SP		
		5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang memanfaatkan sertifikat elektronik	0.11%	Dinas Kominfo SP		
		6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	0.41%	Dinas Kominfo SP		
		7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	0.26%	Dinas Kominfo SP		
		8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100%	Dinas Kominfo SP		
		9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100%	Dinas Kominfo SP		
		10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai Renstra Kominfo)	100%	Dinas Kominfo SP		
		11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	Tidak Ada	Dinas Kominfo SP		
		12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	100%	Dinas Kominfo SP		
		13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	0%	Dinas Kominfo SP		
		14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada	Dinas Kominfo SP		
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota					
		1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten	Tidak Ada Data	Dinas Kominfo SP		
		2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Tidak Ada Data	Dinas Kominfo SP		
		3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Tidak Ada Data	Dinas Kominfo SP		
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya koperasi yang berkualitas					
		1	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0.064%	Dinas Kop&UKM		



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Tidak Ada	Dinas Kop&UKM	
3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Tidak Ada	Dinas Kop&UKM	
4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Tidak Ada Data	Dinas Kop&UKM	
5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0.062%	Dinas Kop&UKM	
6	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0.00044%	Dinas Kop&UKM	
7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0.0017%	Dinas Kop&UKM	
8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	Tidak Ada	Dinas Kop&UKM	
9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0.094%	Dinas Kop&UKM	
10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	24 Unit	Dinas Kop&UKM	
11	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	4.30%	Dinas Kop&UKM	
12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0.89%	Dinas Kop&UKM	
13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Tidak Ada	Dinas Kop&UKM	
Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha				
1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	0.8716%	Dinas Kop&UKM	
2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (OSD)	0.0178%	Dinas Kop&UKM	
3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0.0013%	Dinas Kop&UKM	
4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0.0001%	Dinas Kop&UKM	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0.0004%	Dinas Kop&UKM		
		6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0.0018%	Dinas Kop&UKM		
		7	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	0.0007%	Dinas Kop&UKM		
18 Penanaman Modal							
		Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota					
		1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Tidak Ada	DPM-PTSP		
		2	Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tidak Ada	DPM-PTSP		
		3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tidak Ada	DPM-PTSP		
		4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Tidak Ada	DPM-PTSP		
		5	Kegiatan pameran penanaman modal	1 Kegiatan	DPM-PTSP		
		6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Tidak Ada	DPM-PTSP		
		7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Ada	DPM-PTSP		
		8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	9.716 Izin	DPM-PTSP		
		9	Laporan realisasi penanaman modal	Rp 8.008.088.688.594	DPM-PTSP		
		10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	1 Kegiatan	DPM-PTSP		
		11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	191 Pelaku Usaha	DPM-PTSP		
		12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kabupaten/kota	Ada	DPM-PTSP		



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

19	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri				
		1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Tidak Ada	Dispota	
		2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Tidak Ada	Dispota	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial				
		1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawan dan kepeloporan pemuda	526 Orang	Dispota	
		2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	2 Orang	Dispota	
		Peningkatan Prestasi Olahraga				
		1	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan - satuan pendidikan	48 Orang	Dispota	
		2	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	Tidak Ada	Dispota	
20	Statistik	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah				
		1	Tersedianya buku profil daerah	Ada	Dinas Kominfo SP	
		2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	2 Kali	Dinas Kominfo SP	
		3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Tidak Ada Data	Dinas Kominfo SP	
		4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	2 Kali	Dinas Kominfo SP	
		5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Tidak Ada Data	Dinas Kominfo SP	
		6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	Tidak Ada Data	Dinas Kominfo SP	
		7	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	Tidak Ada Data	Dinas Kominfo SP	



		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah				
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah				
		1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Tidak Ada Data	Dinas Koinfo SP	
		2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip - prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	Tidak Ada Data	Dinas Koinfo SP	
		3	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Tidak Ada Data	Dinas Koinfo SP	
		4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	Tidak Ada Data	Dinas Koinfo SP	
22	Kebudayaan	Terlestariannya Cagar Budaya				
		1	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	10 Objek	Dinas Parbud	
		2	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Tidak Ada	Dinas Parbud	
		3	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	1 Objek	Dinas Parbud	
		4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi serta peningkatan kapasitas tata kelola)	3 Orang	Dinas Parbud	
		5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Belum Ada	Dinas Parbud	
		6	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Belum Ada	Dinas Parbud	
		7	Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Tidak Ada Data	Dinas Parbud	
		8	Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Tidak Ada Data	Dinas Parbud	
		9	Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, social, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata)	Tidak Ada Data	Dinas Parbud	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	458 Koleksi	Dinas Parbud		
		11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	14.587 Kunjungan	Dinas Parbud		
			Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum	Tidak Ada Data	Dinas Parbud		
		12	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Tidak Ada Data	Dinas Parbud		
		13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Ada	Dinas Parbud		
		14	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	Ada	Dinas Parbud		
		15	Fasilitasi sertifikasi tim ahli cagar budaya	Ada	Dinas Parbud		
		16	Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	12 Orang	Dinas Parbud		
		17	Peningkatan kompetensi SDM cagar budaya dan permuseuman	12 Orang	Dinas Parbud		
		18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	119 Unit	Dinas Parbud		
		19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	5 Kegiatan	Dinas Parbud		
23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat					
		1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	0.008	Dinas Perpus&Arsip		
		2	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	0.007	Dinas Perpus&Arsip		
		3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0.00005	Dinas Perpus&Arsip		
		4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Belum Ada	Dinas Perpus&Arsip		
		5	Jumlah pasyarakat gemar membaca di masyarakat	Tidak Ada Data	Dinas Perpus&Arsip		



		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat				
		1	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	Tidak Ada Data	Dinas Perpus&Arsip	
		2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Tidak Ada Data	Dinas Perpus&Arsip	
		3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya	Tidak Ada Data	Dinas Perpus&Arsip	
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang - undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan				
		1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Tidak Ada Data	Dinas Perpus&Arsip	
		2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Tidak Ada Data	Dinas Perpus&Arsip	
		3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Tidak Ada Data	Dinas Perpus&Arsip	
		4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Tidak Ada Data	Dinas Perpus&Arsip	
		Tingkat keberadaan dan kebutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat				
		1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	Tidak Ada Data	Dinas Perpus&Arsip	
		2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai dengan NSPK	Tidak Ada Data	Dinas Perpus&Arsip	
		3	Penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten/kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai dengan NSPK di provinsi	Tidak Ada Data	Dinas Perpus&Arsip	
		4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	Tidak Ada Data	Dinas Perpus&Arsip	
		5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	Tidak Ada Data	Dinas Perpus&Arsip	
		6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota yang sesuai dengan NSPK	Tidak Ada Data	Dinas Perpus&Arsip	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
1	2	3	4	5	6
1	Kelautan dan Perikanan	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data : one data KKP)			
		1 Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	907 RTP	Dinas Perikanan	
		2 Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	100%	Dinas Perikanan	
		3 Jumlah izin usaha perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang diterbitkan	18 IUP	Dinas Perikanan	
		4 Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan)	328 RTP	Dinas Perikanan	
		5 Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	600.370 Ekor	Dinas Perikanan	
2	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan			
		1 Jumlah entitas pengelolaan destinasi	101 Objek Wisata	Dinas Parbud	
		2 Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	5 Jenis	Dinas Parbud	
		3 Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	17 Jenis	Dinas Parbud	
		4 Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	191 Orang	Dinas Parbud	
		5 Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	4 Kali	Dinas Parbud	
		6 Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	Tidak Ada	Dinas Parbud	
		7 Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	Tidak Ada	Dinas Parbud	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	1.935	Dinas Parbud		
		9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	25%	Dinas Parbud		
		10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	3 Lokasi	Dinas Parbud		
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota					
		Tingkat hunian akomodasi					
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku					
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD					
3	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun					
		1	Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diberikan	31 Jenis	Dinas TPH		
		2	Prasarana pertanian yang digunakan	27 Jenis	Dinas TPH		
		3	Penerbitan izin usaha pertanian	Tidak Ada	Dinas TPH		
		4	Persentase prasarana yang digunakan	100%	Dinas TPH		
		5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kabupaten/kota	Tidak Ada	Dinas TPH		
		Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular					
		1	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	52.29%	Dinas Nakbun		
4	Kehutanan						
		1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan TAHURA	Tidak perlu diisi	BUP		



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Tidak perlu diisi	BUP		
		3	Pemulihan ekosistem pada TAHURA	Tidak perlu diisi	BUP		
		4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Tidak perlu diisi	BUP		
5	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di kabupaten/kota					
		1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota		Tidak perlu diisi	BUP	
6	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTMT/IUTS/SIUP Toko Swalayan)					
		1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan		Tidak Ada	Dinas Perdastris	
					139 Unit		
		2	Persentase penerbitan TDG		100%	Dinas Perdastris	
		3	Persentase gudang yang tidak memiliki TDG		78.57%	Dinas Perdastris	
		4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri			Dinas Perdastris	
					100%		
					100%		
		5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota		Tidak Ada	Dinas Perdastris	
		6	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu		Tidak Ada	Dinas Perdastris	
7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya		45%	Dinas Perdastris			
8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu		3.75	Dinas Perdastris			
			Persentase kinerja realisasi pupuk				



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		1	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	0.0054 %	Dinas Perdastris		
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku					
		1	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	81%	Dinas Perdastris		
		2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Tidak Ada	Dinas Perdastris		
7	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota					
		1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IKUI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	Tidak Ada	Dinas Perdastris		
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK					
		1	Persentase terselesainya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	100%	Dinas Perdastris		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait					
		1	Persentase jumlah izin yang diterbitkan izin usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	32%	Dinas Perdastris		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait					
		1	Persentase jumlah izin yang diterbitkan izin perluasan industri (IPUI) kecil dan menengah yang diterbitkan	Tidak Ada	Dinas Perdastris		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota					
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini					
		1	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota	Tidak Ada	Dinas Perdastris		



8	Transmigrasi	1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	2 Unit	Dinas Nakertrans	
		2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	2 Unit	Dinas Nakertrans	
		3	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	2 Unit	Dinas Nakertrans	

2.2.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL

Adapun capaian indikator kinerja kunci hasil dapat digambarkan sebagai berikut ini:

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Kunci Hasil Tahun 2021

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
URUSAN WAJIB							
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten Gowa}} \times 100 \%$	$\frac{25.952}{27.999} \times 100\%$	92.68 %	
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 7-12 thn yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar}}{\text{Jumlah anak usia 7-12 thn pada Kabupaten Gowa}} \times 100 \%$	$\frac{82.070}{87.333} \times 100\%$	93.97 %	
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 13-15 thn yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama}}{\text{Jumlah anak usia 13-15 thn pada Kabupaten Gowa}} \times 100 \%$	$\frac{34.791}{43.164} \times 100\%$	80.60%	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	<p>Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan ----- x 100 %</p> <p>Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten Gowa</p>	$\frac{4.141}{163.789} \times 100\%$	2.53 %	
2	Kesehatan	1	Rasio daya tampung RS	<p>Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan ----- x 100 %</p> <p>Jumlah penduduk di Kabupaten Gowa</p>	$\frac{429}{768.868} \times 100\%$	0.06 %	
		2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Gowa yang terakreditasi	<p>Jumlah RS rujukan yang terakreditasi ----- x 100 %</p> <p>Jumlah RS di Kabupaten Gowa</p>	$\frac{1}{3} \times 100\%$	33.33 %	
		3	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	<p>Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ----- x 100 %</p> <p>Jumlah ibu hamil di Kabupaten Gowa</p>	$\frac{12.932}{12.932} \times 100\%$	100 %	
		4	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	<p>Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan ----- x 100 %</p> <p>Jumlah ibu bersalin di Kabupaten Gowa</p>	$\frac{12.221}{12.221} \times 100\%$	100 %	
		5	Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	<p>Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 %</p> <p>Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten Gowa</p>	$\frac{12.205}{12.205} \times 100\%$	100 %	
		6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	<p>Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 %</p> <p>Jumlah balita di Kabupaten Gowa</p>	$\frac{42.311}{42.311} \times 100\%$	100 %	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan Layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten Gowa	$\frac{40.122}{40.122} \times 100\%$	100 %	
		8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten Gowa	$\frac{260.307}{260.307} \times 100\%$	100 %	
		9	Persentase orang usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah orang usia 60 tahun ke atas di Kabupaten Gowa	$\frac{39.444}{39.444} \times 100\%$	100 %	
		10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten Gowa	$\frac{52.086}{52.086} \times 100\%$	100 %	
		11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita DM di Kabupaten Gowa	$\frac{8.631}{8.631} \times 100\%$	100 %	
		12	Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten Gowa	$\frac{1.120}{1.120} \times 100\%$	100 %	
		13	Persentase Orang Terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita TBC di Kabupaten Gowa	$\frac{6.230}{6.230} \times 100\%$	100 %	
		14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar ----- x 100 % Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten Gowa	$\frac{12.173}{12.173} \times 100\%$	100 %	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha) ----- x 100% Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha)	$\frac{0}{1} \times 100\%$	0 %	Tidak Perlu Diisi
		2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan Kabupaten	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan Kabupaten (m) ----- x 100% Luas kawasan permukiman sepanjang pantai Rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten (m)	$\frac{0}{1} \times 100\%$	0 %	Tidak Perlu Diisi
		3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting ----- x 100% Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten	$\frac{24.167}{27.806} \times 1000$	86.9 %	
		4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten ----- x 100% Jumlah total rumah tangga di seluruh kabupaten t	$\frac{187.464}{230.892} \times 100\%$	81.19 %	
		5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD ----- x 100% Jumlah rumah di kabupaten/kota	$\frac{172.606}{230.892} \times 100\%$	74.75 %	
		6	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya ----- x 100 % Jumlah IMB yang berlaku	$\frac{4.658}{4.658} \times 100\%$	100%	
		7	Tingkat kemantapan jalan	Panjang jalan kewenangan kabupaten yang mantap ----- x 100% Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota	$\frac{1.172,39}{2.289,29} \times 100\%$	74.80 %	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis x 100% Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah kabupaten	$\frac{38}{38} \times 100\%$	100 %	
		9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi kecelakaan konstruksi x 100% Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	$\frac{0}{100} \times 100\%$	0 %	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n x 100 % Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	$\frac{11}{11} \times 100\%$	100 %	
		2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni x 100 % Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	$\frac{0}{1} \times 100\%$	100 %	Tidak Perlu Diisi
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani (ha) x 100 % Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha	$\frac{3}{3} \times 100\%$	100 %	
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah kumuh x 100 % Jumlah total unit rumah kabupaten	$\frac{6.915}{151.474} \times 100\%$	4.57 %	
		5	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU x 100 % Jumlah unit rumah kabupaten	$\frac{226}{151.474} \times 100\%$	0.15 %	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100 \%$	$\frac{1.755}{1.755} \times 100\%$	100 %	
		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100 \%$	$\frac{7}{15} \times 100\%$	46.67 %	
		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	543.219 Orang	543.219 Orang	
		4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	543.219 Orang	543.219 Orang	
		5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	853 Orang	853 Orang	
		6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten}} \times 100 \%$	$\frac{43}{53} \times 100\%$	81.13 %	
		7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15.30 Menit	15.30 Menit	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

6	Sosial	1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ----- x 100% Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, Lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	$\frac{3.628}{3.628} \times 100\%$	100 %	
		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran ----- x 100% Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	$\frac{853}{853} \times 100\%$	100 %	
7	Tenaga Kerja	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD ----- x 100 %	$\frac{3}{3} \times 100\%$	100 %	
		2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi ----- x 100 % Jumlah tenaga kerja keseluruhan	$\frac{238}{390.040} \times 100\%$	0.06 %	
		3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) ----- x 100 % Jumlah tenaga kerja keseluruhan	$\frac{15.043.700.000,-}{390.040} \times 100\%$	3.856 %	
		4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ----- x 100 % Jumlah perusahaan	$\frac{25}{475} \times 100\%$	5.88 %	
		5	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan ----- x 100 % Jumlah pencaker yang terdaftar	$\frac{366}{2.439} \times 100\%$	15.01 %	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD}}{\text{Jumlah seluruh belanja langsung APBD}} \times 100 \%$	$\frac{\text{Rp.23.027.901.790,-}}{\text{Rp.831.248.472.646,84}} \times 100\%$	2.77 %	
		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	$\frac{\text{Jumlah anak (penduduk kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi}}{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)}} \times 100 \%$	$\frac{31}{244.702} \times 100\%$	0.01 %	
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100 \%$	$\frac{16}{388.304} \times 100\%$	0.0041 %	
9	Pangan	1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan}}{\text{Jumlah kebutuhan pangan}} \times 100 \%$	$\frac{570.241}{142.560} \times 100\%$	400.00 %	
10	Pertanahan	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	$\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi}}{\text{Seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi}} \times 100 \%$	$\frac{23.9479}{23.9479} \times 100\%$	100 %	
		2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	$\frac{\text{Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}}{\text{Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}} \times 100 \%$	$\frac{0}{1} \times 100\%$	0 %	
		3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi}}{\text{Luas izin lokasi yang diterbitkan}} \times 100 \%$	$\frac{0}{1} \times 100\%$	0 %	
		4	Tersedianya Tanah Objek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	$\frac{\text{Jumlah luas Tanah Objek Landreform (TOL)}}{\text{Jumlah penerima tanah objek landreform}} \times 100 \%$	$\frac{0}{23.9479} \times 100\%$	0 %	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah ----- x 100 % Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan	$\frac{0}{1} \times 100\%$	0 %	
		6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani ----- x 100 % Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	$\frac{0}{1} \times 100\%$	0 %	
11	Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa	62.99	62.99	
		2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten	Total volume sampah yang dapat ditangani ----- x 100 % Total volume timbunan sampah kabupaten	$\frac{124.830}{140.160} \times 100\%$	89.06 %	
		3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten ----- x 100 % Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	$\frac{4}{36} \times 100\%$	11.11 %	
12	Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil	1	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang memiliki KTP ----- x 100 % Jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas	$\frac{538.486}{539.370} \times 100\%$	99.84 %	
		2	Persentase anak usia 0 -17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA ----- x 1000 Jumlah anak usia 0 - 17 tahun	$\frac{72.633}{223.938} \times 100\%$	32.43 %	
		3	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akte lahir ----- x 100 % Jumlah anak usia 0 -18 tahun	$\frac{241.686}{243.260} \times 100\%$	99.35 %	
		4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama penjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan Berdasarkan perjanjian kerja sama ----- x 100 % Jumlah OPD	$\frac{4}{54} \times 100\%$	7.41 %	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100 % Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)	$\frac{0}{1} \times 100\%$	0 %	Tidak Perlu Diisi
		2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100 % Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)	$\frac{12}{59} \times 100\%$	20.34 %	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	TFR (Angka Kelahiran Total)		2.39	2.39	
		2	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	$\frac{85.134}{122.160} \times 100\%$	69.69 %	
		3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	$\frac{14.073}{122.160} \times 100\%$	11.52 %	
15	Perhubungan	1	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota		Rasio Konektivitas Kabupaten Gowa : RK = $(3 \times 1) + 0/9$ = $(3)/9$ = 33.33	33.33	
		2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota		V/C Ratio untuk Jalan Kabupaten Gowa : 0.24 (Tingkat Pelayanan B)	0.24 (Tingkat Pelayanan B)	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

16	Komunikasi dan Informatika	1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo ----- x 100 % Jumlah PD	$\frac{45}{54} \times 100\%$	83.3 %	
		2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi ----- x 100 % Jumlah layanan publik	$\frac{3}{3} \times 100\%$	100 %	
		3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten ----- x 100 % Jumlah penduduk	$\frac{551.500}{768.868} \times 100\%$	71.73 %	
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset ----- Jumlah seluruh koperasi	$\frac{58}{422} \times 100\%$	13.74 %	
		2	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha ----- Jumlah usaha mikro keseluruhan	$\frac{148}{53.045} \times 100\%$	0.28 %	
18	Penanaman Modal	1	(Jumlah investasi tahun n - jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten ----- Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten	$\frac{8.008.088.688.594-2.231.612.112.280}{2.231.612.112.280} \times 100\%$	259 %	
19	Kepemudaan dan Olahraga	1	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten ----- Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten	$\frac{4.169}{190.695} \times 100\%$	2.19 %	
		2	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten ----- Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten	$\frac{1.488}{190.695} \times 100\%$	0.78 %	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		3	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	PON : 1 Emas 1 Perak	1 Emas 1 Perak	
20	Statistik	1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah x 100 % Jumlah PD	54 X 100% 54	100 %	
		2	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah x 100 % Jumlah PD	54 X 100% 54	100 %	
21	Persandian	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi x 100 % Jumlah area penilaian	0 x 100% 1	0 %	
22	Kebudayaan	1	Terlestarinya Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan x 100 % Jumlah cagar budaya yang terdata	1 x100% 24	4.16 %	
23	Perpustakaan	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		Rendah : 9 Sedang : 60 Tinggi : 26	9.5 % 63.2 % 27.4 %	
		2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		0	-	Tidak Perlu Diisi
24	Kearsipan	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (pasal 40 dan 59 UU 43/2009)	$T = (a + l + s + j) / 4$	$T = (100+100+100+0)/4$ $= 300/4$ $= 75$	75	
		2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + j)/6$	0	-	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

URUSAN PILIHAN							
1	Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten	2.134,5 ton	2.134,5 ton	
2	Pariwisata	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{jumlah wisatawan tahun } n-1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1} \times 100\%$	$\frac{191-369}{369} \times 100\%$	-48.24 %	
		2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{jumlah wisatawan tahun } n-1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1} \times 100\%$	$\frac{230.281-150.066}{150.066} \times 100\%$	53.45 %	
		3	Tingkat hunian akomodasi	$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\%$	$\frac{4.651}{102.000} \times 100\%$	4.56 %	
		4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah total PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$	$\frac{500.490.000}{23.536.840.000} \times 100\%$	2.13 %	
		5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah total PAD	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata}}{\text{Jumlah total PAD}} \times 100\%$	$\frac{500.490.000}{260.851.565.760,48} \times 100\%$	0.19 %	
3	Pertanian	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun}}{\text{Luas panen}}$	$\frac{423.480}{70.580}$	6 ton/ha	
		2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	$\frac{\text{Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) - jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}}{\text{Jumlah kejadian/kasus penyakit menular tahun sebelumnya}} \times 100\%$	$\frac{1.733-1.982}{1.982} \times 100\%$	-12.56 %	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

4	Kehutanan						
5	Energi Sumber Daya Mineral						
6	Perdagangan	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan ----- x 100% Jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten	$\frac{227}{290} \times 100\%$	78.28 %	
		2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi ----- x 100% Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)	$\frac{40.752.630}{288.749.007} \times 100\%$	14.11 %	
		3	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan ----- x 100% Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten	$\frac{5.149}{6.312} \times 100\%$	81.57 %	
7	Perindustrian	1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	Jumlah industri kecil dan menengah tahun n - jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 ----- x 100% Jumlah industri besar tahun n-1	$\frac{1.253 - 1.124}{1.124} \times 100\%$	9.52 %	
		2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP		Belum dilaksanakan	Tidak Ada	
		3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	$\frac{137}{428} \times 100\%$	32.01 %	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	$\frac{0}{1} \times 100\%$	0 %	
		5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	$\frac{0}{1} \times 100\%$	0 %	
		6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Ada/Tidak	Ada	Ada	
8	Transmigrasi	-	-	-	-	-	-

2.2.3 INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Adapun capaian indikator kinerja kunci hasil untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan dapat digambarkan sebagai berikut ini:

Tabel 2.4 Capaian Kinerja Kunci Hasil Tahun 2021

NO	FUNGSI PENUNJANG	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							

Perencanaan dan Keuangan	1	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan ----- x 100% Jumlah APBD	$\frac{\text{Rp. 199.914.657.783,00}}{\text{Rp. 2.224.019.879.780,36}} \times 100\%$	8.99 %	
--------------------------	---	---	---	--	--------	--



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

	2	Rasio PAD	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah PDRB non migas}} \times 100\%$	$\frac{\text{Rp. 260.851.565.760,48}}{\text{Rp. 22.410.710.000}} \times 100\%$	1163.96 %	
	3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3 (Terdefinisi)	Level 3	
	4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3	Level 3	
	5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$\frac{\text{Jumlah belanja urusan pemerintahan - transfer expenditures}}{\text{Jumlah belanja APBD}} \times 100\%$	Belanja Urusan Pemerintahan Rp. 1.464.255.420.470,96 Transfer expenditures Rp. 269.164.399.532,20 - Rp. 1.195.091.020.938,76 Total Belanja APBD Rp. 1.804.781.925.587,04 $\frac{\text{Rp. 1.195.091.020.938,76}}{\text{Rp. 1.804.781.925.587,04}} \times 100\%$	66.22 %	
	6	Opini Laporan Keuangan	Opini 10 tahun terakhir	2010 - 2019 : WTP 2020 : WDP	9 WTP 1 WDP (2020)	
Pengadaan	1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	$\frac{\text{Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n}}{\text{Jumlah kontrak keseluruhan tahun n}} \times 100\%$	$\frac{0}{1} \times 100\%$	0 %	Tidak Perlu Disi
	2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	$\frac{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif}}{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif}} \times 100\%$	$\frac{188}{359} \times 100\%$	52.37%	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

	3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan ----- x 100% Total belanja langsung	Rp. 332.267.563.301,53 x 100% Rp. 862.067.573.249,70	38.54 %	
Kepegawaian	1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas ----- x 100% Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah	1.714 x 100% 505	339.41 %	
	2	Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (di luar guru dan tenaga Kesehatan) ----- x 100% Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	223 x 100% 2.219	10.05 %	
	3	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi ----- x 100% Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	87 x 100% 223	39.01 %	
Manajemen Keuangan	1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi ----- x 100% Total belanja APBD dikurangi satu	Rp. 1.804.781.925.587,04 x 100% Rp. 2.224.019.879.780,39	81.15 %	
	2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi ----- x 100% Total PAD dalam APBD dikurangi satu	Rp. 260.851.565.760,48 x 100% Rp. 236.598.766.548,36	110.25 %	
	3	Assets management	1. Apakah ada daftar asset tetap? 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran?	1. Ada 2. Ada 3. Ada 4. Ya	1. Ada 2. Ada 3. Ada 4. Ya	
	4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SILPA ----- x 100% Total belanja anggaran tahun sebelumnya	Rp. 215.726.977.462,47 x 100% Rp. 1.987.739.942.507,36	10.85 %	



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Transparansi dan Partisipasi Publik	1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (information on resources available to frontline service delivery units)	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda ----- x 100% Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	$\frac{\text{Rp. 83.304.000,-}}{\text{Rp. 82.512.000,-}} \times 100\%$	100.96 %	
	2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda ----- x 100% Total jumlah dokumen yang telah dirinci	$\frac{12}{12} \times 100\%$	100 %	



2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja sehingga dapat diketahui capaian kerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau faktor kegagalan sehingga target tercapai atau tidak tercapai.

Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa untuk membangun akuntabilitas adalah bagian kunci untuk mendorong pengendalian dan evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Gowa tahun 2020 berdasarkan SK Bupati Gowa Nomor 281/IV/2020 tanggal 20 April 2020 :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/Penjelasan/Penghitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas	Rata rata lama sekolah (RLS)	Tahun	Jumlah tahun bersekolah individu diatas 15 tahun dibagi jumlah penduduk diatas 15 tahun	BPS, Disdik
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk berusia 7 tahun ke atas	BPS, Disdik
2	Meningkatnya layanan kesehatan yang terjangkau & berkualitas	Angka Harapan Hidup	Tahun	Rata - rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seorang sejak lahir	BPS, Dinas Kesehatan
3	Meningkatnya kesempatan kerja dan lapangan usaha	Angka Pengangguran Terbuka	%	Jumlah penganggur dibanding dengan jumlah angkatan keraja	BPS, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	Meningkatnya rasa aman dan tentram	Angka kriminal yang tertangani	Rasio Per-10.000 Penduduk	Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun dibagi jumlah penduduk dikali 10.000	Satpol PP
5	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	<p>IPG :</p> <p>1. Umur panjang dan sehat :</p> <p>1. Indikator: Angka harapan hidup perempuan, angka harapan hidup laki-laki.</p> <p>2. Indeks dimensi: Indeks Harapan Hidup perempuan, indeks harapan hidup laki - laki.</p> <p>3. Indeks sebaran merata : Indeks atau harapan hidup dengan sebaran merata.</p> <p>2. Pengetahuan:</p> <p>1. Indikator: AMH laki - laki, MYS laki-laki.</p> <p>2. Indeks dimensi: Indeks pendidikan perempuan, indeks pendidikan laki-</p>	BPS



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

				laki. 3. Indeks sebaran merata: Indeks pendidikan dengan sebaran merata. 3. Kehidupan yang layak : 1. Indikator : perkiraan pendapatan perempuan, perkiraan pendapatan laki-laki. 2. Indeks dimensi: Indeks pendapatan perempuan, indeks pendapatan laki-laki. 3. Indeks sebaran merata : indeks pendapatan dengan sebaran merata.	
6	Meningkatnya pengendalian penduduk dan KB	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	Ratio Pertumbuhan Penduduk	BPS
7	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	Tingkat Kemiskinan	%	Persentase Penduduk Miskin	BPS
8	Meningkatnya Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai Indeks	IPP terdiri dari lima domain: pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. IPP secara keseluruhan berada dalam rentang nilai 0-100, dengan interpretasi positif: semakin suatu capaian menuju ke indeks 100, capaian semakin baik	Dinas Pemuda dan Olahraga
9	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai Indeks	Besaran, kadar dan deskripsi parameter, katagori kimia anorganik, kimia organik, biologi fisik dan radioaktif yang digunakan sebagai persyaratan bagi perlindungan dan pengembangan lingkungan menurut peruntukannya, dan telah ditetapkan melalui peraturan perundang - undangan.	Dinas Lingkungan Hidup
10	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	-Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (Rp)	Rupiah	Nilai PDRB menurut lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berdasarkan harga berlaku (Rp)	BPS
11	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor industri dan perdagangan	-Nilai PDRB sektor industri pengolahan -Nilai PDRB sektor perdagangan besar dan	Rupiah	Nilai PDRB menurut lapangan usaha sektor industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda	BPS



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

		eceran, reparasi mobil dan sepeda motor		motor berdasarkan harga berlaku (Rp)	
12	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata	Nilai PDRB sub sektor Pariwisata menurut harga berlaku	Rupiah	Nilai PDRB sub sektor pariwisata menurut lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berdasarkan harga berlaku (Rp)	BPS
13	Meningkatnya kapasitas infrastruktur daerah	-Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (km) -Rasio jaringan irigasi. -Persentase rumah tangga bersanitasi	Rasio	$\frac{\text{Panjang jalan}}{\text{Jumlah penduduk}}$ Panjang saluran irigasi ----- Luas lahan budidaya pertanian. $\frac{\text{Jumlah rumah tangga bersanitasi}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100$	Dinas PUPR dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
14	Meningkatnya pengendalian penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	%	Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai RTRW. Rasio ketaatan dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Realisasi RTW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100$	Dinas PUPR
15	Meningkatnya kualitas perumahan	Rasio rumah layak huni	Rasio	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
16	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	-Indeks Reformasi Birokrasi -Nilai SAKIP -Kategori LPPD -Opini BPK	-Nilai Indeks -Nilai dan Kategori -Kategori -Opini	Ukuran terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Implementasi SAKIP, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memetakan kemajuan yang sudah dicapai instansi pemerintah	Kemen PAN RB, Kemendagri dan BPK
17	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Nilai Indeks Pelayanan publik (Skala 0-5)	Nilai Indeks	Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik sesuai Permenpan RB no.17 tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Kemen PAN RB



A. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja tas perencanaan kinerja sehingga dapat diketahui capaian kerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau faktor kegagalan sehingga target tercapai atau tidak tercapai.

Sebagai bagian dari komitmen Pemda Kabupaten Gowa untuk membangun akuntabilitas adalah bagian kunci untuk mendorong pengendalian dan evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi dengan rencana/target yang ditetapkan dikelompokkan dalam nilai predikat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1 : Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 ≤	Sangat Tinggi
2.	76 ≤ 90	Tinggi
3.	66 ≤ 75	Sedang
4.	51 ≤ 65	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Pedoman Pengukuran kinerja tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$a. \text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

b Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2X \text{ Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2020 melakukan perbaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan SK Bupati Gowa nomor 281/IV/2020 tanggal 20 April 2020 yang disesuaikan dengan kondisi pemerintahan Kabupaten Gowa dan kondisi sasaran strategis yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMD) Kab.Gowa tahun 2016 - 2021 yang masih ada berorientasi output.

Adapun hasil pengukuran atas indikator-indikator kinerja dari setiap sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Gowa, diuraikan sebagai berikut :



Tabel 2.2 : Pengukuran Kinerja 2021

NO	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Layanan Pendidikan yang Terjangkau dan Berkualitas	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	8.14*	8.19	100,61
		Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	14.06*	13.64	97
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)	70.04*	70.43	100,55
3	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Lapangan Berusaha	Angka Pengangguran Terbuka (%)	3.22*	6.44	0
4	Meningkatnya rasa aman dan tentram	Angka kriminal yang tertangani	17	12	70.60
5	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	91.14*	87.17	95.64
6	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan KB	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1.96*	1.65	115.81
7	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Berkeadilan	Tingkat Kemiskinan (%)	7.10*	7.38*	96.05
8	Meningkatnya Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	45 - 50	41,5	83
9	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan	67.73	62.99	93
10	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	Nilai PDRB sektor pertanian	5.752.848.140**	6.764.231.14	119
11	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor industri dan perdagangan	Nilai PDRB sektor perdagangan(Rp)	1.600.000.000.000		
		Nilai PDRB sektor industri (Rp)	850.000.000.000		
12	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata	Nilai PDBR sektor pariwisata	381.079.000.000**		
13	Meningkatnya kapasitas infrastruktur	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (%)	0.31	0.32	103
		Rasio jaringan irigasi(%)	90.16	82.3	91
		Persentase rumah tangga bersanitasi(%)	80.20	51.65	64
14	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase ketaatan RTRW(%)	80.91	76.50	94.5
15	Meningkatnya kualitas perumahan	Rasio rumah layak huni.(Rasio)	73.95	72.73	97.67
16	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi(Katagori)	60.00 (Baik)***	52.20	87
		Indeks SAKIP(Katagori)	70-80 (BB)***	63.51	105.85
		Katagori LPPD(Katagori)	Sangat Tinggi [3.0000 - 3,5000]***		
		Opini BPK(Katagori)	WTP***	WDP	66.66
17	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Indeks pelayanan publik (Nilai)	4.01 (Sangat Baik)***	4.02	100.24
JUMLAH					1.812.69
Rata - rata Capaian					90.63

Catatan :* Target RPJMD 2020 realisasi dirilis BPS tahun 2021.

** Target IKU 2020 yang realisasinya dirilis BPS tahun 2021.

*** Target IKU realisasinya dikeluarkan oleh Lembaga eksternal diluar BPS.



B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pelaksanaan program kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilihat indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama (IKU Kab.Gowa dapat dijelaskan melalui uraian sasaran dibawah ini:

Sasaran 1: Meningkatnya layanan Pendidikan yang terjangkau dan berkualitas

a. Perbandingan antara target dan realisasi sasaran Meningkatnya Layanan Pendidikan yang Terjangkau dan Berkualitas :

Tabel 2.3 : Capaian indikator kinerja sasaran : Meningkatnya Layanan Pendidikan yang Terjangkau dan Berkualitas:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020 (%)	Pengukuran Tahun 2021			Kinerja (Naik/ Turun)
				Target	Realisasi	Capaian	
1.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun)	Tahun	100.12	8.14	8.19	100.61	Naik
2.	Harapan lama sekolah(HLS) (Tahun)	Tahun	97.68	14.06	13.64	97	Turun
<i>Rata - rata</i>						98.80	

Sumber data : Sumber data BPS Kab.Gowa 2021 dan LKj Diknas Tahun 2021 Target RLS dan HLS adalah target 2020 yang realisasinya dikeluarkan oleh BPS tahun 2021.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya :

Tabel 2.4 : Perkembangan Capaian indikator kinerja sasaran

No	Indikator Kinerja	Kondisi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target akhir RPJMD 2021
1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun)	7.24	7	7,52	7.74	7.75	7.97	8.19	8.32
2	Harapan lama sekolah (HLS) (Tahun)	12.74	13	13.03	13.04	13.29	13.48	13.64	14.32

Tabel 2.5 : Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA TARGET JANGKA MENENGAH	RATA-RATA REALISASI SAMPAI DENGAN TAHUN INI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	69,04	98,03	141,99
Angka Partisipasi Murni (APM)				
Angka Partisipasi Murni (APM) SD- MI-Paket A	Persen	99,53	104,88	94,90
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP-MTs-Paket B	Persen	97,13	92,65	95,,39
Angka Partisipasi Kasar (APK)				



Angka Partisipasi Kasar (APK) SD-MI-Paket A	Persen	100	104,89	104,89
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP-MTs - Paket B	Persen	96,85	99,20	97,63
Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah	Rasio	1 : 168	1 : 168	1 : 168
Rasio Guru SD-MI terhadap Murid SD-MI	Rasio	1 : 28	1 : 28	1 : 28
Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah	Rasio	1 : 168	1 : 1.056	1 : 1.056
Rasio Guru SMP-MTs terhadap Murid SMP- MTs/Murid SMP-MTs	Rasio	1 : 28	1: 32	1: 32
Kondisi Sekolah				
Sekolah Pendidikan SD Kondisi Bangunan Baik	Sekolah	514	192	37,56
Sekolah Pendidikan SMP Kondisi Bangunan Baik	Sekolah	172	99	37,35
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)				
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,19	8,19	8,19
Angka Putus Sekolah				
Angka Putus Sekolah (DO) SD-MI	Persen	0	0	0,00
Angka Putus Sekolah (DO) SMP-MTs	Persen	0	0	0,00
% guru SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik $\geq 35\%$	Persen	100	80	80
% SMP yang memiliki guru berkualifikasi S1/D4 $\geq 70\%$	Persen	100	85	85
Angka Lulusan (AL) SMP-MTs	Persen	100	100	100
Angka Melanjutkan (AM) dari SD-MI ke SMP-MTs	Persen	100	100	100
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Bebas IT dalam mendukung proses belajar mengajar	Sekolah	522	250	47,89
Angka Melek Huruf (AMH)	Persen	89	96,63	108,57

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2021 terhadap target kinerja jangka menengah, maka terdapat 14 indikator yang telah mencapai target jangka menengah dan 6 indikator yang belum mencapai target jangka menengah. Namun indikator-indikator yang belum mencapai target tersebut dioptimalkan pada tahun 2022.

Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional.

Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 adalah terdiri dari 2 jenis pelayanan dasar dan jumlah indikator sebanyak 27 indikator.

**Tabel 2.6** : Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Standar Nasional :

NO	INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	TARGET	REALISASI
I	PENDIDIKAN DASAR OLEH KABUPATEN/GOWA		
1	Tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs	100	90
2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis	100	80
3	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik	100	80
4	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia 1 (satu) ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru	100	85
5	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satu pendidikan dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan	100	85
6	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran	100	75
7	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	100	100
8	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau DIV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%	100	85
9	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S1 atau DIV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100	100
10	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S1 atau DIV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100	100
11	Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S1 atau DIV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100	100
12	Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S1 atau DIV dan telah memiliki sertifikat	100	100



13	Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	100	90
14	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	100	100
II	PENDIDIKAN DASAR OLEH SATUAN PENDIDIKAN		
15	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setia peserta didik	100	80
16	Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	100	90
17	Setiap SD/MI menyediakan satu set alat peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (Globe), contoh peralatan optic, kit IPA untuk eksperimen dasar dan poster/carta IPA	100	80
18	Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi	100	95
19	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan	100	95
20	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses satuan pendidikan, proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : a) Kelas I-II : 18 per minggu; b) Kelas III : 24 jam per minggu c) Kelas IV-VI : 27 jam per minggu d) Kelas VII-IX : 27 jam per minggu	100	90
21	Setiap satuan pendidikan menerapkan Kurikulum 2013 sesuai ketentuan yang berlaku	100	95
22	Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	100	100
23	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	100	100
24	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	100	90
25	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik	100	90



26	Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan hasil laporan hasil Ulangan akhir semester(UAS)dan ulangan kenaikan kelas (UKK)serta ujian akhir (US/UN0 Kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau kantor Agama di Kabupsten/ kota Pada setiap akhir semester	100	90
27	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) IP 27.1 IP 27.2 IP 27.3	85	85

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa telah menetapkan satu Sasaran Strategis RPJMD Tahun 2016-2021 yang menjadi acuan bagi pembangunan dan pelayanan dibidang pendidikan.

Pada Sasaran meningkatnya layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas rata-rata sasaran ini sebesar **98.80%**. Pencapaian Sasaran ini berada pada kategori **sangat tinggi**.

Terdapat beberapa indikator yang mendukung capaian sasaran dan prestasi kerjanya sebagaimana uraian berikut :

1. Meningkatnya Layanan PAUD yang terjangkau dan berkualitas

Dalam upaya peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan maka perlu kerjasama dengan beberapa bidang. Terdapat beberapa indikator yang mendukung capaian sasaran dan prestasi kerjanya sebagaimana uraian berikut :

APK Pendidikan Anak Usia Dini di targetkan 70 % realisasi 92,69 % pencapaian target sebesar 22,69 % ini dapat dicapai disebabkan beberapa faktor keberhasilan dari

a. Capaian Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Capaian layanan pendidikan Anak Usia Dini dicapai sebesar 92,69 % dimana peserta didik yang ditampung sebanyak 25.951 orang sedangkan pada tahun 2021 jumlah penduduk usia 5-6 tahun sebanyak 27.999 orang.

b. Sanggar Pendidikan Anak Shaleh (SPAS).

Ketersediaan sarana dan prasarana PAUD SPAS sebanyak 168 PAUD SPAD dan tahun 2021 semua PAUD SPAS sudah memiliki alat Permainan Efektif baik Indoor maupun outdoor.

2. Meningkatnya Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan Dasar yang terjangkau dan berkualitas

Dalam upaya peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan maka perlu kerjasama dengan beberapa bidang. Terdapat beberapa indikator yang mendukung capaian sasaran dan prestasi kerjanya sebagaimana uraian berikut :



a. Angka Partisipasi Murni (APM)

Tingkat SD

Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) di tingkat pendidikan sekolah dasar mengalami Kenaikan dari tahun 2020 tingkat APM 104,88 persen menjadi 104,93 persen pada tahun 2021.

Tingkat SMP

Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) di tingkat pendidikan sekolah menengah pertama mengalami kenaikan dari tahun 2020 tingkat APM 92,65 persen menjadi 92,99 persen pada tahun 2021 dikarenakan banyak yang memilih sekolah di luar kabupaten gowa.

b. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Tingkat SD

Jumlah Penduduk Kabupaten Gowa yang berusia 7-12 tahun berjumlah 80.450 orang dan jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang tertampung pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A sebanyak 87.333 orang, kinerja yang dicapai sebesar 103,45% dan telah melampaui standar nasional sebesar 97,69%.

Tingkat SMP

Jumlah Penduduk Kabupaten Gowa yang berusia 13-15 tahun berjumlah 42.897 orang dan jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang tertampung pada jenjang Pendidikan SMP/MTs/Paket B sebanyak 43.164 orang, Realisasi capaian kinerja tahun 2021 sebesar 99,38% telah melapau standar nasional sebesar 95,92%.

c. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah Jumlah Penduduk Kabupaten Gowa yang berusia 10-14 tahun berjumlah 73.201 orang sedangkan jumlah siswa yang ditampung pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A dan SMP sederajat sebanyak 87.33 orang.

d. Fasilitas Pendidikan

Tingkat Pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar Jumlah bangunan yang baik sebanyak 509 sekolah yang terdiri 419 sekolah dasar, SDLB 6 sekolah dan 84 sekolah Madrasah Ibtidaya. Tingkat Pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama 189 sekolah yang terdiri 114 SMP Negeri dan Swasta dan 70 sekolah Madrasah tsanawiah.

e. Angka Putus Sekolah

Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh petugas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa ditemukan tidak adanya siswa yang putus sekolah sesuai dengan visi misi Kabupaten Gowa serta program kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa.

f. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2020 sebesar 13,64 Artinya seorang anak usia 7 tahun ke atas diharapkan dapat mengenyam pendidikan formal selama 13,64 tahun, atau minimal hingga semester 2 pada



pendidikan tinggi. Angka HLS terus meningkatnya, dimana tahun 2019 hanya sebesar 13,48 tahun.

Indikator pendidikan lainnya, rata-rata lama sekolah memberikan informasi tentang sejauh mana tingkat pendidikan rata-rata yang dicapai oleh penduduk. Rata-rata lama sekolah penduduk Kab. Gowa pada tahun 2020 sebesar 8,19 tahun, sedikit meningkat dibandingkan tahun 2019 yang hanya 7,97 tahun. Dapat dikatakan bahwa penduduk Kabupaten Gowa rata-rata hanya menyelesaikan pendidikan sampai kelas 7 saja atau SMP kelas 1. Program Nasional Wajib Belajar 12 Tahun yang dicanangkan pemerintah nampaknya belum memperlihatkan hasil yang nyata. Hal ini mungkin berkaitan erat dengan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dan kondisi sosial ekonomi yang juga rendah, sehingga mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai sekolah dasar saja.

g. Angka Melanjutkan Sekolah :

Siswa yang lulus pada jenjang SD/MI tahun ajaran 2020/2021 sebanyak 13.675 orang dan siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs sebanyak 8.758 orang capaian kinerja 64,04%.

h. Angka Kelulusan :

Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran 2020/2021 sebanyak 13.675 orang dan jumlah lulusan pada jenjang SD/MI sebanyak 13.675 orang, itu berarti sudah 100% angka kelulusan SD/MI sederajat.

Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP sederajat pada tahun ajaran 2020/2021 sebanyak 9.604 orang dan jumlah lulusan pada jenjang SMP sederajat ajaran 2020/2021 sebanyak 9.604 orang, itu berarti sudah 100% angka kelulusan SMP sederajat.

Meningkatnya Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan Dasar yang terjangkau dan berkualitas :

Jumlah Guru Pendidik yang telah mengikuti Sertifikasi

Pelaksanaan sertifikasi guru pada dinas Pendidikan Kabupaten Gowa sama melakukan proses seleksi guru yang bersyarat untuk mengikuti tes sama dengan proses yang dilakukan oleh daerah lain diseluruh Indonesia karena program ini berlaku secara Nasional dan jumlah guru yang telah memiliki sertifikasi di Kabupaten Gowa sebanyak 2,701 orang.

Meningkatnya Layanan Pendidikan Non Formal dalam bentuk kesetaraan dan keaksaraan fungsional bagi warga yang tidak terjangkau pendidikan formal dan masih buta aksara

Angka Melek Huruf

Dalam rangka menuntaskan anggota masyarakat dari buta aksara, maka dari jumlah Penduduk Tahun 2021 yang berusia >15 sampai usia 59 tahun sebanyak 590.342 orang dan jumlah orang telah dimelek hurufkan (tidak buta aksara) sampai tahun 2021 sebanyak 570.941 orang .Dari data tersebut maka Angka Melek Huruf tahun 2021 diformulasikan dalam bentuk persentase dan terealisasi sebesar 96,713%.



Tabel 2.7: Gambaran Angka Partisipasi sekolah tahun 2020 dan 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD-MI-Paket A dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP-MTs-Paket B	%	100	100	100
2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD-MI-Paket A dan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP-MTs-Paket B	%	100	100	100
3.	Angka Melek Huruf (AMH)	%	100	100	100
4.	Angka Partisipasi Sekolah APS	%	100	100	100

Sumber : Diknas 2021

Tabel 2.8: Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Gowa :

No	Uraian	Harapan Lama Sekolah (HLS)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	HLS Kabupaten Gowa	12.74	13	13.03	13.04	13.29	13.48
2	HLS Provinsi Sulsel	12.99	13.16	13.28	13.34	13.36	13.45
3	Peringkat di Sulsel	12	11	12	9	7	6

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa 2021

d. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya.

Tabel 2.8 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 1 :

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi/ Inefisiensi (%)
1	2	3	4	5
1	Angka Rata - Rata Sekolah	100.61	88.74	10.06
2	Harapan Lama Sekolah	97		
3	Rata - rata capaian kinerja	98.80		

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab.Gowa dan Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa 2021

e. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.

Rincian anggaran berdasarkan program pendukung sasaran sebagai berikut :

Tabel. 2.9 : Pengukuran Capaian Anggaran.

No	Program dan Sub Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
1	PENGLOLAAN PENDIDIKAN/ Pembangunan Perpustakaan Sekolah	736,988,000	734,136,100	99.61
2	PENGLOLAAN PENDIDIKAN/ Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	421,841,000	419,779,000	99.51



3	PENGELOLAAN PENDIDIKAN/ Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	15,360,000,000	13,252,942,082	86.28
4	PENGELOLAAN PENDIDIKAN /Pengadaan Perlengkapan Sekolah	6,911,200,000	6,828,496,000	98.80
5	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	173,225,000	69,000,000	39.83
6	PENGELOLAAN PENDIDIKAN /Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	128,470,875	124,835,399	97.17
7	PENGELOLAAN PENDIDIKAN /Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	239,730,000	239,730,000	100
Jumlah		23.971.427.875	21.668.918.581	88.74

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa 2021

Berdasarkan tabel tersebut diatas, menunjukkan bahwa realisasi anggaran lebih kecil daripada capaian kinerja (realisasi kinerja - realisasi anggaran) yang berarti ada efisiensi sebesar 10.06 % penggunaan anggaran berdampak terhadap target kinerja diharapkan.

f. Permasalahan dan Alternatif Solusi .

Permasalahan :

1. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah masih kurang.
2. Jumlah guru pendidik yang telah bersertifikasi belum mencapai target.
3. Masih kurangnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Bebas IT dalam mendukung proses belajar mengajar.
4. Pandemi Covid 19 yang belum berakhir sehingga pembelajaran terhadap siswa tidak maksimal.

Solusi :

1. Membangun ruang kelas baru pada sekolah sehingga daya tampung bisa dimaksimalkan.
2. Melaksanakan kegiatan sertifikasi guru di berbagai jenjang sekolah.
3. Meningkatkan pemahaman teknologi informasi berbasis IT.
4. Pemberian tugas tambahan di rumah untuk meningkatkan kualitas siswa.

Sasaran 2 : Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat

a. Perbandingan antara target dan realisasi sasaran 2

Tabel 2.10 : Capaian Indikator Kinerja sasaran Meningkatnya Layanan Kesehatan.

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capian 2020	TAHUN 2020			Kinerja (Naik/ Turun)
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Angka Harapan Hidup(AHH)	Tahun	100,51	70.04	70.43	100,55	Naik

Sumber : Target diatas adalah target 2020 yang realisasinya dirilis BPS tahun 2021.



b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Tabel 2.11 : Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target akhir dari RPJMD
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	69.88	69.90	69.92	69.95	70.11	70.37	70.43	70.07

Sumber : Publikasi BPS tahun 2021

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan:

Capaian terhadap Angka harapan hidup sebesar 100,55% berada pada kinerja yang **sangat tinggi**. Hal tersebut tidak terlepas dari dukungan sub indikator yang secara detail disajikan sebagai berikut :

Tabel :2.12 : Capaian Kinerja Program Tahun 2021 :

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Gizi Buruk yang mendapatkan Penanganan	%	100	100%	100%
2		Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	%	100	100	100%
3		Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standar n kualitas Lingkungan	%	100	100%	100%
3		Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standar & kualitasLingkungan	%	100	100%	100%
4		Prevalensi stunting (status gizi sangat pendek & pendek}	%	21.1	5.1	414
5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	200	365	182,5
6	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Ketersediaan Obat Esensial	%	70	75	107,1
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Puskesmas yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat	%	36	38.5	106,9

Dari tabel di atas, program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Angka Harapan Hidup di Kab.Gowa. Tahun 2021 target Angka Harapan Hidup sudah melebihi dari target yang ditetapkan dalam RPJMD walaupun ada beberapa kegiatan belum mencapai target karena adanya pandemic covid 19 yang belum berakhir sampai akhir tahun 2021.

Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat tidak terlepas dari meningkatnya Pola Hidup Sehat bagi Individu, Keluarga dan Masyarakat disebabkan pelaksanaan Pemberdayaan Dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat. Hal ini dapat meningkat karena perilaku hidup bersih dan sehat serta upaya meningkatkan daya tanggap dan perlindungan masyarakat terhadap resiko sosial dan finansial. Masyarakat semakin hari semakin sadar bila mencegah penyakit lebih mudah dibandingkan mengobati.

GRAFIK 2.1: CAPAIAN ANGKA HARAPAN HIDUP TAHUN 2016-2021



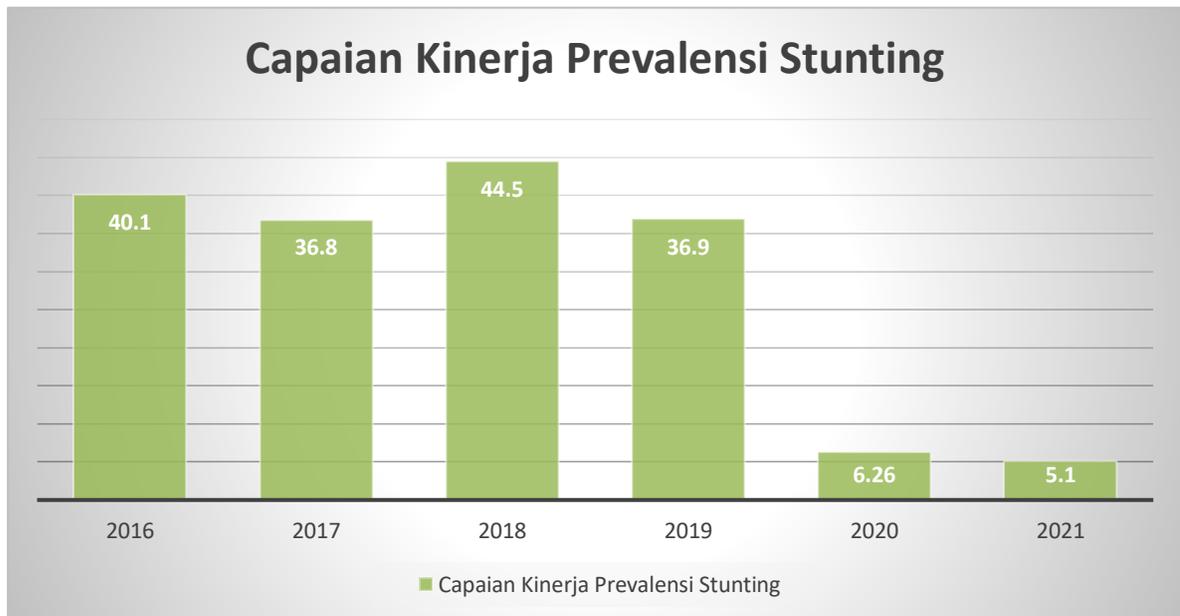
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Angka Harapan Hidup Di Kabupaten Gowa semakin meningkat dari tahun ke tahun yaitu mulai dari Tahun 2016 sampai dengan 2021, UHH telah meningkat sebesar 0.59 tahun. Pada 2016, UHH adalah 69.92 tahun dan pada tahun 2021 mencapai 70.45 tahun. Dengan demikian, bayi yang lahir pada 2021 memiliki harapan untuk hidup hingga 70.45 tahun, lebih lama 0.02 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Salah satu indikator pendukung meningkatnya Angka Harapan Hidup {AHH} adalah Prevalensi Stunting.

Indikator ini merupakan indikator upaya menekan angka kejadian, sehingga semakin rendah kejadian (angka yang dicapai) maka penilaian kinerjanya semakin baik.

Adapun Realisasi Prevalensi Stunting Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 dilihat pada gambar berikut :

GRAFIK 2.2 : CAPAIAN KINERJA PREVALENSI STUNTING TAHUN 2016-2021

Sumber: Bidang Binkesmas Dinas Kesehatan, 2021

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa indikator sasaran Capaian Kinerja Prevalensi Stunting pada Tahun 2016-2021 cenderung fluktuatif. Di Kabupaten Gowa prevalensi stunting pada Tahun 2016 sebesar 40,1%, pada Tahun 2017 terjadi penurunan yaitu sebesar 36,8% kemudian pada Tahun 2018 terjadi peningkatan yaitu sebesar 44,5%, di Tahun 2019 kembali terjadi penurunan yaitu sebesar 36,9% (berdasarkan data survey) di Tahun 2020 juga mengalami penurunan sebesar 6,26% (berdasarkan data surveilans dari e-PPGBM), sedangkan pada Tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 5,1% (berdasarkan data surveilans dari e-PPGBM).

Jika dilihat dari capaian pada beberapa tahun sebelumnya, indikator sasaran Prevalensi Stunting tidak mengalami peningkatan bahkan selalu mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini. Antara lain:

- Membuat program peningkatan kualitas kesehatan keluarga dan Gizi yang terintegrasi dengan program dan sektor terkait, Peningkatan kualitas ANC (ANC terpadu berkualitas) kelas ibu, dan Memperkuat jejaring rujukan dengan group WhatsApp
- Melakukan penjangkaran kasus anemia & KEK (Kekurangan Energi Kronis) sejak remaja, calon pengantin dan WUS (wanita usia subur) dan Memberikan tablet tambah darah bagi remaja, calon pengantin dan WUS.



- c. Implementasi ANC berkualitas atau ANC terpadu sehingga dapat mendeteksi adanya faktor resiko dan komplikasi kehamilan.
- d. Berjalannya program suami siaga, pembinaan pada bidan praktek swasta serta menyiapkan buku KIA untuk semua ibu hamil sebagai penghubung bagi semua tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada ibu hamil, kader pendamping, serta keluarga/suami
- e. Melaksanakan pendampingan dan pembinaan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah dan swasta

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 2.13 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi/Inefisiensi
1	Angka Harapan Hidup	100.55	68.89	31.66

e. Analisis program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.

Tahun 2021 pencapaian target pada kinerja pada sasaran ini didukung oleh 6 kegiatan dengan jumlah dana penunjang dengan rincian anggaran berdasarkan program pendukung sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.14 : Pengukuran Kinerja Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2021

Program / Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran 2020		
	Target	Realisasi	%
PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Pengadaan alat kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5,353,963,600	4,077,107,600	76.15
PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT /Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4,033,335,000	2,436,440,900	60.41
PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/ Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	526,326,000	310,071,364	58.91
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN/ Peningkatan Upaya promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	302,336,123	211,977,200	70.11
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN /Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31,460,000	24,422,000	77.63
Jumlah	10.247.420.723	7.060.019.064	68.89



Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Dinkes Tahun 2021

Berdasarkan tabel tersebut diatas, menunjukkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100.51% lebih besar dibandingkan anggaran sebesar 74.95% berarti penggunaan anggaran berdampak signifikan terhadap target kinerja yang diharapkan.

f. Permasalahan dan alternatif solusi.

Permasalahan :

- a. Pandemi covid-19 yang telah berlangsung kurang lebih dua tahun yang secara langsung berdampak pada perubahan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan Kesehatan.
- b. Sosial budaya masyarakat kurang mendukung terkait pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat mengenai kehamilan, persalinan yang aman pertumbuhan balita.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam rangka peningkatan gizi.
- d. Kurangnya informasi tentang pengasuhan anak dan Kesehatan calon ibu.

Solusi :

- a. Pelayanan posyandu dilakukan dengan proses yang ketat.
- b. Meningkatnya dukungan terkait pengambilan keputusan terkait pengambilan keputusan & kepedulian masyarakat mengenai kehamilan dan persalinan yang aman dengan melakukan upaya melakukan Intervensi Gizi Spesifik yaitu :
 1. Pemberian tablet tambah darah untuk ibu hamil sebanyak minimal 90 tablet selama kehamilan,
 2. Pemberian suplementasi kalsium,
 3. Pemeriksaan kehamilan (ANC),
 4. Pencegahan HIV
 5. Pemberian suplementasi kapsul vitamin A pada balita,
 6. Pemberian makanan tambahan pemulihan untuk anak kurus,
 7. Pemantauan pertumbuhan ,
 8. Tatalaksana gizi buruk akut,
 9. Promosi dan konseling PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak),
 10. Promosi dan konseling menyusui,
 11. Suplementasi zink untuk anak diare,
 12. Imunisasi,
 13. Pemberian obat cacing,
 14. MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit) dan
 15. Pemberian tablet tambah darah sebanyak 1 tablet per minggu untuk remaja putri.
- c. Upaya Intervensi Gizi adalah :
 1. Peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi,
 2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan (akses



- elayanan KB, akses JKN, akses bantuan uang tunai untuk keluarga kurang mampu (PKH)
3. Peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak:
 4. Penyebarluasan informasi melalui berbagai media, penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi, penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua, akses PAUD dan pemantauan tumbuh kembang anak, penyediaan konseling kesehatan dan reproduksi remaja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Sasaran 3 : Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Lapangan Usaha.

- a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran 3 Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Lapangan Usaha.

Tabel 2.15 : Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Lapangan Usaha.

NO	INDIKATOR Kinerja	SATUAN	Capaian Tahun 2021				Kinerja
			Capaian 2020	Target	Realisasi	Capaian	Nail/Turun
1	Menurunnya Angka Pengangguran terbuka	%	55.48	3.22	6.44*	0	Turun

Sumber Data : * Target diatas adalah target 2020 yang realisasinya dipublikasi BPS tahun 20201

- b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya :

Tabel 2.16: Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3.

INDIKATOR SASARAN	SATUAN								
		Kondisi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Kondisi Akhir 2021
Menurunnya angka Pengangguran terbuka	%	4.96	5	3.60	4.8	4.80	4.87	6.44	3.17

- c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan

Salah satu upaya pemerintah mengurangi tingkat kemiskinan adalah membuka lapangan kerja seluas - luasnya bagi pencari kerja sehingga mengatasi pengangguran. Di Kab. Gowa jumlah pengangguran terbuka sedikit demi sedikit dapat ditekan walaupun target menurunnya angka pengangguran belum sesuai dengan realisasi yang ada. Hal ini disebabkan karena pengaruh pandemi Covid 19



yang merusak ekonomi lokal, nasional dan dunia yang berimbas pada meningkatnya angka pengangguran disebabkan oleh :

1. Banyaknya pekerja di PHK.
2. Adanya aturan pemerintah tentang PSBB dan social Distancing.
3. Pendidikan Angkatan kerja yang rendah
4. Program pelatihan vokasi yang belum maksimal.
5. Berkurangnya keahlian Angkatan kerja akibat perkembangan pesat teknologi.
6. Perkembangan IT yang sangat pesat.

Tabel 2.17: Presentase Pengangguran Terbuka Kabupaten Gowa Tahun 2013- 2021

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Pengangguran Terbuka di Gowa	2,63	2,32	4,96	4,95	3,6	6.14	4.80	4.87	6.44

Sumber: BPS Kab.Gowa

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 2.18 : Efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran Pengangguran Terbuka :

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi/Inefisiensi
1	Pengangguran Terbuka	0	98.81	Inefisiensi 98.81

e. Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Upaya pencapaian target pada kinerja pada sasaran ini didukung oleh 2 program pendukung sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.19: Pengukuran Kinerja Program Kegiatan dan Anggaran 2021

Program dan Kegiatan	Anggaran		
	Target	Realisasi	%
➤ Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja / Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada perusahaan kecil.	16.913.000	16.913.000	100
➤ Program Peningkatan Kesempatan Kerja/.Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	76.085.000	73.385.000	96.45
➤ Program Hubungan Industrial/ .Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.975.000	20.975.000	100
Jumlah	113.973.000	111.273.000	98.81



Berdasarkan tabel tersebut diatas, menunjukkan bahwa capaian kinerja 0% kecil daripada realisasi anggaran 98.81%. Terdapat gab sebesar 98.81% (relisasi kinerja - realisasi anggaran) berarti penggunaan anggaran belum berdampak signifikan terhadap target kinerja yang diharapkan.

f. Permasalahan dan alternatif penyelesaian :

Permasalahan :

1. Jumlah lapangan kerja yang tersedia yang jauh lebih kecil dari pertumbuhan angkatan kerja dan terkadang kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja yang tersedia.
2. Masih dibutuhkan suntikan dana dalam rangka peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Solusi :

1. Perluasan lapangan kerja dengan melaukan promosi daerah yang kondusif untuk berinvestasi sehingga para investor dapat membuka lapangan usaha di Kab.Gowa.
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Stakeholders dapat melakukan pencarian dana di luar APBD dan APBN sehingga produktivitas tenaga kerja dapat meningkat.

Sasaran 4 : Meningkatnya Rasa Aman dan Tenram

Pada sasaran Meningkatnya rasa aman dan tenram terjadi perubahan indikator sasaran dari Angka kriminal menjadi angka kriminal yang tertangani.

a. Perbandingan Antara target dan Realisasi Sasaran meningkatnya Rasa Aman dan Tenram.

Tabel 2.20 : Capaian Indikator Kinerja Sasaran meningkatnya rasa aman dan Tenram:

NO	INDIKATOR Kinerja	SATU AN	Tahun 2020			
			Target (%)	Realisasi(%)	Capaian(%)	
1	Angka kriminal tertangani	Rasio	17	16	94,41	Naik

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 2.21 : Capaian Indikator Kinerja Sasaran

NO	INDIKATOR Kinerja	Satuan	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Angka Kriminalitas	Kasus	902	887	1.485	1.359	1.260		812
2	Angka kriminal tertangani	Rasio						12	16

Sumber Data : LKj Satpol PP tahun 2021



c. Analisa penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan :

Berdasarkan indikator kinerja Angka kriminalitas yang tertangani dari sasaran meningkatnya rasa aman dan tenteram, capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa mencapai **94,11%**. Capaian ini merupakan akumulasi dari penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dan penegakan perda dan perkara yang terjadi di wilayah Kabupaten Gowa tahun 2021. Hal tersebut dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gowa dengan sangat giat, mulai dari mensosialisasikan kepada masyarakat terkait aturan untuk selalu dipatuhi, termasuk Perda wajib masker dan penerapan protokol kesehatan, menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, serta berperan aktif menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.

Angka Kriminal tertangani :

Formulasi mendapatkan angka kriminal tertangani adalah :

$$\frac{\text{Jumlah tindak criminal tertangani dalam satu tahun}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 10.000$$

Angka kriminal yang tertangani tahun 2021 sebesar 16 kasus. Hal ini belum mencapai target yaitu 17 kasus. Hal ini disebabkan karena jumlah personel di Satpol PP sangat sedikit . Rasio Satpol hanya 10 orang orang persepuluh ribu penduduk.

Tabel 2.22 : Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2013 -2021 di Kabupaten Gowa

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Polisi Pamong Praja	668	668	696	776	732	730	727	727	720
2.	Jumlah Penduduk	691.309	709.386	722.684	750.650	747.257	748.200	757.369	762.148	765.836
3.	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	9,67	9,41	9,63	10.33	9,79	9.75	9.59	9.53	9.40

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa, 2021

Kegiatan sosialisasi, patroli hingga penertiban sering digalakkan Satpol. PP khususnya Satpol. PP yang bertugas di lapangan. Dari masalah terbatasnya anggaran, sarana kegiatan hingga terbatasnya SDM yang dimiliki. Namun dari semua itu sudah ada upaya-upaya dari Satpol. PP yang dilakukan untuk mengatasinya antara lain memaksimalkan anggaran yang tersedia dengan banyaknya kegiatan, memberdayakan



sarana yang tersedia, melakukan sosialisasi, pengawasan dan pembinaan terhadap aparat dan masyarakat agar patuh dan tegaknya peraturan perundang-undangan daerah serta melakukan sinergitas antar instansi terkait dalam hal pengawasan dan ketenteraman lingkungan.

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 2.23 : Efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran Meningkatnya rasa aman dan tentram.

No	Program dan Kegiatan	Anggaran		%
		Target	Realisasi	
1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum/ Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.297.790.000	10.227.324.000,00	99
2	Program Peningkatan Ketenteraman & Ketertiban Umum/ Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	58.030.000,00	48.205.000,00	83,07
	RATA-RATA	6.874.880.000	6.842.440.000	99.75

Tabel 2.24 : Pengukuran Kinerja Program Kegiatan dan Anggaran

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efesiensi/ Inefesiensi
1	Angka Kriminal	70.60	91	3.41

Sumber Data diolah

e. Analisis Program dan Anggaran

Berdasarkan tabel tersebut diatas, menunjukkan bahwa capaian kinerja 94.41% lebih besar daripada realisasi anggaran 91%. Terdapat gab sebesar 3.41% (realisasi kinerja - realisasi anggaran) berarti penggunaan anggaran sudah berdampak signifikan terhadap target kinerja yang diharapkan.

f. Permasalahan dan alternatif pemecahan :

Permasalahan :

-Kurangnya personil satpol PP tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk.

Alternatif Pemecahan :

- Memaksimalkan personil yang ada dengan melakukan peningkatan kapasitas aparatur satppol PP sehingga dimasa yang akan datang personil yang sudah di berikan bimbingan teknik dapat bekerja maksimal untuk dapat menyelesaikan angka kriminal yang ada .



Sasaran 5 : Meningkatnya Kesejahteraan Gender dan Perlindungan anak.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Gender dan Perlindungan Anak.

Tabel 2.25 : Capaian Indikator Kinerja sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Gender dan Perlindungan Anak

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Target Kinerja 2020				
			Capaian 2019	Target	Realisasi	Capaian	
1	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96.24	91.14	87.17*	95.64	Turun

Sumber Data : BPS tahun 2021 & Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Gowa tahun 2021.

b.Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun Sebelumnya Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Gender dan Perlindungan Anak.

Tabel 3.26: Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Gender dan Perlindungan Anak :

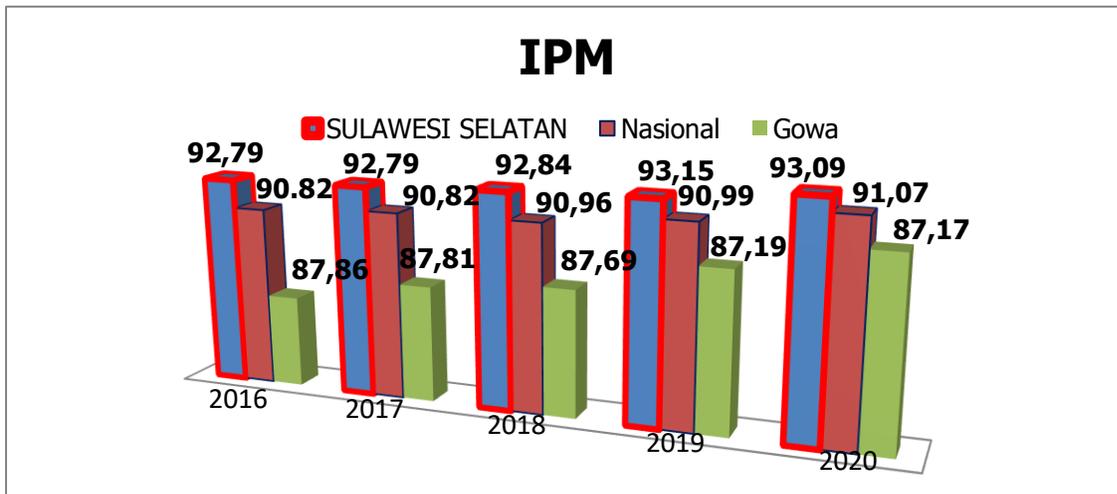
NO	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Kondisi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	87.92	88.95	87.69	87.69	87.24	87.19	87.17

Sumber Data: LKj Dinas PP dan PA Tahun 2021.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Solusi yang dilakukan :

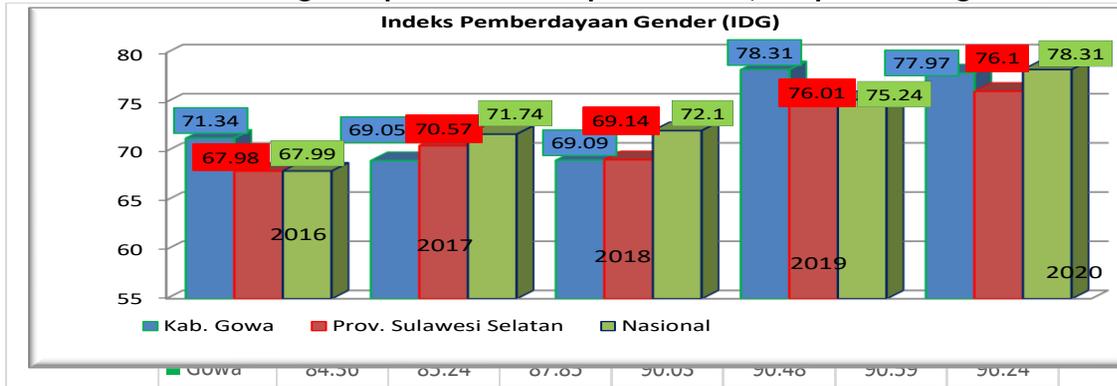
Indeks Pembangunan Gender digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkap ketimpangan pencapaian laki - laki dan perempuan. Capaian kinerja **sangat tinggi**, Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.

Grafik 2.4 : Indeks Pembangunan Gender



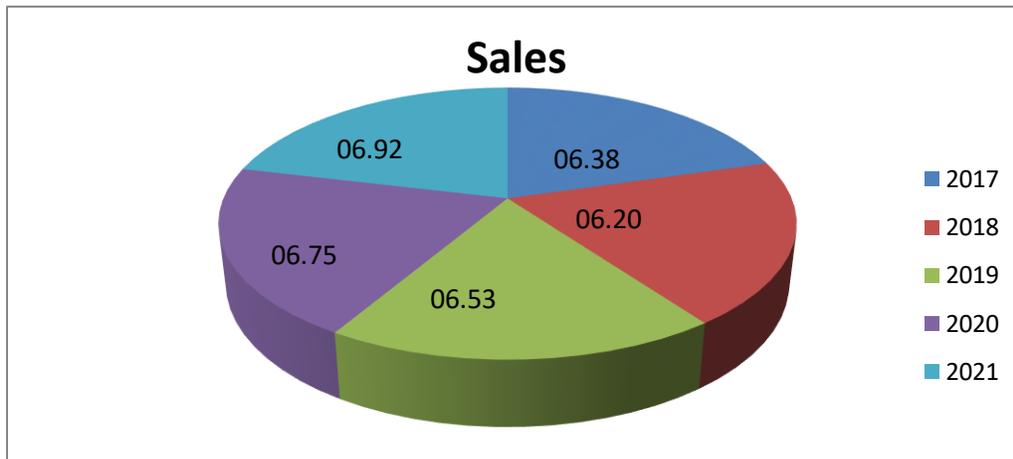
Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kab. Gowa , Tahun 2021

Grafik 2.5: Persandingan capaian IPG Kabupaten Gowa, Propinsi dengan IPG Nasional



Sub indikator yang mendukung Indeks Pemberdayaan Perempuan yaitu partisipasi Angkatan kerja Kab.Gowa dan Ratio penurunan KDRT. Partisipasi angkatan kerja perempuan adalah perbandingan jumlah perempuan yang bekerja dengan jumlah penduduk perempuan yang dinyatakan dalam persen. Sedangkan kekerasan dalam rumah tangga adalah semua perilaku, ancaman, pelecehan, dan kekerasan baik secara fisik, psikologi dan seksual antara dua orang yang terikat hubungan personal ataupun kepada anggota keluarga yang lain. Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 Tahun per 1.000 rumah tangga.

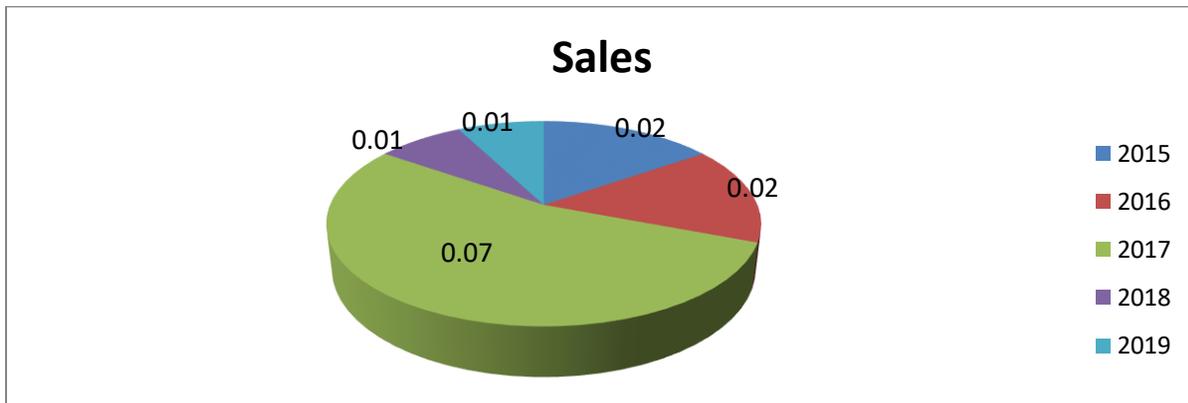
Grafik 2.6: Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Gowa,



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kab. Gowa , Tahun 2021

Pada Pemerintah Daerah Kab.Gowa jumlah Aparat Sipil Negara sebanyak 6.887 orang. Dengan komposisi laki - laki 2.486 orang atau 36,10 % dari jumlah keseluruhan ASN di Kab. Gowa dan ASN perempuan sebanyak 4.401 atau 63.90%.

Grafik 2.7 : Rasio Penurunan KDRT



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kab. Gowa , Tahun 2021

IPG Kabupaten Gowa sejak tahun 2013 hingga 2021 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 2.27 : Indeks Pembangunan Gender Tahun 2013-2021:

N O	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



1	IPG Kabupaten Gowa	85,24	87.85	87.92	88.95	87.69	87.69	87.24	87.19	87.17
---	--------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kab.Gowa tahun 2021.

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 2.28 : Efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran Kesejahteraan Gender dan perlindungan Anak.

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi/ Inefisiensi (%)
1	Indeks Pembangunan Gender	95.64	91.28	Efisien 4.36

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Gowa, 2021

e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja.

Tabel 2.29 Pengukuran Kinerja Program Kegiatan dan Anggaran Meningkatnya Kesejahteraan Gender dan Perlindungan Anak:

No	Program dan Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	13.820.000	13.820.000	100
2	Program Perlindungan Perempuan	454.070.000	295.741.421	65.13
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	15.970.000	15.970.000	100
4	Program Sistem Pengolahan Data Gender	12.060.000	12.060.000	100
Rata-rata				91.28

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Gowa, 2021.

Berdasarkan 104 eseh tersebut diatas, menunjukkan bahwa capaian kinerja 95.64 lebih besar daripada realisasi anggaran 91.28%. Terdapat efisiensi sebesar 4.36% (realisasi kinerja - realisasi anggaran) berarti capaian anggaran berdampak pada capaian kinerja.

F. Permasalahan dan Alternatif Solusi :

1. Belum Optimalnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
2. Belum Optimalnya Jumlah dan Kualitas Tempat layanan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
3. Persepsi APH terhadap Peraturan Perundang - Undangan terkait TPPO masih belum bersinergi.
4. Pokja Pengarusutamaan Gender dan Focal Point Belum Berjalan Secara Optimal.
5. Belum Tercapainya Kabupaten Layak Anak .
6. Belum Terbentuknya Pusat Layanan Informasi Sahabat Anak.



7. Meningkatnya angka perkawinan anak .

LANGKAH PEMECAHANNYA :

1. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dalam rangka Implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
2. Meningkatkan Pemahaman dan Komitmen Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa, tentang Pemenuhan Hak Anak diantaranya Pemenuhan Hak Anak dengan berfokus pada Percepatan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA) .
3. Meningkatkan Pemahaman Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, Masyarakat dan Dunia Usaha tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak termasuk TPPO.
4. Meningkatkan Kualitas Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak termasuk SDM yang Melayani Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK).

Sasaran 6: Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 2.30 : Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020	Pengukuran Tahun 2021			Kinerja (Naik/ Turun)
				Target	Realisasi	Capaian	
1.	Laju pertumbuhan penduduk	%	121.67	1.96	1.65	115.81	Turun

Sumber Data :rilis BPS tahun 2021 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab.Gowa, 2021

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya :

Tabel 2.31: Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi 2015	Realisas i 2016	Realisas i 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1.	Laju pertumbuhan penduduk	%	2.65	1.7	1.7	1.60	1.66	1.59	1.65

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah Dilakukan :

Pada Sasaran meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan keluarga berencana pencapaian sasaran sebesar 115.81 % berkinerja **sangat tinggi**.



Laju Pertumbuhan Penduduk Rumus yang digunakan apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

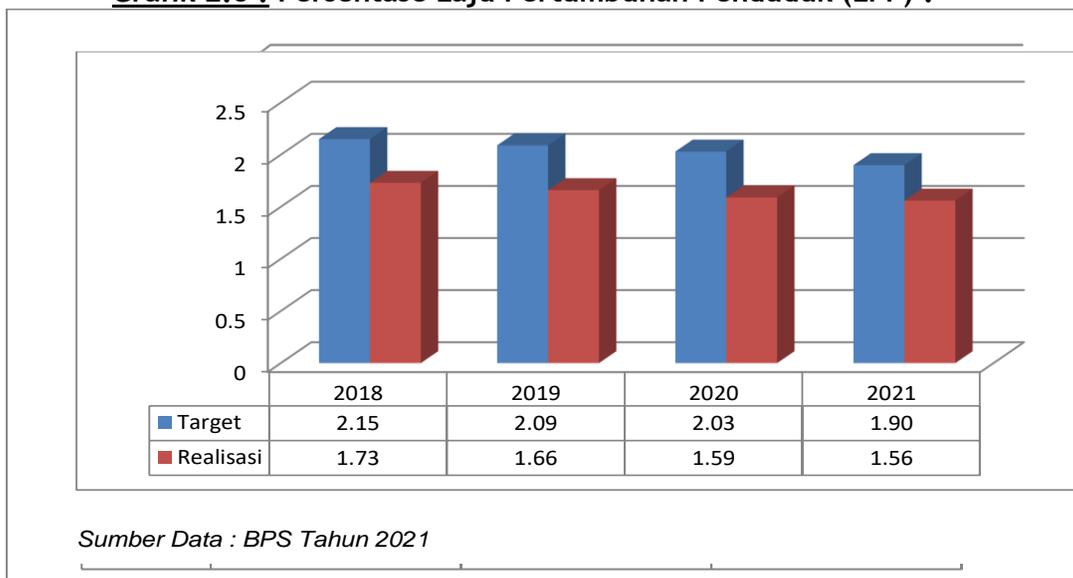
$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2X \text{ Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Nilai untuk laju pertumbuhan penduduk adalah : $2 \times 1.96 - 1.6 : 1.65 \times 100\% = 115.81$

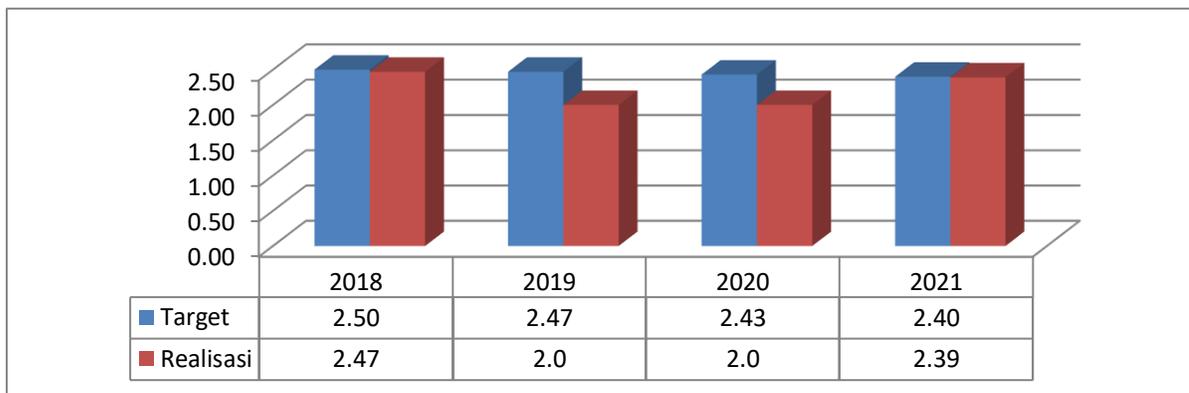
Grafik 2.8 : Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) :



Kondisi Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Tahun 2021 mengalami peningkatan dimana tahun 2021 Kabupaten Gowa dapat menekan Laju Pertumbuhan Penduduk sampai dengan 1,56% dimana target untuk tahun 2021 adalah sebesar 1.90. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gowa berhasil memperlambat laju pertumbuhan penduduknya dimana di tahun 2018 masih diangka 1.73% yang artinya Kabupaten Gowa telah berhasil melakukan upaya pengendalian penduduk.. Hal tersebut di dukung oleh sub indikator :

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)/WUS (15-49 tahun)

Grafik 3.9

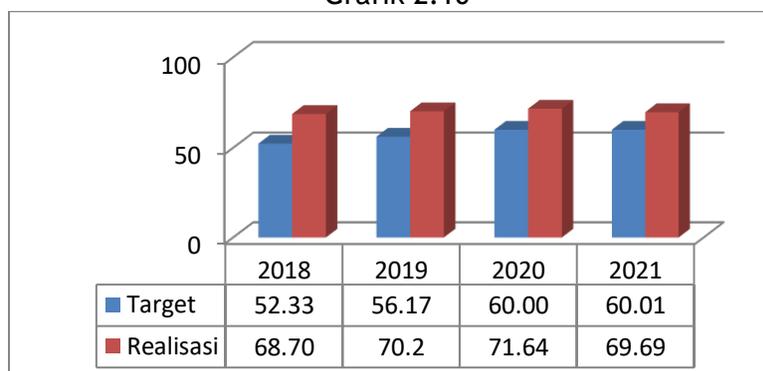


Sumber Data : BPS Tahun 2021

Kondisi Angka Kelahiran Total (TFR) Kabupaten Gowa Tahun 2021 menurun diangka 2.39, dimana target untuk tahun 2021 adalah sebesar 2,40, yang artinya pencapaian TFR tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu bernilai Sangat Baik. TFR adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya, dengan angka TFR 2,39 berarti setiap perempuan di Kabupaten Gowa rata-rata berpotensi memiliki anak antara 2 s/d 3 orang anak selama masa reproduksinya. Dengan mengetahuinya TFR untuk suatu daerah akan membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

2. Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif (mCPR)

Grafik 2.10



Sumber Data : Statistik Rutin DPPKB Tahun 2021

Kondisi mCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate) Kabupaten Gowa Tahun 2021 meningkat diangka 69,69%, dimana target untuk tahun 2021 adalah sebesar 60,01, yang artinya pencapaian mCPR tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu bernilai Sangat Baik.

mCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate) adalah persentase Pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi modern. Untuk mengetahui presentase mCPR adalah dengan melihat cakupan PUS yg menjadi peserta KB aktif di tahun 2021 dibandingkan dengan jumlah keseluruhan PUS didapatkan sebesar 69.69% yang berarti lebih tinggi daripada target yang sebesar 60,01%.

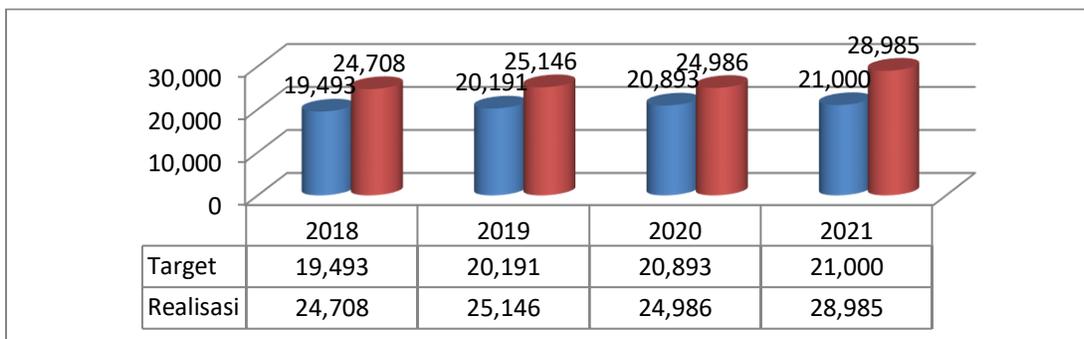
mCPR berguna untuk mengukur perbaikan kesehatan ibu melalui pengaturan kelahiran, hal ini menunjukkan bahwa Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada di Kabupaten Gowa telah memiliki kesadaran yang baik untuk mengatur jumlah anak dalam keluarga dan atau mengatur jarak kelahiran antar anak dengan menggunakan alat kontrasepsi. Ini juga menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pengendalian Penduduk



Kabupaten Gowa yang bertanggungjawab terhadap upaya pengendalian jumlah penduduk melalui para Penyuluh KB yang ada di lapangan telah berhasil memberikan pemahaman terhadap para PUS untuk dapat mengatur kesehatan keluarganya yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya. mCPR juga dapat digunakan untuk mengukur akses terhadap pelayanan reproduksi yang esensial, sehingga hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Gowa tidak memiliki kendala terhadap akses pelayanan kesehatan reproduksi untuk semua jenis alat kontrasepsi modern baik Metode Kontrasepsi Jangka Pendek seperti Pil, Suntik, dan Kondom maupun untuk alat kontrasepsi Metode Kontrasepsi jangka Panjang seperti IUD, Implan, Medis Operasi Pria (MOP = Vasektomi) dan Medis Operasi Wanita (MOW = Tubektomi) Semua jenis pelayanan kontrasepsi tersebut dapat diperoleh dengan cepat dan mudah oleh masyarakat Kabupaten Gowa di 31 Fasilitas Pelayanan Kesehatan baik negeri maupun swasta yang ada di Kabupaten Gowa.. Secara rutin setiap bulannya mendistribusikan seluruh jenis alat kontrasepsi modern kepada 31 Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ada di Kabupaten Gowa.

3. Cakupan Angka Kelahiran Tercegah

Grafik 3.11

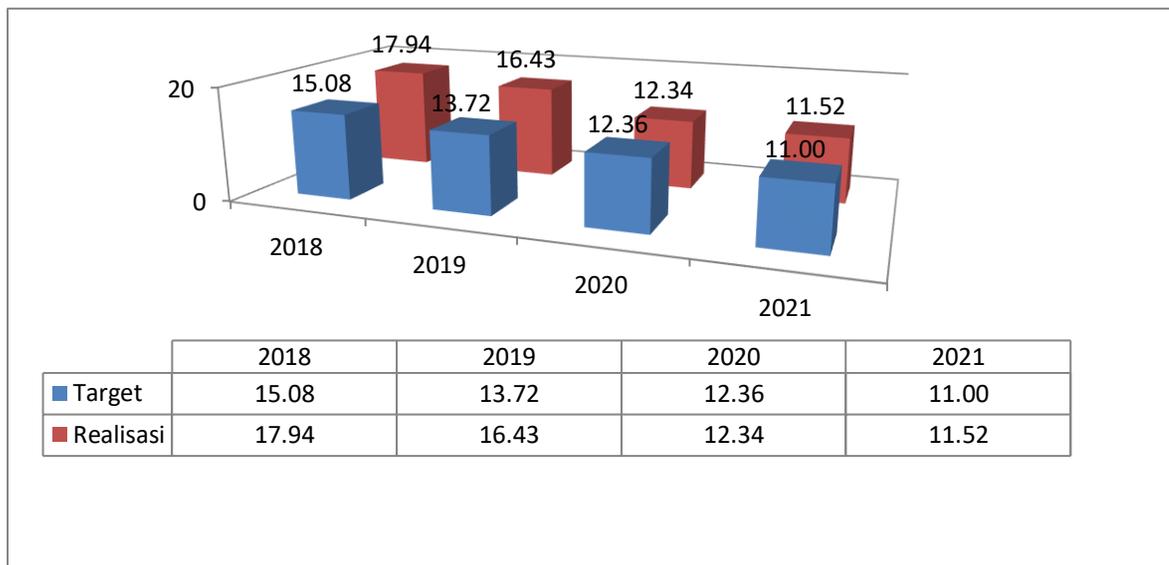


Sumber Data : Statistik Rutin DPPKB Tahun 2021

Kondisi Cakupan Angka Kelahiran Tercegah Kabupaten Gowa Tahun 2021 sebanyak 28,985 jiwa, lebih tinggi sebesar 73.82% dibandingkan target 21,000 jiwa. Angka kelahiran tercegah menunjukkan jumlah jiwa yang diperkirakan berhasil dicegah kelahirannya karena adanya penggunaan alat kontrasepsi pada pasangan usia subur selama satu tahun. Untuk angka 28.985 jiwa yang berhasil dicegah menunjukkan angka yang hampir sama dengan keseluruhan jumlah penduduk kecamatan Bajeng Barat di tahun 2021 sebanyak ±27.000 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas PP dan KB Kabupaten Gowa berhasil mencegah kelahiran sebanyak penduduk satu kecamatan.

4. Tabel :Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)

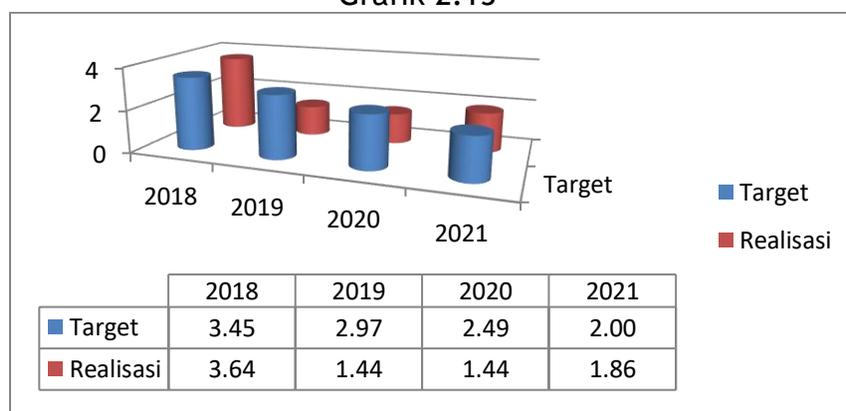
Grafik 2.12



Realisasi Tahun 2021 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need) di Kabupaten Gowa adalah 11.52% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 12.34%. Unmeet Need adalah Jumlah PUS yang tidak ber KB yang merupakan akumulasi dari. Cakupan Pasangan Usia Subur yang Ingin Anak diTunda (IAT) dan Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL). Jumlah IAT ditambah TIAL sebanyak 14.073 sedangkan jumlah PUS yang usianya 15-49 Tahun sebanyak 122.160 dengan prosentase yaitu 11.52%.

5. Persentase Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 Tahun

Grafik 2.13

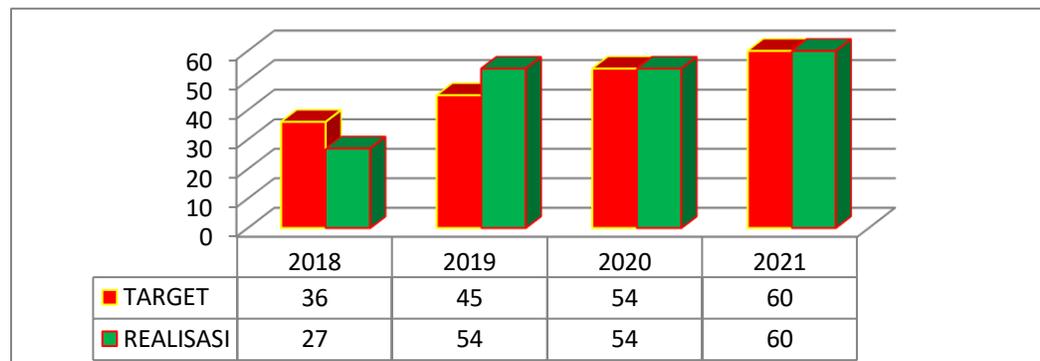


Sumber Data : Statistik Rutin DPPKB Tahun 2021

Tahun 2021 Pasangan Usia Subur yang usia isterinya di bawah 20 tahun di Kabupaten Gowa adalah sebanyak 1.86 % Hal ini telah berhasil dilakukan dikarenakan telah banyaknya melakukan KIE dan pembinaan pada anak-anak usia remaja tentang perlunya melakukan upaya pendewasaan usia perkawinan, agar dapat merencanakan kehidupan remaja yang lebih baik dan mencapai keluarga yang sejahtera.

6. Jumlah Kampung KB

Grafik 2.14



Sumber Data :K/O New Siga Tahun 2021

Tahun 2021 telah terbentuk 60 Kampung KB, sama dengan target yang telah ditetapkan sejumlah 60 Kampung. Di dalam Kampung KB semua kegiatan yang terkait dengan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) dilakukan dengan baik sehingga memberikan daya ungkit bagi pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel 2.32 : Rasio Penduduk Tahun 2012-2021 di Kabupaten Gowa

Rincian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Jumlah Penduduk	670.465	691.309	709.386	719.354	750.650	753.935	748.200	757.369	762.148	768.868
a. Laki-laki (jiwa)	329.673	339.575	348.706	355.381	373.354	374.640		375.190 (Lk-lk)	378.072 [Lk=lk]	380.564 {Lk-lk}
b. Perempuan (jiwa)	340.792	351.734	360.680	367.321	377.296	379.295		382.179 (Perempuan)	384.076 [perempuan]	388.304 {Perempuan}
2. Rasio Jenis Kelamin (sex ratio)	97	97	97	97	97	97	96.91	96.96	98,44	98.1
3. Pertumbuhan per tahun (%)	1.66	3.11	2.61	2.80	2.65	1.73	1.66	1.59	1.59	1.30

Sumber: BPS & Ditjen Dukcapil Kemendagri semester 2 tahun 2021.

Beberapa penyebab keberhasilan, adalah:

- 1) Meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam penggerakan Pembangunan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana);
- 2) Meningkatnya peran aktif *stakeholder* dalam Pembangunan Bangga Kencana;
- 3) Meningkatnya intensitas pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);
- 4) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Bangga Kencana.
- 5) Meningkatnya kegiatan Komunikasi Edukasi dan Informasi (KIE) tentang pembangunan Bangga Kencana melalui berbagai media;
- 6) Meningkatnya kemudahan akses informasi bagi masyarakat terhadap pembangunan Bangga Kencana;
- 7) Meningkatnya kualitas dan kemudahan akses pelayanan KB;
- 8) Meningkatnya intensitas pembinaan ketahanan keluarga melalui kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS;
- 9) Meningkatnya kegiatan integrasi program KB dengan kegiatan lain.

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.



Tabel 2.33 : Efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran(%)	Efisiensi/ Inefisiensi (%)
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	115.81	96.8	Efisien {19.01}

e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Tabel 2.39: Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Anggaran

No	Program dan Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
1	Program Bantuan Operasional Keluarga Berencana/ Distribusi Alat Kontrasepsi ke Fasyankes	75.516.000	75.516.000	100
2	Program Bantuan Operasional Keluarga Berencana/ Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB	188.732.000	186.670.000	99
3	Program DAK Bidang Keluarga Berencana/ Pembangunan / Alih Fungsi / Pengembangan Balai Penyuluhan KB	489.706.000	483.419.324	99
4	Program DAK Bidang Keluarga Berencana/ Pengadaan Sarana KIE KiT dan Media Lapangan	116.094.000	100.187.800	86
5	Program Peningkatan Fungsi dan Jaringan KB/ Pelaksanaan Bhakti Sosial TNI/KB-Kesehatan	15.409.900	15.409.900	100
Rata- rata		885.457.900	861.203.024	96.8

Sumber Data : LKj Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2021

Berdasarkan tabel tersebut diatas, menunjukkan bahwa capaian kinerja 121.67% lebih besar daripada realisasi anggaran 99%. Terdapat efisiensi sebesar 22.67% (realisasi kinerja - realisasi anggaran) berarti penggunaan anggaran berdampak signifikan terhadap target kinerja yang diharapkan.

f. Permasalahan dan Solusinya :

PERMASALAHAN :

- Masih adanya perkawinan usia muda (usia di bawah 20 tahun) dan kurangnya pemahaman remaja terhadap kesehatan reproduksi, hal ini disebabkan oleh:
 - Pengaruh budaya tradisional untuk menikah muda.
 - Derasnya arus informasi melalui berbagai media, salah satunya dari teknologi informasi/internet.
 - Masih lemahnya ketahanan mental remaja dalam menyikapi perkembangan budaya.
 - Kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan bahaya TRIAD KRR (Seks Bebas, NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Zat Aditif) dan HIV/AIDs).
 - Belum optimalnya peran kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja di masyarakat.
 - Kurangnya kesadaran remaja untuk berperan aktif dalam kegiatan PIK Remaja.
- Masih tingginya angka Drop Out kesertaan ber-KB;
- Masih rendahnya kesertaan ber KB MKJP;
- Masih tingginya jumlah Unmet Need yang belum terlayani;



5. Masih rendahnya kualitas Institusi Masyarakat Pedesaan, kader kelompok ketahanan keluarga (BKB, BKR dan BKL) dan kelompok UPPKS;
6. Sering terjadinya pergantian Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKBD dan Sub PPKBD);
7. Masih adanya program kegiatan yang masih 112esehat tindh dan belum saling bersinergi dan berkesinambungan;
8. Kurangnya kesehat yang tepat dan menyeluruh dalam penetapan sasaran indikator program kegiatan, yang menyebabkan capaian (output-outcome) yang dihasilkan belum tepat sasaran dan belum terukur;
9. Anggaran APBD terkait belanja dalam program Bangga Kencana masih sangat kurang;
10. Profesionalisme Sumber Daya Manusia belum diakomodir dalam kegiatan pembinaan, diklat, sosialisasi, bimtek dan lain-lain, yang menyebabkan menurunnya kualitas SDM karena belum bisa mengikuti informasi dan teknologi yang terus berkembang;
11. Kurangnya SDM penunjang kegiatan di lingkungan DPPKB Kabupaten Gowa. Seiring dengan berjalannya waktu, terdapat beberapa PNS yang menjalani masa 112esehat, dan kurangnya rekrutmen untuk tenaga PNS di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa;
12. *Updating* data yang masih mengalami kendala, dimana data yang diperoleh belum akurat dikarenakan terdapat beberapa prosedur dalam proses pengumpulan dan pengolahan data yang belum sepenuhnya dijalankan.

Solusi :

1. Meningkatkan 112esehatan dengan 112esehat-lembaga terkait dalam pembangunan Bangga Kencana;
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas KIE pendewasaan usia perkawinan dan 112esehatan reproduksi remaja;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kelompok PIK Remaja;
4. Meningkatkan frekuensi pembinaan institusi masyarakat pedesaan, kader kelompok ketahanan keluarga (BKB, BKR dan BKL) dan kelompok UPPKS;
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kepesertaan ber-KB dengan mendorong kesertaan ber-KB MKJP dalam rangka mengurangi jumlah *Unmet Need*;
6. Meningkatkan kegiatan KIE Bangga Kencana melalui berbagai media;
7. Meningkatkan kemudahan akses masyarakat terhadap informasi dan pelayanan program KKB;
8. Meningkatkan koordinasi dengan Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga perencanaan program, kegiatan dan anggaran lebih terukur;
9. Lebih memperhatikan potensi masyarakat dan lingkungan agar tepat dalam menentukan target dan sasaran kedepannya;
10. Mengadakan pelatihan, sosialisasi, bimtek dan lain-lain yang dapat meningkatkan kualitas SDM di lingkungan DPPKB Kabupaten Gowa;
11. Meningkatkan kuantitas dan kualitas koordinasi dan sinkronisasi dalam setiap pelaksanaan program kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi baik dan terbentuknya *team work* yang *solid*;
12. Melakukan *updating* data secara lebih optimal sehingga diperoleh data yang akurat.



Sasaran 7 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Berkeadilan

a. Perbandingan Antara target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Berkeadilan.

Tabel 2.34: Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Berkeadilan

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Capaian 2020	Target	Target Capaian 2021		
					Realisasi	Capaian(%)	Naik/Turun
1	Menurunnya tingkat kemiskinan	%	96.13	7.10	7.38	96.05	Turun

Sumber Data : * Target 2020 yang realisasinya dirilis BPS Kab.Gowa 2021 dan Dinas Sosial Kab.Gowa Tahun 2021

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 2.35: Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Berkeadilan:

NO	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Kondisi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Kondisi Akhir RPJMD
1	Menurunnya tingkat kemiskinan	%	7.85	5.42	7.96	8.42	7.83	7.53	7.38	6.95

Sumber Data : BPS Kab.Gowa 2020 dan Dinas Sosial Kab.Gowa Tahun 2020

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan.

Realisasi menurunnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Gowa tahun 2020 yang dirilis BPS tahun 2021 sebesar 7.38% belum memenuhi target sebesar 7.10 %. Hal ini disebabkan karena pandemic covid 19 yang berimbas pada penurunan pendapatan masyarakat sehingga angka kemiskinan di Kabupaten Gowa belum memenuhi target. Walaupun berbagai upaya yang telah dilakukan seperti pemberian bantuan pada PMKS. Pada tahun 2021 total bantuan sosial berdasarkan APBN dan APBD telah diberikan bagi 247.036 jiwa dengan total data PMKS yang ada sebanyak 456.096 jiwa.

Total Data yang diverifikasi dan validasi Tahun 2021 sebanyak 54.000 data per rumah tangga miskin. Pengentasan kemiskinan memang tidak bisa hanya mengandalkan dana APBD dikarenakan jumlah penduduk Kabupaten Gowa yang tergolong besar sebesar 765.836 jiwa (BPS 2020) sedangkan data masyarakat rentan Kabupaten Gowa sebesar 456.099 jiwa. Hal ini berarti jumlah masyarakat miskin atau rentan di Kabupaten Gowa sebesar 60% dari total jumlah penduduk yang ada.

Pemberian layanan Kesehatan dasar berupa bantuan KIS dengan dana bersumber dari APBD bagi 122.487 jiwa dan bantuan sosial bagi 26.638 jiwa penduduk. Selain itu, 97.911 jiwa diberikan bantuan sosial yang dana nya bersumber dari APBN berupa bantuan program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT) dan bantuan sosial tunai (BST). Disamping itu pendataan data keluarga



miskin belum sepenuhnya akurat sehingga sering adanya penerima bantuan social tidak tepat sasaran.

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 2.36: Efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran Meningkatnya kesejahteraan Berkeadilan.

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi/Inefisiensi (%)
1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	96.03	84.97	11.06{Efisien}

Sumber Data: Dinas Sosial Kab.Gowa Tahun 2021

e. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang Pencapaian Kinerja

Tabel 2.37 : Pengukuran Kinerja Program Kegiatan dan Anggaran

No	Program dan Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
1	Program Pemberdayaan Sosial/ Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	105,200,000.00	86.900.000	82.60
2	Perlindungan dan jaminan sosial/Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/kota	518,179,250.00	474,058,250.00	91.48
3	Rehabilitasi Sosial/Pemberian bimbingan fisik, mental,spiritual dan sosial	41,837,500.00	33,825,000.00	80.84
	Jumlah	665.216.750	594.783.250	84.97

Sumber Data: Dinas Sosial Kab.Gowa Tahun 2021

Berdasarkan tabel tersebut diatas, menunjukkan bahwa capaian kinerja 96.13% lebih besar daripada realisasi anggaran 94.40%. Terdapat efisiensi sebesar 1.73% (realisasi kinerja - realisasi anggaran) berarti capaian kinerja harus lebih ditingkatkan.

f. Permasalahan dan solusi pemecahannya :

Data penduduk miskin belum sepenuhnya akurat sehingga sasaran pemberian bantuan belum sepenuhnya maksimal.

Solusi :

Perlu adanya keseragaman dan sinkronisasi data mulai dari tingkat RT/RW sampai level pusat sehingga sasaran bantuan untuk warga miskin tepat sasaran.

Sasaran 8: Meningkatnya Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga.

a. Perbandingan Antara target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga.

Tabel 2.38 :Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga :

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Naik/Turun
----	-------------------	----------------	--------	--------	-----------	---------	------------



1.	Indeks Pembangunan Pemuda	41.5	Indeks	45-50	42	84	Naik
----	---------------------------	------	--------	-------	----	----	------

Sumber Data: Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.Gowa Tahun 2021.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya :

Tabel 2.39: Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga dan Indeks Pembangunan Pemuda

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Indikator kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Organisasi kepemudaan yang aktif	%	48.6	37	48.90	49.42	59	Indeks Pembangunan Pemuda	41.5	42
2	Cabang olahraga yang berprestasi	%	27.00	27	28.34	31.01	13			

Sumber Data: Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.Gowa Tahun 2021

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan:

Salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan untuk mewujudkan Visi Pembangunan pemuda akan dilaksanakan penguatan,perluasan dan pemantapan kolaborasi antar stakeholder. Kolaborasi akan perilaku berisiko pada Pemuda dan peningkatan Partisipasi Pemuda dalam kegiatan sosial dan Politik. IPP dapat menjadi gambaran Kemajuan Pemuda. Pembangunan Pemuda merupakan agenda strategis Indonesia dalam rangka mempersiapkan generasi pemuda masa depan yang tangguh dan mampu berperan dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan. IPP adalah Instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan Pembangunan Pemuda di Indonesia.IPP mencakup 5 domain yakni Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan serta gender dan diskriminasi dan ke 5 domain ini memiliki relevansi dengan 5 hak setiap pemuda dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan.Kelima hak itu adalah perlindungan,khususnya dari pengaruh destruktif,pelayanan dalam menggunakan sarana dan prasarana kepemudaan tanpa diskriminasi ; advokasi akses pengembangan diri,serta kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan,pengawasan,evaluasi dan pengambilan keputusan strategi program Kepemudaan.

Indeks Pemberdayaan Pemuda tidak mencapai target hal tersebut disebabkan oleh domain lapangan dan kesempatan kerja tercatat sebagai domain terlemah dengan nilai 40 dari tahun sebelumnya yakni sebesar 35. artinya pada usia pemuda terdapat jumlah pengangguran terbuka yang cukup besar



Skor IPP dihitung dengan menggunakan rumus :

$$YDI = \frac{\text{Indeks Domain 1} + \dots + \text{Indeks Domain 5}}{5}$$

YDI (Youth Development Indeks) adalah

$$IPP = \left(\frac{60+20+40+40+50}{5} \right) = 210 : 5 = 42.00 \%$$

d. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 2.40 : Efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga.

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi/Inefisiensi (%)
1	Indeks Pembangunan Pemuda	84	97.27	Inefisiensi {13.27}

e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja :

Tabel 2.41 : Pengukuran Program Kegiatan dan Anggaran Meningkatnya Pemuda dan Olahraga

No	Program	Target	Realisasi	Capaian
1	Program penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelapor kabupaten kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota / Peningkatan kepemimpinan, kepoloporan dan kesukarelawan pemuda	1,261,505,791	1,261,505,791	100
2	Program pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota/- Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten/kota	328,535,091	328,231,000	99.91
3	Program pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan/- Pengembangan kapasitas SDM kepramukaan tingkat daerah	261,505,775	211,430,988	80.85



Rata-rata	1.851.546.657	1.801.167.779	97.27
-----------	---------------	---------------	-------

Berdasarkan tabel tersebut diatas, menunjukkan bahwa capaian kinerja 84% lebih kecil daripada realisasi anggaran 97.27%. Terdapat infisiensi sebesar 13.27% (realisasi kinerja - realisasi anggaran) berarti penggunaan anggaran belum berdampak signifikan terhadap target kinerja yang diharapkan

F. Permasalahan dan Solusi pemecahannya :

1. Banyak organisasi kepemudaan yang tidak melapor kegiatannya baik pada Badan Kesatuan Bangsa maupun pada Dinas pemuda dan olahraga.
2. Ada beberapa cabang yang pertandingkan pada skala kecil seperti popda dan Proda dan pertandingan antar club namun hal kegiatan ini tidak dihitung dalam indikator cabang olahraga yang prestasi.
3. Banyak cabang olahraga yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang representatif

Solusi :

1. Mendorong organisasi kepemudaan untuk melaporkan organisasi yang bersangkutan di Badan kesatuan bangsa.
2. Untuk mempertahankan prestasi yang diraih oleh Kab.Gowa KONI dan beberapa cabang olahraga tetap konsisten mengadakan pembinaan cabang olahraga. Dan pihak Dispora memprogramkan Pembinaan dan Pemasarakatan olahraga.
3. Meningkatkan anggaran bidang olahraga baik dari APBD, hibah, masyarakat dan KONI.

Sasaran 9 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Tabel 2.42 : Pengukuran Kegiatan Indikator Sasaran

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kualitas Lingkungan	Indeks	67,73	62.99	91

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kab.Gowa Tahun 2021

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

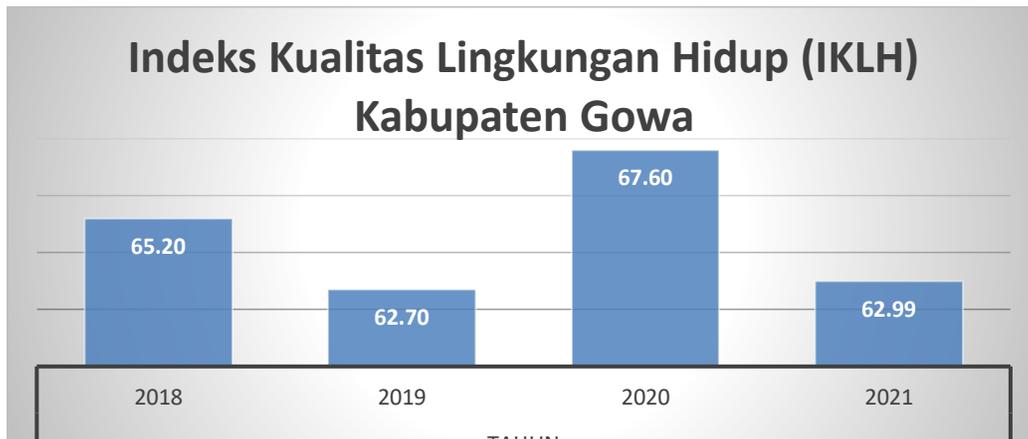
Tabel 2.43 : Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH	62,70	67.60	62.99



c. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Peningkatan Atau Kegagalan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Dilakukan :

Grafik 2.13 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Gowa 2018-2021



Grafik 3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Gowa 2018-2021

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang merupakan salah satu indikator sasaran dalam RPJMD Kabupaten Gowa didapatkan dari rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)} = (\text{Indeks Kualitas Air} \times 0,376) + (\text{Indeks Kualitas udara} \times 0,405) + (\text{Indeks Kualitas Tutupan Lahan} \times 0,219).$$

Pencapaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tidak mencapai target hal tersebut terkait dengan sub indikator :

Tabel 2.44: Indikator Sasaran :

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	2021		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	5	6	7
1	Indeks Kualitas Air	IKA	70,00	50,00	71%
2	Indeks Kualitas Udara	IKU	85,00	85,58	101%
3	Indeks Kualitas Tutupan lahan	IKTL	53,08	43,51	82%

Analisis penyebab keberhasilan/ peningkatan atau kegagalan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan secara rinci untuk setiap indikator (Nilai Indeks Kualitas Air, Nilai Indeks Kualitas Udara, Dan Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang mendukung pencapaian Indikator Sasaran *Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup* diuraikan sebagai berikut:

Grafik 2.15 Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Gowa 2018-2021



Parameter Kualitas Air (Sungai) sesuai Peraturan Gubernur Sulsel Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tentang Baku Mutu Dan Kriteria Kerusakan Lingkungan Hidup, yakni:

Fisika : 6 (Temperatur, Bau, Kekeruhan, Warna, TDS, TSS).

Kimia : 28 (pH, BOD, COD, DO, Phospat, Nitrat dst).

Mikrobiologi : 4 (Bakteri Coli Tinja dan Bakteri Koli Total dst).

Parameter yang diukur untuk **INDEKS KUALITAS AIR (IKA)** adalah pH, TSS, DO, BOD, COD, NO₃-N, Total Fosfat, dan Fecal Coli. Pengambilan sampel dilakukan terhadap Sungai Jeneberang. Pengambilan sampel dilakukan setiap bulan dalam 1 tahun (12 kali).

Pada tahun 2021 capaian kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu 71% dimana realisasinya lebih rendah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu $\leq 100\%$. Sehingga kriteria penilaian untuk **Indikator Sasaran Indeks Kualitas Air** adalah “**sedang**”. Target nilai IKA Pada tahun 2021 sebesar 70,00 dengan realisasi 50,00. Angka IKA ini tahun ini lebih rendah dari target akhir tahun 2021 dengan angka 70,00. Angka 50,00 ini juga lebih rendah dibandingkan angka IKA pada tahun-tahun lalu. Penurunan pencapaian sasaran ini menunjukkan bahwa upaya-upaya pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan belum optimal, disamping juga harus terus ditingkatkannya operasional penanganan sampah.

Target IKA Nasional Tahun 2021 menurut target Indikator Kinerja Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK berada pada angka 52,50. sedangkan target IKA Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2021 adalah 77,72. Melihat angka Target IKA Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat bahwa nilai IKA Kabupaten Gowa masih berada di bawahnya.

Angka IKA dari tahun ketahun mengalami cenderung fluktuatif, angka IKA pada tahun ini 50,00 sedangkan target akhir pada Renstra berada pada nilai 70,00. Parameter yang sering melebihi baku mutu adalah bakteri coli tinja, yang dipengaruhi oleh aktivitas atau perilaku warga dan juga industri yang berada di bawah sungai dengan membuang limbahnya ke sungai. Penyebabnya dapat dikarenakan fasilitas dan sarana prasarana untuk membuang limbah ada berada di atas sungai, sehingga rumah warga yang berada di bawah sulit menjangkau SAL yang berada di atas. Dinas Lingkungan dalam hal ini bertugas untuk memotret kondisi dan melakukan penilaian terhadap kualitas air sungai serta melakukan pengendalian dengan pembinaan intensif kepada warga/pelaku usaha untuk turut serta dalam menjaga kualitas air sungai. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai IKA adalah dengan mengembalikan fungsi sungai sebagaimana mestinya, seperti dengan menutup akses buangan limbah ke sungai. Hal itu tentu saja tidak lepas dari sektor-sektor lain yang turut terlibat dalam peningkatan nilai Kualitas Air, sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah koordinasi lintas OPD seperti Bappeda, DLH, Dinas PUPR, Dinas Perindag dll.

Faktor Pendorong:



1. Adanya rencana pembangunan Sistem Pemantauan Kualitas Air Secara Kontinyu yang bersumber dari DAK Tahun Anggaran 2021 dapat menyajikan status baku mutu Sungai Jeneberang secara realtime.
2. Kegiatan bersih sungai yang dilakukan secara rutin oleh kelompok masyarakat pemerhati sungai dan pemberian izin secara ketat bagi usaha yang membuang limbah ke sungai mampu mengurangi pembuangan sampah ke sungai.
3. Rencana Penyusunan Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan Hidup yang dapat menjadi rambu-rambu dalam pemberian izin usaha dan/ atau kegiatan.
4. Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga akan menjadi panduan dalam perencanaan dan pengelolaan sampah sampai tahun 2024.

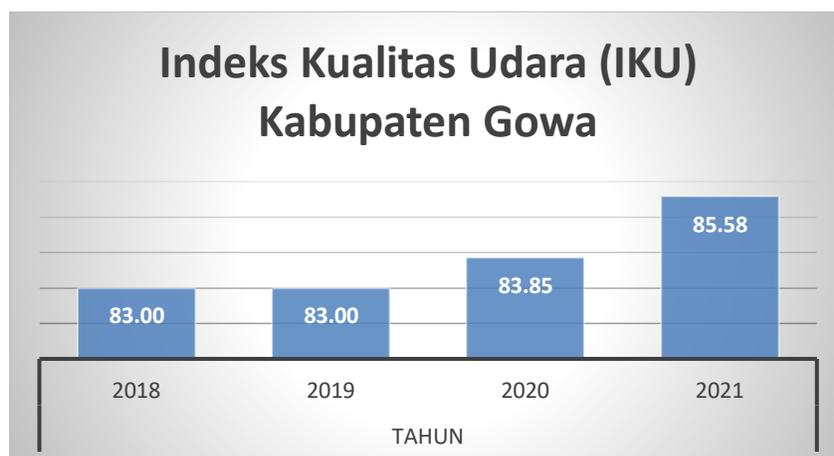
Faktor Penghambat:

1. Belum adanya Laboratorium pengujian kualitas air yang terakreditasi sehingga pengujian kualitas air di Kabupaten Gowa belum dapat dilakukan sendiri.
2. Sebagian besar warga yang berada di pinggiran sungai masih membuang limbah domestiknya ke dalam sungai, hal ini berperan dalam menurunkan kualitas air sungai di Kabupaten Gowa.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mulai terlibat dalam upaya pengurangan sampah.
4. Masih adanya warga yang memelihara ternak di sepanjang pinggiran sungai sehingga meningkatkan pencemaran sungai.
5. Ketergantungan atas kondisi TPA Pabbentengan karena tidak ada alternatif lain sebagai lokasi pembuangan sampah.

Tindak Lanjut:

1. Melakukan pembinaan secara intensif kepada masyarakat untuk turut serta dalam menjaga kualitas air sungai dengan tidak melakukan aktivitas yang menambah beban pencemaran air sungai melalui Gerakan AYO GOWA BERSIH.
2. Meningkatkan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang berpotensi mencemari sungai.
3. Pemerintah Kabupaten Gowa melakukan koordinasi dengan dinas terkait, seperti Bappeda, DLH, Dinas PUPR, Dinas Perindag, dll untuk mengembalikan fungsi sungai sebagaimana mestinya

Grafik 2.16 Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Gowa 2018-2021



Data IKU diperoleh dari hasil pengujian terhadap 2 parameter kualitas udara, yaitu : SO₂ dan NO₂. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan cara *Passive Sampler* dengan frekuensi dan periode tahunan (Lokasi pengambilan sampel



mewakili 4 unsur : permukiman padat penduduk, daerah/kawasan industri (bukan industrinya), kawasan komersil (perkantoran) dan daerah padat transportasi (jalan utama yang lalu lintasnya padat). Titik sampel untuk pengujian Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Gowa ini untuk Kawasan transportasi berada di Terminal Cappa Bungaya, untuk industri/agro industri berada di Kec. Bontomarannu, untuk kawasan permukiman di Kelurahan Bonto-Bontoa Kec. Sombaopu, dan untuk kawasan perkantoran di Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Gowa.

Tingkat keberhasilan pada **indikator sasaran Indeks Kualitas Udara** adalah “sangat baik” Target IKU Pada tahun 2021 sebesar 85,00 dengan realisasi 85,58. IKU tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dari tahun 2020 yang sebesar 83,85. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang berpotensi mencemari udara telah mulai membuahkan hasil, disamping juga peran dari pemerintah pusat yang terus melakukan sosialisasi penggunaan bahan bakar ramah lingkungan (Nilai Octane/ Cetane Rendah).

Target IKU Nasional Tahun 2021 menurut target Indikator Kinerja Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK berada pada angka 84,86, sedangkan target IKU Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2020 adalah 88,75. Melihat target Nasional, capaian IKU untuk Kabupaten Gowa sudah melebihi target, tetapi belum mencapai nilai target dari Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan dilihat pada tren angka IKU di Kabupaten Gowa tiap tahun mengalami peningkatan. Untuk meningkatkan nilai IKU perlu adanya upaya-upaya lebih maksimal yang harus dilakukan. Seperti halnya IKA, IKU juga dipengaruhi oleh buangan aktivitas warga, yaitu buangan dari emisi. Untuk emisi tidak bergerak yang berasal dari industri hanya sedikit, sedangkan yang paling banyak adalah dari emisi bergerak yaitu kendaraan bermotor. Kendaraan di Kabupaten Gowa harus rutin dalam perawatan atau pemeliharaan yaitu dengan service berkala. Kewenangan DLH tidak bisa untuk melakukan itu sehingga upaya yang bisa dilakukan adalah dengan memperbanyak penghijauan (tanaman keras), pemeliharaan jalur perindang agar udara di Kabupaten Gowa semakin baik. Koordinasi lintas OPD tentu juga perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai IKU.

Faktor Pendorong:

1. Adanya alat pemantau kualitas udara secara real time (AQMS), sehingga memudahkan pemantauan kualitas udara secara real time.
2. Adanya sosialisasi dari pemerintah pusat untuk menggunakan bahan bakar ramah lingkungan (Nilai Octane/ Cetane Rendah).
3. Pemeliharaan RTH (Ruang Terbuka Hijau) Perkotaan terutama pada jalur perindang yang ada di Kabupaten Gowa mampu membantu menjaga kualitas udara perkotaan.
4. Penyusunan Rencana Aksi Daerah terkait GRK (Gas Rumah Kaca) dapat menjadi panduan perencanaan pencegahan dan pengendalian pencemaran udara kedepan.

Faktor Penghambat:

1. Adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Gowa, terutama jam-jam masyarakat beraktivitas serta setiap akhir minggu dan libur, dimana kendaraan dari luar kota memadati Kabupaten Gowa.
2. Adanya keterbatasan lahan untuk melakukan penghijauan di wilayah Kabupaten Gowa, padahal penghijauan merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi polusi udara perkotaan.

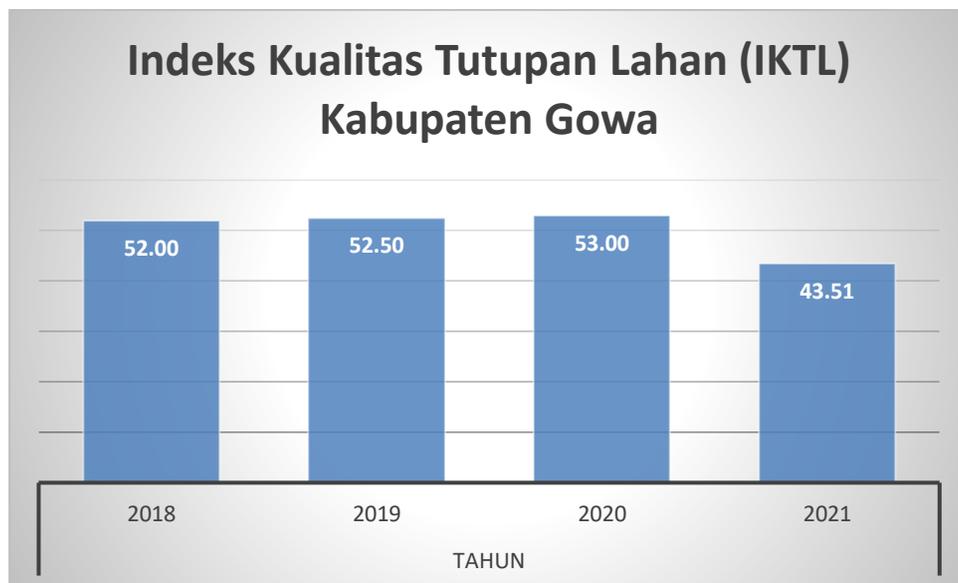
Tindak Lanjut:

1. Melakukan publikasi secara intensif kepada masyarakat tentang kondisi udara di

Kabupaten Gowa, sehingga meningkatkan kepedulian dan informasi lingkungan kepada masyarakat.

2. Menambah pohon perindang jalur hijau untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan.
3. Terus menggalakan penghijauan di lingkungan rumah-rumah warga masyarakat Kota, untuk menciptakan suasana lingkungan yang asri dan nyaman.

Grafik 2.17 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Gowa 2018-2021



Data IKTL dihitung dari beberapa parameter kunci yang menggambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial, yang terdiri dari:

- Tutupan Vegetasi Hutan:
 1. Hutan Lahan Kering Primer
 2. Hutan Lahan Kering Sekunder/ Bekas Tebangan
 3. Hutan Mangrove Primer
 4. Hutan Mangrove Sekunder Bekas Tebangan
 5. Hutan Rawa Primer
 6. Hutan Rawa Sekunder/ Bekas Tebangan, dan
 7. Hutan Tanaman
- Tutupan Vegetasi Non Hutan
 1. Belukar dan Belukar Rawa pada kawasan hutan dan fungsi lindung Lahan dengan kemiringan >25%, sempadan sungai, pantai dan danau
 2. RTH yang terdiri dari Kebun Raya, Taman Kehati, Hutan Kota, Taman Kota
 3. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (di APL)

Tingkat keberhasilan pada indikator sasaran Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah “tinggi”. Target IKTL Pada tahun 2021 sebesar 53,08 dengan realisasi 43,51. IKTL tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dari tahun 2020 yang berada pada angka 53. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya peningkatan konservasi dan pemeliharaan lingkungan belum membuahkan hasil.

Target IKTL Nasional Tahun 2021 menurut target Indikator Kinerja Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK berada pada angka 63,66. Melihat target Nasional, capaian IKTL untuk Kabupaten Gowa masih jauh dari target.



Untuk meningkatkan nilai IKTL perlu adanya upaya yang dilakukan secara komprehensif dan massive dengan melibatkan semua stake holder dan masyarakat sebab nilai Indeks Kualitas Tutupan lahan lahan sangat erat kaitannya terhadap nilai kerentanan daerah terhadap bencana alam.

Faktor Pendorong:

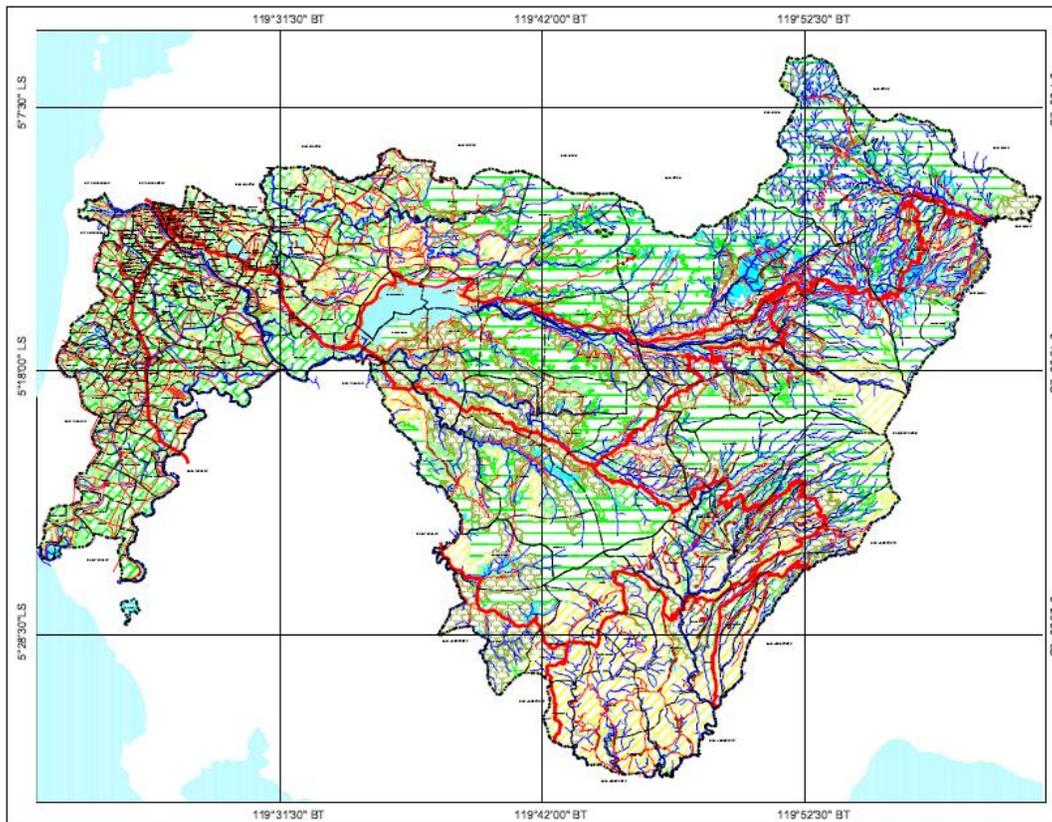
1. Banyaknya program pemerintah pusat yang terkait dengan penghijauan.
2. Adanya semangat baru dari Masyarakat Adat di beberapa wilayah dataran tinggi untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan mempertahankan kearifan lokal.
3. Mulai tumbuh kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sebagai warisan untuk masa depan dan menjauhkan dari bencana alam.

Faktor Penghambat:

1. Alih fungsi kawasan hutan menjadi areal pertanian dan perkebunan.
2. Dampak negatif dari pertumbuhan kawasan wisata disekitar wilayah kawasan hutan, dimana banyak terbangun pemukiman dan bangunan komersial.
3. Peladang berpindah yang masih banyak dijumpai.

Tindak Lanjut:

1. Tidak menerbitkan Izin untuk usaha dan/atau kegiatan yang berada di kawasan lindung.
2. Secara rutin melakukan kegiatan penghijauan dalam rangka rehabilitasi kawasan hutan.
3. Menggalakkan Program Kampung Iklim dalam rangka pelibatan masyarakat.
4. Menginventarisir Masyarakat Adat yang bermukim di sekitar hutan untuk dapat di verifikasi dan divalidasi menjadi Masyarakat Hukum Adat, sehingga nantinya dapat lebih berperan dalam pengelolaan hutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan mempertahankan kearifan lokal.
5. Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan OPD terkait di Kabupaten Gowa sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam meningkatkan kualitas tutupan lahan.



Gambar 3.1 Peta Tutupan Lahan di Kabupaten Gowa

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 2.45 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Realisasi Anggaran	Efisiensi
1.	Tingkat kualitas lingkungan	91	99.41	Inefisiensi [8.41]

Data diolah

e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja.

Tabel 2.46 : Program Kegiatan dan Anggaran Sasaran 2 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Program dan Kegiatan	Anggaran		
	Target	Realisasi	%
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	148.171.467	147.754.050	99,72
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.308.100.000	1.280.910.000	97,92



PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	3.300.000	3.300.000	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	6.023.000	6.023.000	100
Jumlah	1.465.594.467	1.437.987.050	99.41

Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran Badan Lingkungan Hidup Tahun 2021

Berdasarkan tabel tersebut diatas, menunjukkan bahwa capaian kinerja 91% lebih kecil daripada realisasi anggaran 99.41%. Terdapat inefisiensi sebesar 8.41% (realisasi kinerja - realisasi anggaran) berarti perlu ditingkatkan kinerja untuk mendapat nilai efisiensi.

f. Permasalahan dan solusi pemecahan :

1. Adanya keterbatasan lahan untuk melakukan penghijauan di wilayah Kabupaten Gowa, padahal penghijauan merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi polusi udara perkotaan.
2. Dampak negatif dari pertumbuhan kawasan wisata disekitar wilayah kawasan hutan, dimana banyak terbangun pemukiman dan bangunan komersial.

Solusi :

1. Regulasi tentang pembukaan perumahan diperketat.
2. Melakukan penanaman pohon yang usia pohonnya jangka Panjang.

Sasaran 10: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian.

Sasaran meningkatnya Produksi pertanian, peternakan dan Perikanan dengan indicator produksi padi, produksi jagung, produksi kakao, produksi kopi, populasi sapi potong dan produksi ikan diubah pada Indikator Kinerja Utama Kab. Gowa tahun 2020 menjadi sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dengan indikator Nilai PDRB sector pertanian.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran Meningkat Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian :

Tabel 2.47 : Capaian Indikator Kinerja Nilai PDRB sektor pertanian tahun 2021

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Rupiah	5.752.848.140	6.764.231,14	119

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya.

Tabel 2.48: Perbandingan Perkembangan Capaian Sasaran Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian :



NO	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Meningkatnya PDRB sector Pertanian	Jutaan Rupiah	5.173.375	5.550.014	5.655.582	5.943.989.100	6.764.231,14

Sumber Data: BPS

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah Dilakukan :

1. Perkebunan

Capaian kinerja sasaran tahun 2021 menunjukkan tingkat capaian yang optimal, dari sasaran strategik yang direncanakan, indikator hasil kerja (output) dan sasaran (outcome), serta masukan (input), dan sumber daya manusia. Akuntabilitas kinerja dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.49 : Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021

Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya produksi perkebunan	Produksi kakao	ton	1.350	1.168	86.52
	Produksi kopi	ton	2.650	2.031	76.64

Ada dua indikator pada produksi perkebunan yaitu produksi kakao dan produksi kopi. Produksi kakao tidak mencapai target karena :

1. Serangan hama.
2. Alih fungsi lahan yaitu tanaman kakao di ganti dengan tanaman perkebunan lainnya seperti tanaman cengkeh dan lada.
3. Pengaruh cuaca yang tidak menentu.

Tanaman kopi untuk tahun 2021 ini mengalami penurunan produksi khususnya di sentra produksi kopi arabika di Kecamatan Tompobulu dan Tinggimoncong sehingga produksi menurun dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan, ini disebabkan oleh Faktor iklim yang tidak menentu, dan pada fase tanaman kopi berbunga, curah hujan meningkat dan bunga kopi banyak yang berguguran, Faktor iklim tersebut penyebab utama menurunnya produksi kopi.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel.2.50 : Perbandingan antara capaian kinerja Tahun 2021 dengan beberapa tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja	Capaian (%)							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Produksi kakao	131.10	71.57	104.13	90.01	92.81	90,64	84,96	86.52
2 Produksi kopi	131.39	83.32	95.85	88.25	107.17	103,08	91,06	76.64



No	Indikator Kinerja	satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2021	Capaian (%)
1	Produksi kakao	Ton	2.000	1.168	77.05
2	Produksi kopi	Ton	2.800	2.031	92.04

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2021 dan beberapa tahun terakhir. Komoditi perkebunan khususnya kakao dan kopi pada tahun 2021 mengalami peningkatan produksi karena kesadaran petani dalam memelihara tanamannya.

2. Peternakan.

a. Capaian kinerja Produksi Peternakan 2021 :

Tabel.2.52 : Capaian kinerja Tahun 2021

Indikator Kinerja	Capaian (%)			
	Target	Realisasi	Capaian	
1	Populasi ternak			
a.	Sapi potong	119.287	121.163	101.57
b.	Ternak besar	120.964	122.001	100.86
c.	Ternak kecil	16.623	16.800	101.06
d.	Unggas	4.400.854	4.591.544	104.33
2	Produksi ternak			
a.	Daging	12.076	14.019	116.10
b.	Telur	9.823	10.470	106.59

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel.2.53 : Perbandingan antara capaian kinerja Tahun 2021 dan beberapa tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja	Capaian (%)								
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Populasi ternak								
a.	Sapi potong	105.57	101.08	100.38	100.01	99.94	100.26	100.09	101.57
b.	Ternak besar	116.10	117.85	100.38	101.28	97.98	96.63	105.01	100.86
c.	Ternak kecil	104.85	113.02	100.14	100.50	70.12	228.14	231.46	101.06
d.	Unggas	131.17	119.73	100.05	100.17	96.02	96.33	97.66	104.33
2	Produksi ternak								
a.	Daging	196.31	120.31	157.45	135.24	115.65	117.17	59.48	116.10
b.	Telur	156.13	183.99	79.03	60.53	83.06	53.97	59.63	106.59



Sektor peternakan capaian populasi mengalami peningkatan pada ternak sapi potong, ini disebabkan adanya kegiatan inseminasi buatan. 30 populasi ternak dan disertai dengan kelahiran sapi, sedangkan ternak besar lainnya seperti kerbau mengalami penurunan disebabkan minat masyarakat untuk memelihara kerbau semakin rendah, karena kerbau tidak lagi berfungsi untuk membajak sawah. Ternak kecil seperti kambing mengalami penurunan capaian kinerja karena populasinya menurun disebabkan terserang penyakit, sedangkan ternak unggas mengalami peningkatan capaian produksi telur karena minat masyarakat memelihara ayam buras, ayam petelur dan itik mulai bergairah. Hal ini juga berdampak terhadap produksi telur mencapai target yang ditetapkan. Produksi daging mencapai target yang telah ditetapkan, dengan capaian tahun 2021 lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh ternak sapi potong dan unggas yaitu ayam buras dan ayam broiler yang merupakan penghasil utama komoditi daging mengalami peningkatan.

Tabel 2.54 : Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan target jangka menengah;

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2021	Capaian (%)
1	Populasi ternak				
	a. Sapi potong	Ekor	119.287	121.163	101.57
	b. Ternak besar	Ekor	120.964	122.154	100.98
	c. Ternak kecil	Ekor	16.623	16.800	101.06
	d. Unggas	Ekor	4.400.854	4.591.544	104.33
2	Produksi ternak				
	a. Daging	Ton	12.078	14.019	116.09
	b. Telur	Ton	9.823	10.470	106.59

3. PERIKANAN :

Dalam mendukung tercapainya Peningkatan produksi hasil perikanan maka dilakukan kegiatan yaitu peningkatan produksi balai benih ikan, peningkatan produksi hasil tangkap, pengembangan kemitraan pembudidaya ikan, dengan produksi hasil perikanan yang telah dicapai perikanan Kab. Gowa, telah menghasilkan produksi yang melebihi dari target kabupaten yang telah ditetapkan serta dapat memberikan nilai tambah terhadap pencapaian PDRB sektor Kelautan dan Perikanan pada tahun 2021 sebesar 1.032.615,62 atau 4,80 %, terhadap PDRB Kab Gowa sebesar Rp 23.536.837,73.

Tabel 2.55: Meningkatnya Produksi Budidaya Ikan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Produksi Budidaya Ikan	Produksi Hasil Budidaya Perikanan	Ton	1506,1	2126,4	141

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat pada Gambar diagram dibawah ini :

Grafik 2.18

Perbandingan realisasi Kinerja serta
Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan
beberapa Tahun Sebelumnya



Berdasarkan Data dalam diagram diatas menunjukkan bahwa produksi perikanan setiap tahunnya mengalami peningkatan, sejak dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Dan tahun 2021 mengalami penurunan walaupun realisasi melebihi dari target produksi yang telah ditetapkan. Tercapainya peningkatan capaian kinerja karena dukungan berbagai aspek berupa peningkatan produksi hasil budidaya, peningkatan produksi hasil tangkap, peningkatan produksi hasil pengolahan dan peningkatan capaian binaan kelompok perikanan. Perbandingan data dari tahun 2021 dengan tahun sebelumnya pada beberapa aspek yang turut serta dalam pencapaian kinerja produksi perikanan tahun 2021 adalah meningkatnya produksi perikanan budidaya dan hasil perikanan tangkap.

a. Perikanan Budidaya

Realisasi capaian kinerja tahun 2021 dinas Perikanan Kabupaten Gowa, walau dengan situasi kondisi pandemi Covid 19 yang cukup memperhatikan bagi pengusaha pembudidaya ikan namun semangat dan keinginan kelompok-kelompok pembudidaya ikan untuk tetap mempertahankan produksi ikan yang dihasilkan masih dapat tercapai dengan baik, bahkan menghasilkan produksi ikan hasil budidaya yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Adapun capaian produksi ikan hasil budidaya tahun 2021, bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada Gambar di bawah ini :

Produksi ikan hasil budidaya tahun 2021 mengalami penurunan 3,1 ton dibanding tahun 2020, hal ini disebabkan karena ada refocusing anggaran yang mengakibatkan program dan kegiatan kemitraan pembudidayaan ikan mengalami juga pengurangan baik dalam hal volume maupun jumlah kelompok yang mendapat bantuan benih ikan, Sehingga produksi yang dihasilkan juga mengalami penurunan, walaupun demikian Realisasi Capaian Produksi ditahun 2021 masih lebih dari target produksi yang telah ditetapkan.



Upaya yang telah dilakukan dinas perikanan melalui perbaikan pengelolaan Balai Benih Ikan (BBI) yang dapat menghasilkan produksi benih ikan air tawar yang

berkualitas sehingga dapat menghasilkan produksi benih ikan yang lebih banyak. Peningkatan produksi hasil perikanan budidaya juga didukung dari peningkatan pemanfaatan sumberdaya lahan yang ada di masyarakat seperti sawah, kolam, Keramba jaring apung (KJA) serta peranan desa dalam membina masyarakat pembudidaya ikan dalam memanfaatkan potensi yang ada.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 terhadap sasaran produksi hasil perikanan budidaya dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.56
Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya dengan Sasaran Peningkatan Produksi Hasil Perikanan di Bidang Budidaya Perikanan

No	Indikator Kinerja	Sat.	Kondisi 2015 (000)	Real 2016 (000)	Real 2017 (000)	Real 2018 (000)	Real 2019 (000)	Indikator kinerja	Real 2020 (000)	Real 2021 (000)
1	Produksi Hasil Benih ikan	Ekor	5.999	6.010	6.024	5.916	5.945	Produksi Hasil Budi daya	5.778	5.720
2	Pengembangan kemitraan	Klp	32	32	32	32	32		17	13
3	Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Budidaya	%	50	60	60	65	70		75	75
4	Minat Kelompok Usaha Perikanan	RTP	80	80	90	90	105		135	135

Upaya yang telah dilakukan yaitu :

- Peningkatan produksi benih melalui Balai Benih Ikan (BBI) dan kelompok UPR.
- Pengembangan kemitraan kelompok perikanan yang menjadi fokus perhatian dinas perikanan Kabupaten Gowa, dimana setiap kelompok pembudidaya ikan di wilayah kecamatan yang memiliki potensi yang sesuai untuk pengembangan perikanan, baik persawahan maupun kolam yang belum termanfaatkan setiap tahunnya mendapatkan bantuan bibit ikan air tawar dan pakan ikan.
- Pengembangan sumberdaya pembudidaya ikan dalam mengembangkan pengetahuan dan teknologi.

b. Perikanan Tangkap

Produksi ikan hasil tangkap tahun 2021 mengalami penurunan produksi bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Walau demikian peningkatan produksi dapat tercapai dan melebihi target yang ditetapkan sebesar 190,63%. Sejak dari tahun 2016 sampai akhir tahun 2021 berupa pelaksanaan restocking dalam mempertahankan populasi ikan sebagai sumberdaya perairan umum dan peningkatan pengawasan penangkapan ikan yang dilakukan secara bersama dengan kelompok-kelompok pengawas perikanan.

Produksi ikan hasil tangkap tahun 2021 mengalami penurunan produksi bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Walau demikian peningkatan produksi



dapat tercapai dan melebihi target yang ditetapkan sebesar 190,63%.

Upaya yang dilakukan sejak dari tahun 2016 sampai akhir tahun 2021 berupa pelaksanaan restocking dalam mempertahankan populasi ikan sebagai sumberdaya perairan umum dan peningkatan pengawasan penangkapan ikan yang dilakukan secara bersama dengan kelompok- kelompok pengawas perikanan. Adapun realisasi kinerja sejak tahun 2016 sampai tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.57
Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya terhadap pengelolaan perikanan tangkap

No	Indikator Kinerja	Sat	Kondisi 2016 (000)	Real 2017 (000)	Real 2018 (000)	Real 2019 (000)	Indikator Kinerja	Real 2020 (000)	Real 2021 (000)
1	Pelaksanaan Restocking	ekor		6.300	50	50	Produksi perikanan Tangkap	25	16
2	Persentase penegakan pengawasan	persen	100	100	100	100		100	100
3	Bantuan kapal dan peralatan tangkap	Unit	-	-	-	2		6	1

Tabel 2.58
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan standar Nasional Pada Produksi Hasil Perikanan 2.59

No	Target Produksi	Capaian Produksi Kabupaten Gowa		Target Kinerja Propinsi Sulawesi Selatan		Target Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan		Kontribusi Gowa secara nasional		Kab. (%)
		2020 (ton)	2021 (ton)	2020 (ton)	2021 (ton)	2020 (ton)	2021 (ton)	2020 (%)	2021 (%)	
1.	Produksi Hasil Perikanan	2265,6	2126,4	3,577 jt	3,863 Jt	26,46 Jt	27,89 Jt	0,085	0,076	

4. Tanaman Pangan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021

Tabel 2.60 : Pengukuran Capaian Kinerja terhadap Target Sasaran Meningkatnya Hasil Pertanian Tahun 2021:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah Produksi				
	- Padi	Ton	409.672	423.480	103.37
	- Jagung	Ton	255.632	306.281	119.81
	Jumlah Produktivitas				
- Kentang	Ton/Ha	21,25	22.75	107.06	
- Cabe	Ton/Ha	7	4,45	63.57	



Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah produksi tanaman pangan yakni produksi padi dan jagung telah melampaui target, dengan capaian 103,37% untuk padi dan 119,81% untuk jagung. Begitupun dengan produktivitas tanaman hortikultura yakni tanaman kentang dan cabai, produktivitas kentang yang ditargetkan mencapai 21,20 Ton/Ha terealisasi melampaui target sebesar 22,75 Ton/Ha atau mencapai 107,06%. Namun untuk komoditi cabai, produktivitasnya tidak mencapai target, dimana target produktivitasnya sebesar 7 Ton/Ha namun hanya terealisasi sebesar 4,5 Ton/ha dengan capaian 63,57 %.

Produksi Padi dan Jagung

Jumlah produksi dapat dihitung dengan menggunakan metode ubinan, dimana petugas lapangan (penyuluh pertanian) menentukan hasil panen dari luas ubinan. **Ubinan** adalah cara untuk melihat perkiraan hasil panen tanaman padi atau palawija melalui titik sampel dengan cara diukur dengan ukuran 2,5 x 2,5 m² yang kemudian hasilnya diukur dan ditimbang. Hasil inilah dapat dijadikan dasar dalam penentuan produksi dalam 1 Ha. Kemudian jumlah produksi dihitung dengan rumus:

Hasil ubinan x Luas Panen

Hasil perhitungan jumlah produksi padi untuk setiap kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel.2.61
Jumlah Produksi Padi per Kecamatan

No.	KECAMATAN	PADI		
		TANAM (Ha)	PANEN (Ha)	PRODUKSI (Ton)
1	Bontonompo	5.920,3	5.665,60	36.987
2	Bontonompo Selatan	3.854,1	3.664,70	27.841
3	Bajeng	8.633,3	9.045,50	58.795
4	Bajeng Barat	4.039,7	4.188,60	26.388
5	Pallangga	6.024,8	6.077,70	42.539
6	Barombong	4.034,8	3.978,00	25.859
7	Somba Opu	2.584,8	2.303,00	13.818
8	Bontomarannu	1.841,5	1.615,70	10.721
9	Pattallassang	3.930,4	4.144,70	21.216
10	Parangloe	1.971,4	2.111,50	12.669
11	Manuju	3.040,3	4.392,40	21.960
12	Tinggimoncong	2.432,8	2.403,40	12.015
13	Tombolopao	4.384,6	4.311,10	21.800
14	Parigi	2.088,0	2.014,50	11.077
15	Bungaya	4.213,1	3.037,40	16.703
16	Bontolempangan	3.944,7	4.334,60	23.987
17	Tompobulu	4.426,7	4.426,70	24.785
18	Biringbulu	2.219,2	2.864,90	14.320
	JUMLAH	69.584,5	70.580,00	423.480



Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Kecamatan yang sangat potensial untuk pengembangan tanaman padi adalah Kecamatan Bajeng dengan jumlah produksi sebesar 58.795 Ton. Total produksi padi seluruh kabupaten Gowa sebesar 423.480 Ton Untuk hasil perhitungan jumlah produksi komoditi jagung per kecamatan dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel.2.62
Jumlah Produksi Jagung per Kecamatan

No.	KECAMATAN	JAGUNG		
		TANAM (Ha)	PANEN (Ha)	PRODUKSI (Ton)
1	Bontonompo	1.315,90	1.969,5	7.895
2	Bontonompo Selatan	746,60	1.724,2	4.479
3	Bajeng	498,40	126,9	2.181
4	Bajeng Barat	15,00	15,0	0
5	Pallangga	203,10	24,6	677
6	Barombong	60,90	18,7	292
7	SombaOpu	0,00	0,0	0
8	Bontomarannu	1.845,40	1.558,3	8.634
9	Pattallassang	1.045,00	1.331,5	3.811
10	Parangloe	1.725,00	1.613,2	8.662
11	Manuju	2.929,30	3.352,0	17.191
12	Tinggimoncong	5,00	0,0	156
13	Tombolopao	122,00	61,0	480
14	Parigi	162,40	52,3	626
15	Bungaya	10.063,50	13.284,9	29.331
16	Bontolempangan	5.005,30	4.621,0	23.733
17	Tompobulu	5.786,50	5.800,0	33.055
18	Biringbulu	21.925,80	19.140,3	165.078
	JUMLAH	53.455,10	54.693,4	306.281

Produktivitas Cabai dan Kentang

Produktivitas Cabai dan Kentang dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

Jumlah Produksi dibagi dengan Luas Panen



Data luas tanam, luas panen dan jumlah produksi cabai dan kentang dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel.2.63
Jumlah Produksi Kentang per Kecamatan

NO	KECAMATAN	KENTANG		
		LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKSI (Kw)
1	Bontonompo	0	0	0
2	Bontonompo Selatan	0	0	0
3	Bajeng	0	0	0
4	Bajeng Barat	0	0	0
5	Pallangga	0	0	0
6	Barombong	0	0	0
7	SombaOpu	0	0	0
8	Bontomarannu	0	0	0
9	Pattallassang	0	0	0
10	Parangloe	0	0	0
11	Manuju	0	0	0
12	Tinggimoncong	1.736	1.559	340.076
13	Tombolopao	751	589	149.400
14	Parigi	0	0	0
15	Bungaya	5	3	120
16	Bontolempangan	0	0	0
17	Tompobulu	10	6	1.080
18	Biringbulu	0	0	0
	Jumlah	2.502	2.157	490.676

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah produksi kentang Kab. Gowa adalah 490.676 kw dengan luas panen 2157 Ha. Sehingga dapat diketahui bahwa produktivitas kentang Kab. Gowa Tahun 2022 adalah

$$\begin{aligned} &= \frac{490.676 \text{ kw}}{2157 \text{ Ha}} \\ &= 227,48 \text{ kw/Ha} \\ &= 22,75 \text{ Ton/Ha} \end{aligned}$$

Produktivitas cabai di Kabupaten Gowa, terbagi atas cabai besar cabai rawit, dan cabai keriting hasil perhitungan produksinya perkecamatan dapat dilihat sebagai berikut :



Tabel.2.64
Jumlah Produksi Cabai Besar, Cabai Rawit dan Cabai Keriting per Kecamatan

NO	KECAMATAN	CABAI BESAR		
		LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKSI (Kw)
1	Bontonompo	0	0	0
2	Bontonompo Selatan	5	3	22
3	Bajeng	7	5	65
4	Bajeng Barat	12	9	149
5	Pallangga	7	4	65
6	Barombong	1	1	10
7	SombaOpu	4	2	20
8	Bontomarannu	0	0	0
9	Pattallassang	31	29	1.022
10	Parangloe	37	23	1.497
11	Manuju	12	6	90
12	Tinggimoncong	21	19	750
13	Tombolopao	46	43	2.905
14	Parigi	45	40	2.156
15	Bungaya	5	3	45
16	Bontolempangan	16	10	356
17	Tompobulu	41	21	1.934
18	Biringbulu	7	4	75
	Jumlah	297	222	11.161

Berdasarkan table hasil produksi cabai besar di atas, dapat diketahui bahwa kecamatan yang paling potensial untuk pertanaman cabai besar adalah Kecamatan Tombolopao dengan jumlah produksi 2.905 kwintal. Total jumlah produksi komoditi Cabai besar Kab. Gowa adalah sebanyak 11.161 kw, dengan demikian produktivitas cabai besar dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \frac{11.161 \text{ kw}}{222 \text{ Ha}} \\ &= 50,27 \text{ kw/Ha} \\ &= 5,1 \text{ Ton/Ha} \end{aligned}$$

Sedangkan untuk cabai rawit dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.65

NO	KECAMATAN	CABAI RAWIT		
		LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKSI (Kw)
1	Bontonompo	14	11	227
2	Bontonompo Selatan	19	14	388
3	Bajeng	19	16	509
4	Bajeng Barat	9	11	229
5	Pallangga	1	13	375
6	Barombong	4	1	5
7	SombaOpu	15	12	304



8	Bontomarannu	9	5	54
9	Pattallassang	8	4	93
10	Parangloe	27	23	560
11	Manuju	21	19	400
12	Tinggimoncong	28	24	1.548
13	Tombolopao	30	27	1.576
14	Parigi	15	10	212
15	Bungaya	3	2	25
16	Bontolempangan	26	23	549
17	Tompobulu	19	15	1.268
18	Biringbulu	353	281	17.125
	JUMLAH	620	511	25.447

Berdasarkan tabel hasil produksi cabai rawit di atas, dapat diketahui bahwa kecamatan yang paling potensial untuk pertanaman cabai rawit adalah Kecamatan Biringbulu dengan jumlah produksi 17.125 kwintal. Total jumlah produksi komoditi Cabai rawit Kab. Gowa adalah sebanyak 25.447 kwintal, dengan demikian produktivitas cabai rawit dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \frac{25.447 \text{ kw}}{511 \text{ Ha}} \\ &= 49,79 \text{ kw/Ha} \\ &= 4,9 \text{ Ton/Ha} \end{aligned}$$

Tabel 2.66 : Untuk produksi cabai kriting dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

NO	KECAMATAN	CABAI KERITING		
		LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKSI (Kw)
1	Bontonopo	0	0	0
2	Bontonopo Selatan	0	0	0
3	Bajeng	0	0	0
4	Bajeng Barat	3	1	10
5	Pallangga	2	1	0
6	Barombong	1	1	0
7	SombaOpu	0	0	0
8	Bontomarannu	0	0	0
9	Pattallassang	0	0	0
10	Parangloe	2	1	15
11	Manuju	0	0	0
12	Tinggimoncong	4	2	0
13	Tombolopao	78	52	2.282
14	Parigi	0	0	0
15	Bungaya	0	0	0
16	Bontolempangan	0	8	130
17	Tompobulu	53	16	325
18	Biringbulu	0	0	0
	JUMLAH	143	82	2.762



Berdasarkan tabel hasil produksi cabai keriting di atas, dapat diketahui bahwa kecamatan yang paling potensial untuk pertanaman cabai keriting adalah Kecamatan Tombolopao dengan jumlah produksi 2.282 kwintal. Total jumlah produksi komoditi Cabai keriting di Kab. Gowa adalah sebanyak 2.762 kwintal, dengan demikian produktivitas cabai keriting dapat dihitung sebagai berikut :

$$= \frac{2.762 \text{ kw}}{82 \text{ Ha}}$$

$$= 33,68 \text{ kw/Ha}$$

$$= 3,4 \text{ Ton/Ha}$$

Dari ketiga tabel dan perhitungan produktivitas komoditi cabai di atas dapat dilihat bahwa produksi dan produktivitas cabai rawit adalah yang paling besar, kemudian cabai keriting dan cabai besar. Rata-rata jumlah produksi dan produktivitas ketiga cabai di atas sebesar 4,45 Ton/Ha.

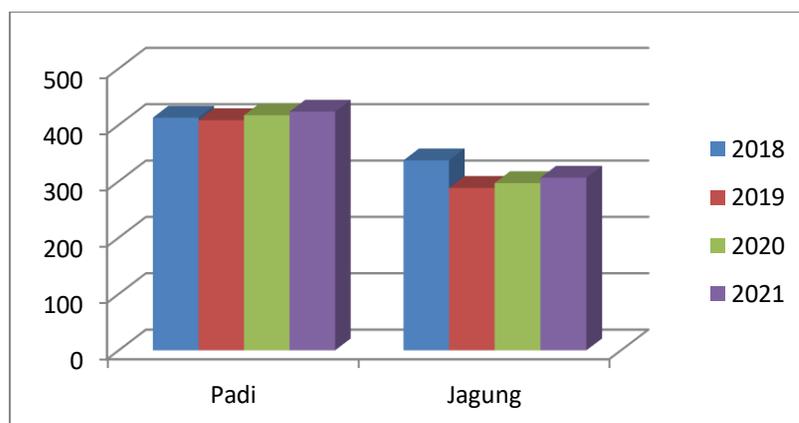
b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dan Beberapa Tahun Sebelumnya.

Tabel 2.67 :Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian			
			2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Produksi					
	- Padi	Ton	412.964	408.329	416.778	423.480
	- Jagung	Ton	337.174	288.200	296.846	306.281
	Jumlah Produktivitas					
- Kentang	Ton/Ha	21,15	21,17	21,20	22,75	
- Cabai	Ton/Ha	5,9	6,50	4,4	4,45	

Untuk lebih jelasnya, produksi tanaman pangan komoditi padi dan jagung dapat dilihat pada diagram di bawah ini :

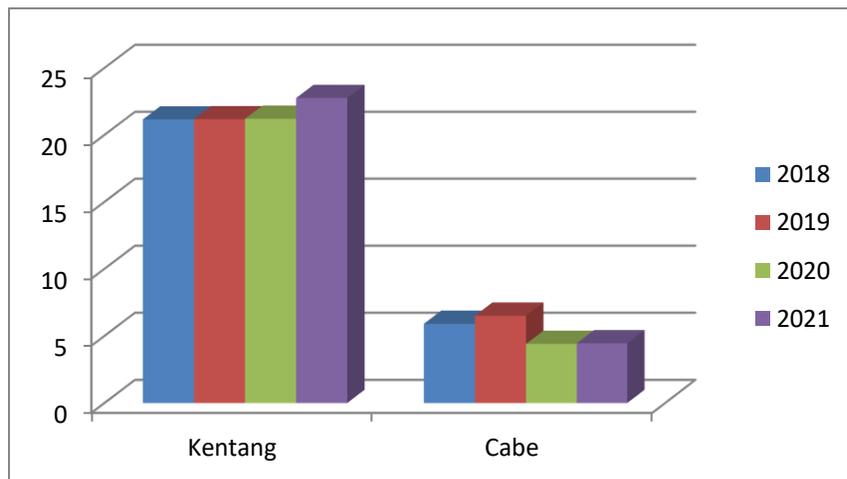
**Grafik 2.19
Perkembangan Produksi Padi dan Jagung**



Berdasarkan tabel dan diagram di atas dapat dijelaskan bahwa capaian produksi tanaman pangan komoditi padi dan jagung mengalami penurunan pada tahun 2018 ketahun 2019 karena adanya penurunan luas tanam akibat pengaruh iklim (El-Nino) meskipun demikian, target SKPD yang telah ditetapkan telah terlampaui. Pada tahun 2019 ke tahun 2021 capaian kinerja komoditi padi meningkat dari 408.329 Ton menjadi 423.480 Ton. Komoditi jagung dari 288.200 Ton menjadi 306.281



Grafik 2.20
Perkembangan Produksi Kentang dan Cabai



Capaian produktivitas tanaman hortikultura berdasarkan tabel dan diagram di atas dapat dijelaskan bahwa, komoditi kentang dari tahun 2018 sampai 2021 mengalami peningkatan meskipun jumlahnya tidak terlalu signifikan, yakni sebesar 21,15 Ton/Ha di Tahun 2018, Tahun 2019 sebesar 21,17 Ton/Ha dan di Tahun 2021 sebesar 21,20 Ton/Ha. Untuk komoditi cabai, pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan dari 5,9 Ton/Ha menjadi 6,5 Ton/Ha. Namun, pada tahun 2021 menurun dari 6,5 Ton/Ha menjadi 4,4 Ton/Ha dengan capaian sebesar 65% akibat pandemi yang menyebabkan petani beralih ke komoditi yang harganya lebih menjanjikan, dan pada tahun 2021 hanya mencapai 4,45 Ton/Ha yang diakibatkan oleh intensitas hujan yang tinggi sehingga banyak pertanaman cabai yang gagal panen.

Tabel 2.68 :Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah :

No	Indikator kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2021	%Capaian
1.	Jumlah Produksi				
	- Padi	Ton	409.672	423.480	101,73
	- Jagung	Ton	255.101	306.281	116,36
	Jumlah Produktivitas				
- Kentang	Ton/Ha	21,25	22,75	99,76	
- Cabai	Ton/Ha	7	4,45	62,85	

Berdasarkan tabel perbandingan capaian indikator kinerja Jumlah Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan kondisi kinerja target jangka menengah maka dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk produksi tanaman pangan komoditi padi dan jagung telah melampaui target jangka menengah renstra. Capaian produksi untuk komoditi padi sebesar 101.73% dan capaian komoditi jagung sebesar 116,36% dari target yang telah ditetapkan.



Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional

Kabupaten Gowa adalah salah satu daerah yang menjadi lumbung pangan di Sulawesi Selatan, sehingga jumlah produksi tanaman pangan sangat berpengaruh pada jumlah pasokan ketahanan pangan provinsi maupun nasional. Tujuan dan Sasaran kinerja Kementerian Pertanian dalam Rencana Strategi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 diantaranya adalah meningkatnya ketahanan pangan strategis dalam negeri. Target yang ditetapkan pemerintah pusat untuk produksi padi nasional pada tahun 2021 adalah sebesar 55,27 Juta Ton, sehingga jika dibandingkan dengan capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa tahun 2021, dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Tabel 2.69
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional

No	Indikator Kinerja	Nasioanl	Kabupaten Gowa	Capaian
1.	Jumlah produksi padi	55,27 Juta Ton	423.480 Ton	0,76%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui target jumlah produksi padi nasional tahun 2021 adalah sebesar 55,27 juta ton dan jumlah produksi padi Kabupaten Gowa sebesar 423.480 ton, dengan capaian 9,76% dari target nasional

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja : - *Produksi Tanaman Pangan*

Komoditi Padi dan jagung merupakan komoditi andalan di Kabupaten Gowa yang hasil produksinya di harapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam Kabupaten Gowa tetapi juga mampu menyuplai kebutuhan daerah di sekitarnya terutama Kota Makassar. Hal ini menjadikan hasil produksi komoditi padi dan jagung menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Pada Tahun 2021 hasil produksi padi mencapai 423.480 ton dan produksi jagung sebesar 255.632 ton, hasil produksi ini melebihi target yang telah di tetapkan, dengan capaian kinerja masing-masing 103,37% untuk komoditi padi, dan 119,81% untuk komoditi jagung.

Keberhasilan tersebut karena adanya dukungan bantuan sarana dan prasarana pertanian yang diberikan, yakni pemberian benih bermutu, pemakaian pupuk yang berimbang dan pembangunan berbagai prasarana pertanian seperti embung, dam parit, jalan usahatani, jalan irigasi dan lain-lain. .Selain itu, keberhasilan ini tidak terlepas dari peran Sumber Daya Manusia Pertaniannya yakni peran Penyuluh Pertanian dan perilaku petani itu sendiri yang siap menerima inovasi baru yang diberikan, olehnya peningkatan keterampilan dan pengetahuan petani juga sangat diperhatikan dengan memberikan pelatihan dan penyuluhan yang intensef melalui peran penyuluh pertanian lapangan yang tersebar di setiap desa.

Peran kelembagaan petani sebagai wadah petani dalam menyelesaikan masalah usaha taninya juga merupakan satu hal yang menjadi faktor pendukung keberhasilan capaian produksi Dinas Tanaman Pangan dan



Hortikultura, terlebih perhatian dari pemerintah pusat dengan adanya program Komando Strategis Pembangunan Pertanian yang merupakan pusat gerakan yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian melalui koordinasi, sinergi, dan penyelarasan kegiatan pembangunan pertanian di kecamatan. Terkait dengan hal tersebut, secara teknis para penyuluh pertanian di BPP akan diperkuat dengan kemampuan dalam mengidentifikasi potensi, menggali, menganalisis dan menyajikan data dan informasi pertanian. Data dan Informasi disajikan melalui media digital yang mampu menggambarkan kondisi lapangan seperti memprediksi kapan waktu panen, posisi standing crop, serangan hama penyakit dan cara pengendaliannya, teknologi budidaya, peluang dan informasi dinamika pasar dalam dan luar negeri, sampai dengan informasi pergerakan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) dan lain-lain .

Selain faktor di atas, terdapat faktor yang tidak dapat dikendalikan yakni faktor alam, namun dampaknya dapat diminimalisir dengan adanya teknologi. Pada tahun 2021 curah hujan pada akhir tahun mengalami peningkatan, hal ini memberikan dampak positif pada pertanaman padi dan jagung dimana pada beberapa daerah pertanaman yang dilakukan oleh petani sampai pada pertanaman IP300 (3 kali tanaman dalam setahun) sehingga produksi tanaman pangan khususnya padi dan jagung dapat meningkat.

- Produktivitas Hortikultura

Komoditi kentang dan cabai adalah komoditi andalan hortikultura di Kabupaten Gowa, hal ini dikarenakan Kabupaten Gowa yang memiliki topografi mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi, menjadikan Kabupaten Gowa tidak hanya menjadi sentra untuk tanaman padi dan palawija, tetapi juga menjadi sentra produksi tanaman hortikultura terutama kentang dan cabai. Kedua komoditi ini menjadi komoditi andalan yang diminati oleh petani untuk dikembangkan karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan sangat cocok dengan iklim di Kabupaten Gowa. Produktivitas kentang ditahun 2021 mencapai 22,75 Ton/Ha, capaian produksi ini telah melampaui target yang telah ditetapkan yakni 21,25 Ton/Ha atau terpenuhi dengan capaian kinerja 107,6%.

Meskipun pada tahun ini kembali terjadi refocusing anggaran yang berdampak pada berkurangnya dana/anggaran yang dikelola Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, namun tidak mengurangi kinerja Dinas untuk melakukan pembinaan kepada para petani, dengan alokasi anggaran yang kurang, namun target yang telah ditetapkan dapat tercapai bahkan melampaui target, keberhasilan ini kembali disebabkan karena petani menggunakan bibit kentang yang berkualitas sesuai dengan anjuran yang diberikan. Peran penyuluh pertanian dalam memberikan penyuluhan dan inovasi serta penanganan hama dan penyakit tumbuhan secara intensif juga adalah kunci keberhasilan dari pencapaian target kinerja ini.

Selain itu, stabilitas harga kentang di pasaran yang cenderung stabil dan semakin besarnya tuntutan kualitas kentang yang diinginkan oleh perusahaan yang menjadikan kentang sebagai bahan bakunya, menjadikan petani kentang semakin bersemangat untuk memperbaiki kualitas hasil usaha taninya. Hal ini tentu sangat berdampak terhadap peningkatan produksi dan produktivitas tanaman kentang.



Untuk komoditi unggulan kabupaten Gowa lainnya yakni Cabai, selama dua tahun terakhir mengalami penurunan produksi dan produktivitas. Mulai dari tahun 2021 yang sangat merosot dari produktivitas sebesar 6,65 Ton/Ha di Tahun 2019 menjadi 4,4 Ton/Ha di tahun 2021 dan pada tahun 2021 sebesar 4,45 Ton/Ha, dimana pada tahun 2021 Komoditi hortikultura termasuk cabai adalah komoditi yang paling terdampak akibat adanya pandemi covid-19, hal ini disebabkan karena turunnya permintaan dan terganggunya jalur distribusi. Karena menurunnya permintaan, maka harga cabai pun anjlok dan petani beralih untuk menanam komoditi lain yang lebih menjanjikan. Hal ini menyebabkan berkurangnya luas tanam sehingga jumlah produksi pun menurun.

Pada tahun 2021, seiring dengan membaiknya kondisi akibat covid-19, petani mulai kembali untuk menanam cabai dan di awal tahun produksi cabai sempat mengalami kestabilan baik dari segi harga maupun produksi, namun iklim yang tidak bisa diprediksi kembali mengganggu proses usahatani cabai, karena curah hujan akan sangat menentukan hasil produksi dari cabai.

Di akhir tahun kebanyakan cabai mengalami kerusakan karena La Nina yang sangat kuat, La Nina adalah kondisi dimana Suhu Muka Laut (SML) di Samudera Pasifik bagian tengah mengalami pendinginan di bawah kondisi normalnya. Pendinginan Suhu Muka Laut (SML) ini mengurangi potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik tengah dan meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia secara umum.

Tingginya curah hujan mengakibatkan kerusakan pada usaha tani cabai sehingga hasil produksi dan produktivitas menurun drastis. Hal ini secara otomatis juga berdampak pada harga cabai dipasaran yang mengalami peningkatan tajam.

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Tabel 2.70 : Efisiensi penggunaan sumber daya

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi/ Inefisiensi
1	Meningkatnya Produksi Kakao	77.05	93.16	Efisiensi {12.64}
2	Meningkatnya produksi kopi	92.04		
3	Meningkatnya produksi sapi potong	101.57		
4	Meningkatnya produksi perikanan	141		
5	Meningkatnya produksi padi	103.37		
6	Meningkatnya produksi jagung	119.81		
	Rata - rata Capaian		105.80	

**e. Analisis Penggunaan Anggaran :****Tabel. 2.71 :** Pengukuran Anggaran Sasaran Meningkatnya Petumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian:

Program dan Kegiatan	Anggaran		
	Target	Realisasi	%
Program Penyediaan & Pengembangan sarana pertanian/Pengembangan sumber daya genetic {SDG} hewan, tumbuhan dan mikroorganisme kewenangan kab/kota	171.125.800	76.625.000	44.76
Program penyediaan & pengembangan sarana pertanian/ Pembangunan rehabilitasi & pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	665.000.000	665.000.000	100
Program pengendalian Kesehatan & Kesehatan masyarakat veteriner/Pengendalian & penanggulangan penyakit hewan & Zoonosis	113.230.500	113.068.000	99.86
Program Pengelolaan Perikanan Tagkap/Pengelolaan Pembudidaya Ikan	314.954.000	314.564.700	99.88
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya/enjamin Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	355.413.500	349.636.750	98.37
Program Pengawasan sumber daya kelautan & perikanan/ Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten /Kota	12.354.000	12.354.000	100
Program Penyediaan & Pengembangan Prasarana Pertanian/ Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B, dan Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan / LCP2B	13.140.000	13.140.000	100
Program Penyediaan & Pengembangan sarana pertanian/ Pengawasan penggunaan saraa pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi	712.480.000	681.230.000	95.61
Program Penyediaan & Pengembangan Prasarana Pertanian/Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	950.000.000	950.000.000	100
Jumlah	3.207.697.800	3.175.618.450	93.16

Berdasarkan tabel tersebut diatas, menunjukkan bahwa capaian kinerja 105.80% lebih besar daripada realisasi anggaran 93.16%. Terdapat efisiensi sebesar 12.64% (realisasi kinerja - realisasi anggaran) berarti penggunaan anggaran berdampak signifikan terhadap target kinerja yang diharapkan.

f. Permasalahan dan Alternatif Solusi.**- Peternakan**

1. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan untuk mengembang tugas dengan jangkauan wilayah yang luas dan tersebar



2. Belum maksimalnya kesadaran masyarakat peternak dalam pemanfaatan teknologi inseminasi buatan
 3. Terbatasnya data identifikasi lahan Hijauan Pakan Ternak (HPT) baik yang sudah ditanami/berproduksi maupun lahan potensial
 4. Adanya rasa ketakutan yang tinggi dari masyarakat peternak sapi tentang kegagalan beternak akibat kematian dan pencurian
 5. Kesadaran kelompok untuk memanfaatkan teknologi yang diberikan masih rendah
 6. Rendahnya tingkat perguliran atau redistribusi ternak bantuan pemerintah
- **Perkebunan**
1. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang terutama dalam kebutuhan pupuk tanaman
 2. Masih rendahnya pendanaan yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan di Bidang Sarana, Prasarana dan penerapan teknologi perkebunan
 3. Masih rendahnya SDM petani didalam menerapkan teknologi perkebunan
 4. Kesadaran petani dalam pengolahan hasil yang sesuai dengan teknis/standar masih minim
 5. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia ditingkat petani/masyarakat
 6. Kualitas/mutu produksi perkebunan masih rendah
 7. Tenaga terampil dalam penerapan teknologi perkebunan masih kurang
 8. Standar harga komoditi perkebunan masih sering dipermainkan pedagang ditingkat petani
- **Perikanan**
1. Sedangkan yang menjadi penghambat dalam pencapaian target kinerja/produksi yang ingin dicapai adalah (1). ketersediaan lahan pengembangan serta dana operasional pengembangan; (2) ketersediaan produksi benih ikan yang bermutu dan berkualitas; (3) Keterbatasan tenaga pengelola BBI yang hanya berjumlah sebanyak 1 - 2 orang dengan status sebagai tenaga honorer; (4) Ketersediaan pakan serta mahalnya biaya pakan.
- **Pertanian**
1. Kurangnya SDM petani sehingga hasil produksi pertanian lebih maksimal.
 2. kuantitas bantuan sarana dan prasarana masih belum bisa memenuhi seluruh permintaan dari kelompok tani karena adanya keterbatasan anggaran.

Solusi/Pemecahan Masalah :

- **Peternakan**
1. Mengikutsertakan aparat dalam berbagai pelatihan dan bimbingan teknis sesuai dengan bidang tugas masing-masing
 2. Dibutuhkan sosialisasi yang makin terfokus secara kontinyu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan instansi terkait termasuk tenaga-tenaga penyuluh.
 3. Perlu kegiatan pendataan bidang peternakan yang lebih baik, terstruktur yang didukung dengan kesiapan dana dan sumber daya petugas pendata.
 4. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kelompok dalam memanfaatkan teknologi peternakan melalui studi banding.



5. Meningkatkan kapasitas pelayanan dengan memaksimalkan efektifitas fasilitas pelayanan kesehatan hewan pada daeran yang rawan muncul penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut aktif dalam mencegah munculnya penyakit hewan menular strategis.
6. Penyebarluasan informasi serta promosi komoditas unggul melalui pameran, brosur dan media lainnya.

- **Perkebunan :**

1. Melakukan pengendalian hama dan penyakit tanaman dengan prinsip Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLHPT)
2. Terus dilakukan pengkawasan ke lahan petani secara berkesinambungan
3. Diupayakan adanya penambahan sarana penunjang setiap tahunnya
4. Perlu pendanaan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan
5. Program pendidikan dan pelatihan perlu diadakan di tingkat kelompok tani.
6. Bimbingan teknis pengolah hasil perkebunan harus ditingkatkan
7. Penambahan sarana dan prasarana yang menunjang hasil perkebunan perlu ditambah
8. Melakukan pembinaan dan pendampingan mengenai kualitas mutu produk perkebunan secara kontinyu
9. Pedagang dalam penentuan harga yang menguntungkan kedua belah pihak.

- **Perikanan**

1. Pendataan potensi-potensi perikanan di setiap wilayah desa/kelurahan, yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi wilayah-wilayah pengembangan perikanan, serta mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam memanfaatkan potensi-potensi yang ada untuk usaha pengembangan perikanan
2. Menyediakan tenaga yang cukup, fasilitas BBI secara memadai, utamanya penyediaan sarana produksi yang mendukung, agar peran BBI sebagai sumber penghasil benih ikan akan lebih aktif dalam menghasilkan benih yang baik dan berkualitas.
3. Membentuk kelembagaan BBI lebih professional dalam mengembangkan sistem perbenihan yang lebih menguntungkan, dengan cara penerapan CBIB yang baik dan benar.
4. Melakukan sosialisasi secara intensif terkait dengan cara pemeliharaan ikan secara baik dan menguntungkan disetiap masyarakat pembudidaya ikan.
5. Melakukan kerjasama dengan aparat desa dan kelurahan dalam pemanfaatan lahan-lahan yang potensial pengembangan budidaya perikanan.
6. Melakukan pengkajian teknologi budidaya ikan dalam menghasilkan varietas ikan yang pertumbuhannya cepat dan murah dalam pemeliharaan.

- **Pertanian :**

1. Melakukan penambahan anggaran bidang pertanian
2. melakukan pengamatan pada tahapan proses penanganan pasca panen. Hasil penelitian dari tim peneliti Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen menunjukkan bahwa dengan perbaikan penanganan pasca panen, kehilangan hasil dapat ditekan hingga mencapai 5,9% . Pada tahun 2019,



- penanganan pasca panen tidak hanya dilakukan dengan perbaikan pada proses tetapi juga pada penggunaan teknologi pasca panen yang semakin modern.
- Melakukan bimtek kepada kelompok/pelaku usaha sehingga dapat mengukur keterampilan pelaku usaha dalam pengolahan hasil pertanian. Dengan adanya pengolahan hasil diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah hasil usaha pertanian yang diperoleh.

Sasaran 11. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri dan Perdagangan.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri dan Perdagangan.

Tabel 2.72 : Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekpnomi Sektor Industri dan Perdagangan.

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai PDRB sektor industri pengolahan	Rupiah	850.000.000		
2	Nilai PDRB sektor perdagangan	Rupiah	1.600.000.000		
	Rata - rata				

Sumber data :BPS tahun.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya:

Tabel 2.73: Nilai PDRB Sektor Perdagangan :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi dan Capaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Rp/%	2.116.438.000.000 (169 %)	2.425.945.000.000 (180 %)	2.745.923.000.000 (183 %)	2.714.680.000.000 [169,67}	

Tabel : 2.74 : Nilai PDRB Sektor Industri

No.	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi dan Capaian %				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai PDRB Sektor Industri	Rp/%	1.154.818.000.000 (164,97)	1.240.118.000.000 (165,35)	1.420.321.000.000 (177,54)	1.353.250.000.000 (159,21)	



c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan :

Sub indikator yang mendukung sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor industri dan perdagangan adalah nilai ekspor dan pembinaan kelompok perdagangan. Walaupun nilai PDRB sektor perdagangan dan sector industry mencapai target tapi karena perubahan kondisi ekonomi dunia yang melemah akibat pandemic 19 maka realisasi PDRB sector perdagangan sebesar Rp. dan PDRB sector industri sebesar Rp. masih ditingkatkan dari realisasi tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari sub Indikator nilai ekspor bersih dan cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal.

Tabel 2.75 : Perbandingan antara target dan realisasi indikator nilai ekspor bersih dan bina kelompok pedagang :

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Nilai Ekspor Bersih	USD	3.500.000	3.111.129	88.89
Cakupan Bina Kelompok Pedagang / Usaha Informal	%	85	85,79	100.9

Dari hasil capaian indikator kinerja pada nilai ekspor bersih, dapat dijelaskan bahwa target indikator kinerja belum tercapai disebabkan karena kondisi yang dialami saat ini yaitu mengalami situasi pandemic Covid-19, sehingga menyebabkan pengusaha eksportir mengalami kesulitan dalam mengespor barangnya hal ini disebabkan :

1. Mahalnya biaya angkut Kontainer yang mengalami peningkatan sampai 200 % dari harga biasanya.
2. Masih banyaknya negara-negara tujuan ekspor yang melakukan lockdown pada guna memutuskan rantai penyebaran covid-19 pada negaranya.
3. Penyesuaian terhadap perubahan kebijakan ekspor impor yang masih kurang dipahami oleh pelaku usaha ekspor impor, pemberlakuan MEA yang menuntut perlunya terobosan pasar baru bagi para eksportir dan importir serta masih kurangnya promosi melalui kegiatan misi dagang dan pameran produk unggulan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pembinaan kelompok usaha tidak mencapai target karena adanya reconfusing anggaran akibat Covid-19 terhadap pembangunan pasar dimana sebagian besar pedagang kaki lima tersebut akan ditampung pada pasar yang akan dibangun pada tahun ini. Yang awal perencanaan akan dibangun 2 pasar, karena reconfusing tinggal 1 pasar saja yang terbangun.

Pada sektor industri PDRB Kab.Gowa targetnya Rp.1.600.000.000 lebih rendah dari realisasi sebesar Rp..... Hal tersebut didukung oleh subsector meningkatnya pertumbuhan industry kecil dan menengah.



Tabel 2.76 :Perbandingan antara target dan realisasi Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah {IKM} :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Dan Menengah (IKM)	Pertumbuhan Industri Kecil Dan Menengah (IKM)	Persen	13	14,21	109

Dari sub indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini. Tetapi secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Dan Menengah (IKM) ini telah berhasil melampaui target yaitu dengan capaian 109 persen.

Gambar 2.2 Foto Pengawasan distribusi barang :



d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 2.77 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi sector Industri dan Sektor Perdagangan.

No	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Realisasi Anggaran	Efisiensi
1.	Nilai PDRB Sektor Perdagangan dan sektor Industri			

**e. Analisis program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja**

- **Tabel 2.78:** Pengukuran Program Kinerja dan Anggaran Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri dan Perdagangan :

Program dan Kegiatan	Anggaran		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri/ Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan sarana dan Prasarana Industri	200.609.018	199.942.000	99,67
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri /Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan industri serta Peran Serta Masyarakat	33.602.750	26.880.250	79.99
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan/ Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagagn Masyarakat di Wilayah Kerjanya	103.290.740	103.290.740	100
Program Pengembangan Ekspor/ Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor	79.057.500	79.057.500	100
Program Pengembangan Ekspor/	5.310.000	5.310.000	100
Jumlah	421.870.008	414.480.490	98,25

Berdasarkan tabel tersebut diatas, menunjukkan bahwa capaian kinerja % lebih besar daripada realisasi anggaran %. Terdapat efisiensi sebesar % (realisasi kinerja - realisasi anggaran) berarti penggunaan anggaran berdampak signifikan terhadap target kinerja yang diharapkan.

f. Permasalahan dan solusi :

Kondisi ekonomi global yang tidak menentu akibat pandemi covid - 19 yang memberikan pengaruh besar pada sector perdagangan dan industri sehingga PDRB sektor perdagangan dan sektor industry melebihi target yang ditetapkan namun sumbangan PDRB sektor tersebut tidak semaksimal apabila tidak ada pandemic tersebut.

Solusi :

pengembangan IKM yang sudah ada dengan memberikan berbagai pelatihan, pembinaan serta terus menerus dan berkelanjutan dan pemberian peralatan, informasi pasar, menumbuhkan jumlah wirausahabaru, peningkatan keterkaitan IKM dengan industri besar dan sector ekonomi lainnya, fasilitasi permasalahan (klinik bisnis) serta mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif.

**Sasaran 12: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata.****a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata.****Tabel 2.79:**

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai PDRB Sektor Pariwisata	Rupiah	381.079.000.000		

Belum ada realisasi BPS

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun sebelumnya :**Tabel :2.80 :**

Lapangan Usaha	Capaian (Rp)				
	2017	2018	2019		
			Target	Capaian	Capaian (%)
Nilai PDRB sektor pariwisata	417.351.000,00	467.965.000,00	355.000.000,00	517.149.000,00	145

Sumber: BPS Gowa

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan :

Kabupaten Gowa dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Provinsi Sulawesi Selatan. Perkembangan pariwisata Kabupaten Gowa ditopang oleh ketersediaan dan variasi produk wisata khususnya wisata budaya yang antara lain istana Balla Lompoa, Makam Sultan Hasanuddin, Makam Syeh Yusuf dan beberapa cagar budaya lainnya dan alam antara lain Destinasi wisata Malino dan obyek wisata alam yang tersebar di beberapa kecamatan. Event Beautiful Malino berpartisipasi mendongkrak jumlah wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan manca negara.

Meningkatkan usaha kepariwisataan yang unggul berbasis potensi lokal dan ekonomi kerakyatan, meningkatkan pengembangan kawasan wisata dan hiburan, dan meningkatkan kualitas manajemen pemasaran dan promosi wisata. Hal tersebut dapat memberi kontribusi pada nilai PDRB kepariwisataan Kab.Gowa. Hanya saja kondisi pandemic Covid 19 membawa pengaruh langsung pada sector pariwisata yang mempengaruhi nilai PDRB Kab.Gowa.

Nilai PDRB sector pariwisata didukung oleh jumlah kunjungan wisata dan brapa lama wisatawan tersebut tinggal, aktraksi seni budaya yang ditampilkan, dan jumlah benda cagar budaya yang dipelihara. Tahun 2020 kunjungan wisata di Kab.Gowa mengalami penurunan yang berkontribusi dalam PDBR sector pariwisata. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.81: Sub indikator yang mendukung indikator Nilai PDRB sektor Pariwisata:

Sub Indikator	Target Tahun 2020	Realisasi Thn 2020	Capaian Thn 2020	Realisasi Thn 2021	Capaian Thn 2021	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
Jumlah Kunjungan Wisatawan (Org)	127.092	97.622	78%			Kunjungan Wisatawan Tidak mencapai target diakibatkan pandemi covid 19 yang berdampak pada penutupan usaha-usaha kepariwisataan, PSBB tingkat lokal dan dampak ekonomi
Lama Kunjungan Wisatawan (Hari)	1,50	1,50	100%			Lama Kunjungan Wisatawan Sesuai dengan target, hal ini sesuai dengan data dari sektor akomodasi
Jumlah BCB yang dipelihara	93 BCB	493 BCB	530%			Pemeliharaan 493 BCB dalam bentuk pemeliharaan dan perawatan kecil seperti pembersihan dan pembuatan tempat koleksi benda yang representatif
Jumlah Atraksi Seni dan Budaya Yang Dipentaskan	12 Kali	6 Kali	50%			Pelaksanaan atraksi seni dan budaya belum sesuai terget diakibatkan adanya kebijakan refocusing anggaran dan pembatasan kegiatan sosial
Rata-rata Capaian (%)			189,5			

Tabel 2.82: Kondisi kunjungan wisata tahun 2015 - 2021

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Kunjungan Wisatawan	Orang	93.997	180.988	234.706	212.773	264.045	97.622	

Tabel 2.83 : Perbandingan Realisasi Kinerja 2020 dengan standar nasional

Indikator Sasaran	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Target Standar Nasional	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah Kunjungan Wisatawan	127.092 Org	97.622 Org	18 Juta Org	Persentase mencapai 0,07% dari jumlah kunjungan wisatawan pada Kabupaten Gowa
Lama Kunjungan Wisatawan	1,50 Hari	1,50 Hari	10 Hari	Persentase mencapai 0,06% dari jumlah kunjungan wisatawan pada Kabupaten Gowa
Jumlah BCB yang dipelihara	93 BCB	493 BCB	-	Tidak Ada Standar Nasional
Jumlah Atraksi Seni dan Budaya yang Dipentaskan	12 Kali	6 Kali	-	Tidak Ada Standar Nasional



Tabel 2.84: Target dan Realisasi sub indikator pendukung indikator Nilai PDRB Sektor Pariwisata :

Indikator Sasaran	Satuan	Target Thn 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Capaian [%]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	127.092	97.622	76
Lama Kunjungan Wisatawan	Hari	1,50	1,50	100
Jumlah BCB yang dipelihara	Obyek	93	493	530
Jumlah Atraksi Seni dan Budaya yang Dipentaskan	Kegiatan	10	6	60

Penyebab utama adanya penurunan kunjungan wisatawan pada tahun 2020 yaitu adanya kebijakan penutupan tempat wisata akibat pandemi covid 19. Hal tersebut juga terjadi pada jumlah usaha yang dibina dan jumlah atraksi seni dan budaya yang dipentaskan, dimana terjadi penurunan kegiatan akibat refocusing anggaran akibat kebijakan pencegahan wabah covid 19.

Peningkatan kompetensi SDM pariwisata dalam bentuk pelatihan mengalami peningkatan pada tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya karena adanya dukungan alokasi anggaran DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisatahan tahun anggaran 2019 dan 2020. Untuk jumlah pelatihan peningkatan kompetensi masyarakat kepariwisatahan pada tahun 2020 tidak terealisasi dikarenakan adanya pemotongan anggaran DAK akibat kebijakan pencegahan wabah covid 19 dari Kementerian Pariwisata.

Pada indikator jumlah BCB yang dipelihara pada tahun 2020 dan 2019 mengalami peningkatan capaian. Penyebab peningkatan yaitu akibat adanya alokasi anggaran DAK Museum dan Taman Budaya. Dengan hal ini, kegiatan pemeliharaan dan perawatan koleksi benda cagar budaya bertambah dan dilaksanakan sesuai menu yang berhubungan pemeliharaan benda cagar budaya.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya dari target 12 kali yang terealisasi dengan jumlah 6 kali penyelenggaraan festival seni dan budaya, realisasi capaian sebesar 50%. Penyebab tidak terealisasinya data penyelenggaraan festival seni dan budaya ini dikarenakan adanya kebijakan pencegahan penyebaran wabah Covid 19 (corona) khususnya di Kabupaten Gowa. Hal lain yang menjadi penyebab yaitu adanya pemotongan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan wabah Covid 19 (Refocusing anggaran).

Dengan adanya penurunan jumlah wisatawan pada tahun 2020 dapat mengakibatkan pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha, kelompok akomodasi, makanan minuman dan tempat hiburan mengalami kontraksi yang akhirnya mengalami penurunan.

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 2.85 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata :

No	Indikator Kinerja	Capaian 2020	Realisasi Anggaran	Efisiensi
1.	Nilai PDRB Sektor Pariwisata			



e. Analisis program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Tabel 2.86 : Pengukuran Program Kinerja dan Anggaran Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata :

Program dan Kegiatan	Anggaran		
	Target	Realisasi	Capaian (%)

f. Permasalahan dan Solusi Pemecahannya :

Jumlah personil Dinas Pariwisata dan Kebudayaan secara kualitas dan kuantitas masih kurang memadai dan kurangnya SDM yang menguasai secara teknis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing;

Solusi :

1. Meningkatkan kualitas SDM dengan diikutkan pada diklat-diklat teknis;
2. Mengusulkan penambahan pegawai sesuai kualifikasi yang dibutuhkan;

Sasaran 13 : Meningkatnya Kapasitas Infrastuktur Daerah

Sasaran sebelumnya meningkatkan kapasitas infrastruktur perhubungan dan pengairan berubah pada IKU Kabupaten Gowa tahun 2020 menjadi Sasaran meningkatnya kapasitas insfraktur daerah dengan indikator rasio Panjang jalan dengan jumlah penduduk, rasio jaringan irigasi dan presentase rumah tangga bersanitasi.

a. Perbandingan Antara target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kapasitas Infrastuktur Daerah :

Tabel 2.87 : Indikator Sasaran Meningkatnya Kapasitas Infrastuktur Daerah :

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Capaian Tahun 2020 (%)	TAHUN 2021			Kinerja (Naik/ Turun)
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Rasio Panjang jalan dengan jumlah penduduk	Persen	100	0.31	0.32	103	
2	Rasio jaringan irigasi	Persen	100.72	90.16	82.3	91	
3	Presentase rumah tangga bersanitasi	Persen	100	80.20	51.65	64	
Rata - rata Capaian				86			

Sumber data : Dinas PU dan Penataan Ruang Kab.Gowa dan Dinas Perhubungan Tahun 2021



b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya Sasaran Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Daerah :

Tabel 2.88 : Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur, Perhubungan Dan Pengairan

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Kondisi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Rasio Panjang jalan dengan jumlah penduduk	(%)	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32	0.31	0.32
2	Rasio jaringan irigasi	%	73.19	80.15	84	87.72	90.48	90.81	82.3
3	Persentase RT bersanitasi	%	50.2	50.39	50.43	51.02	51.20	51.49	51.65

Sumber data : Dinas PU dan Penataan Ruang Kab.Gowa,2021

Tabel 2.89 : Tingkat Kemantapan Jalan

Indikator Kinerja	Panjang Jalan Kabupaten (KM)	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021
Tingkat Kemantapan Jalan	2.396,53	131.269	226.87	111,71	1.975	Rasio Panjang jalan dengan jumlah penduduk	0.31	0.32

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Solusi yang Telah Dilakukan :

Capaian realisasi indikator kinerja pada tahun 2021 dari 3 (tiga) indikator kinerja. Rata - rata capaian sebesar 86 % berkinerja **Tinggi**.

1. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah penduduk

Rasio Panjang jalan dengan jumlah penduduk didukung oleh sub indikator tingkat kemantapan jalan dan jalan yang dibangun.

Tabel : 2.90 :

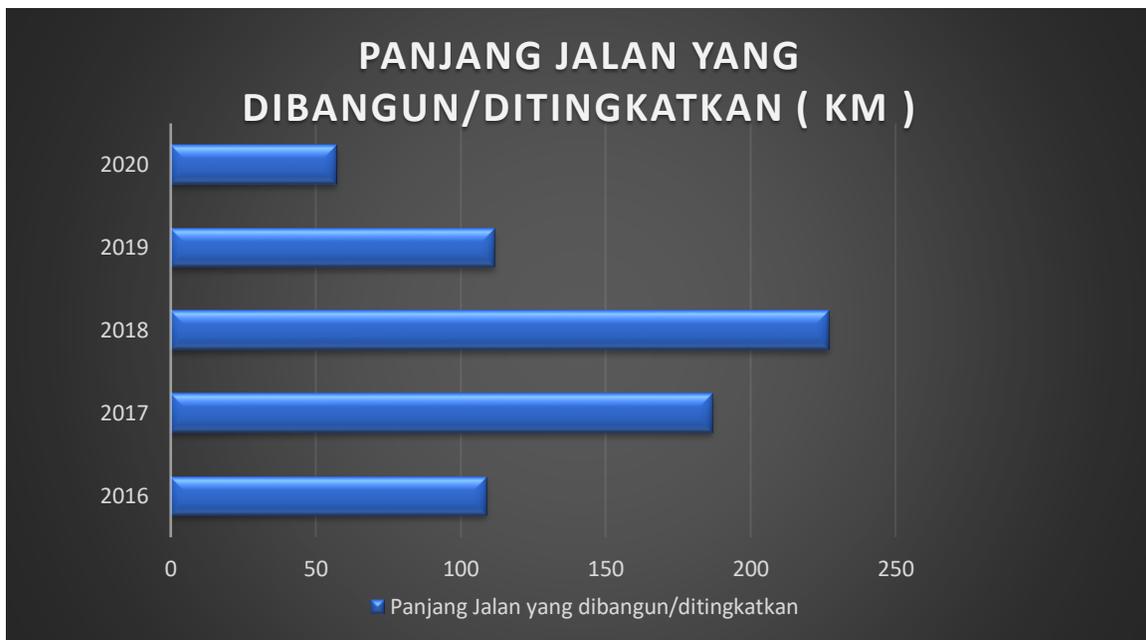
NO.	SUB INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Ruas jalan yang terpelihara	Ruas	30	30	100%
2	Jumlah Unit Jembatan yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	5	5	100%
3	Jumlah Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kegiatan	1	1	100%
4	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Perencanaan Penyelenggaraan jalan dan jembatan	Dokumen	1	1	100%
5	Panjang Jalan Aspal, Jalan Beton dan Perkerasan yang dibangun/ ditingkatkan	KM	239	163	44%
6	Jumlah Jembatan yang dibangun	Unit	4	3	75%

Rasio Panjang jalan dengan jumlah penduduk belum mencapai target 100% dikarenakan dana PEN untuk pembangunan jalan tidak terealisasi atau tidak cair pada tahun 2021 sehingga realisasi dari indikator ini hanya mencapai 87%

BERIKUT ADALAH URAIAN DARI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021:

A. TINGKAT KEMANTAPAN JALAN

Grafik 2.19



Pada Tahun anggaran 2021 jumlah panjang jalan yang dikerjakan 36.28 km, atau relatif lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya km (lihat grafik), namun jika dibandingkan dengan Target Panjang jalan yang telah ditingkatkan/dibangun dari periode awal RPJMD (TA.2016) hingga TA.2021 sebesar 728 km (97,29%), capaian kinerja indikator kegiatan ini dibawah dari target RPJMD TA.2021 yang hendak dicapai yaitu 790 Km (100 %) panjang jalan yang telah dibangun/tingkatkan.

Adapun mengapa capaian indikator kegiatan ini pada tahun 2021 lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan adanya REFOCUSING Anggaran pada Tahun tersebut. Refocusing Anggaran terpaksa dilaksanakan atas petunjuk dari Pemerintah Pusat disebabkan adanya Pandemi Virus Covid-19 yang melanda dunia tak terkecuali telah mencapai Indonesia, lebih khusus telah mencapai kabupaten Gowa.

Tingkat Kemantapan Jalan pada Tahun 2021 mencapai 75.82 % .

Rasio Panjang Jalan yang diperhitungkan adalah Jalan Nasional, Jalan Kabupaten dan Jalan Kota. Rasio Panjang Jalan dengan jumlah Penduduk diperoleh dengan membagi Jumlah penduduk Kabupaten Gowa (784.511 Jiwa) dengan Panjang Jalan (2396 Km) atau 1 KM di Wilayah Gowa melayani 327 Penduduk (0,32%).

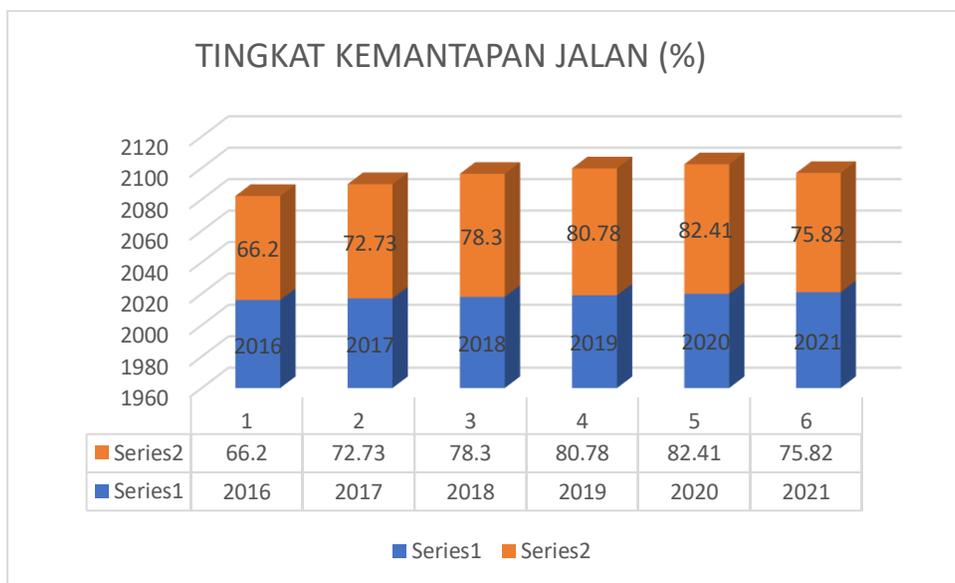
Data ini menginformasikan semakin tinggi Nilai Rasio senakin tinggi pula Jumlah Masyarakat yang dilayani. Untuk mempertahankan atau meningkatkan Rasio, maka Perlu penambahan Ruas Jalan Baru seiring bertambahnya Populasi Penduduk.



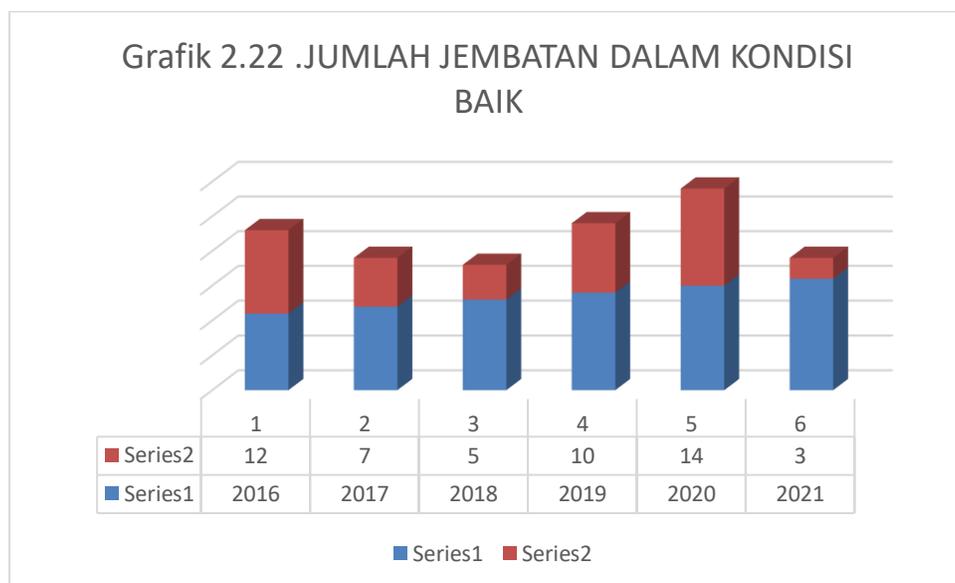
Panjang Jalan yang dibangun/ ditingkatkan dalam (KM) : tabel 3.91

No	2018	2019	2020	2021
1	226.87	111.71	57,2	36.28

Grafik 2.21



B. JUMLAH JEMBATAN DALAM KONDISI BAIK DAN LAYAK



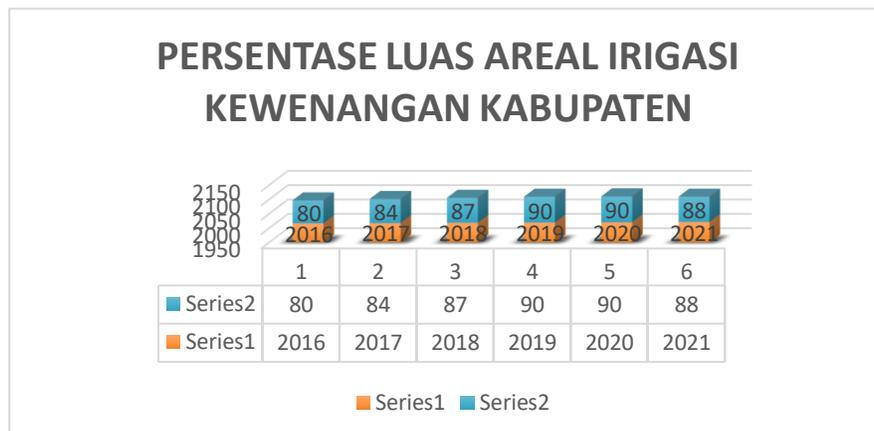
Dalam tahun 2021 jumlah jembatan kabupaten yang dibangun/ditingkatkan sebanyak 3 unit jembatan, dengan kondisi baik mencapai 95,3 % atau sedikit diatas target RPJMD sebesar 93,3.

2.Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi tahun ini ditarget sebesar 90.16 % dengan realisasi 82.3%. Hal tersebut tidak dapat terealisasi hal tersebut disebabkan oleh adanya pengurangan anggaran untuk pembangunan Irigasi di Kab.Gowa. Berikut gambaran umum perkembangan irigasi di Kabupaten Gowa :



TABEL 2.21
PERSENTASE LUAS AREAL IRIGASI WEWENANG KABUPATEN YANG TERAIRI (%)



Pada Tahun 2021 capaian persentase luas areal irigasi wewenang kabupaten yang terairi sebesar 88,12 %. Dari Luas Area sawah sebesar 27.806 Ha , capaian yang telah diperoleh sebesar 22.889 Ha sawah yang terairi irigasi Teknis kewenangan Kabupaten.

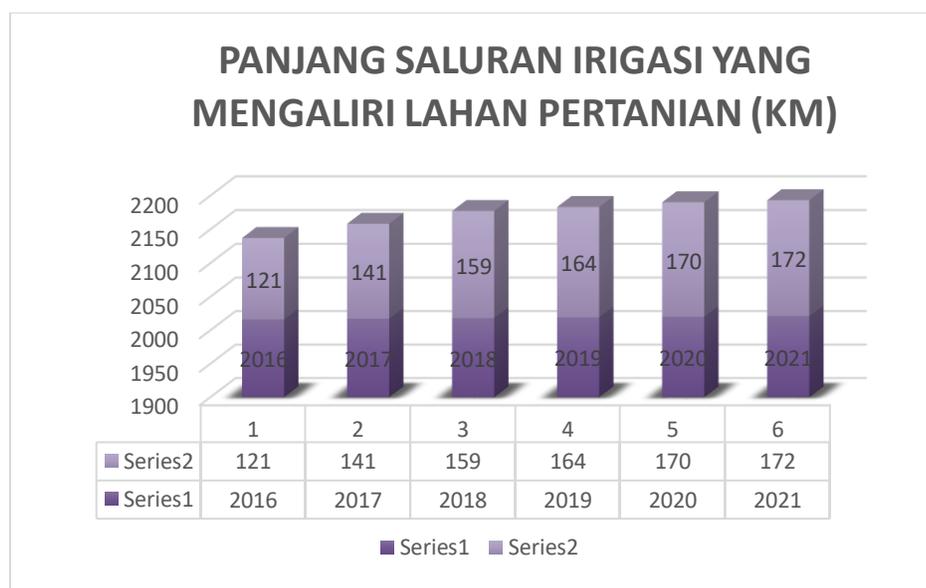
Tabel grafik 2.91 :

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Luas areal Irigasi Kewenangan Kabupaten (%)	80,15	84	87,72	90,48	90,81	88,12

PANJANG SALURAN IRIGASI YANG MENGALIRI LAHAN PERTANIAN

Panjang saluran irigasi yang terbangun pada tahun 2021 yang mengairi lahan pertanian sepanjang 1,19 km, menurun dibandingkan tahun 2020 yang 6,32 km, namun secara keseluruhan sepanjang tahun RPJMD 2016-2021 , hal ini disebabkan adanya kecenderungan penurunan angka anggaran dari dana DAK. Secara kumulatif panjang DI yang terairi pada tahun 2021 telah mencapai 172,11 km

GRAFIK 3.22





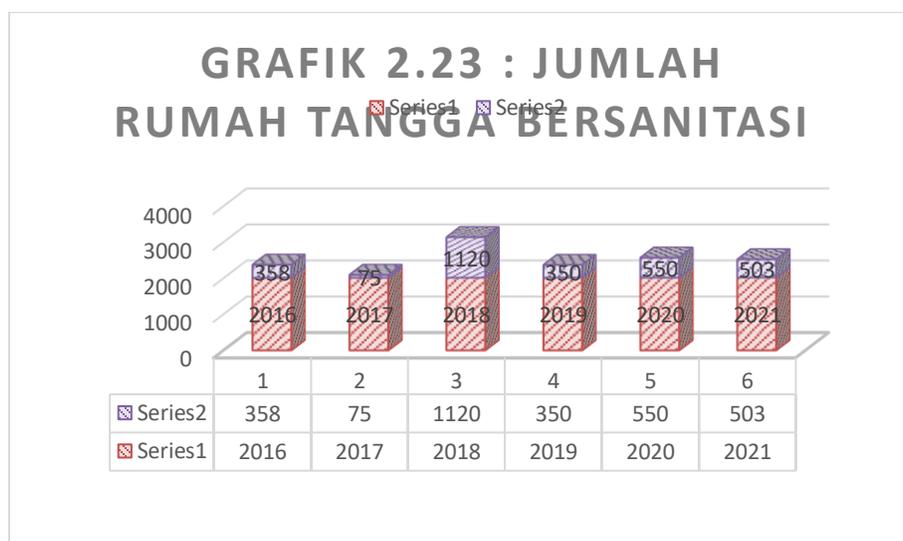
Tabel 2.92 :

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Panjang Saluran Irigasi yang Mengairi Lahan Pertanian (km)	121,33	141,2	159,53	164,6	170,92	172,11

3. Rumah Tangga Bersanitasi

Capaian kinerja Jumlah Rumah Tangga Akses Bersanitasi pada tahun 2021 sebesar 503 RT , kurang dari capaian tahun 2020 sejumlah 550 RT. Namun Capaian Rumah Tangga Akses Bersanitasi tersebut belum mampu mencapai target capaian RPJMD pertahun sebesar 5 % , dikarenakan target capaian RT Berakses Sanitasi ta.2021 sebesar 9.806 RT, hanya dapat dicapai 503 RT, yang dapat dipahami akibat alokasi anggaran belum mencukupi.

Persentase RT Bersanitasi, setiap Tahun Cenderung tidak dapat mencapai target, disebabkan Target RT Bersanitasi cukup tinggi yaitu 5% pertahun, sedangkan rata-rata capain Program ini hanya berkisar 0,04% (Tahun 2017) hingga 0,95% (Tahun 2018). Tahun 2020 Capaian Indikator hanya mencapai 0,28% atau ada 550 RT Terlayani, jauh dari target Capaian 9806 RT (5%) Untuk itu perlu adanya Peningkatan Anggaran Penanganan Rumah Tangga Bersanitasi. Namun Anggaran yang terbatas tentunya tidak menghalangi untuk senantiasa mensosialisasikan Pentingnya Sanitasi Sehat kepada Masyarakat.



Tabel 2.93

Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Rumah Tangga Akses Bersanitasi	RT	358	75	1120	350	550	503

Sanitasi sangat erat dengan penyediaan air bersih yang tersedia. Berikut gambaran ketersediaan air bersih.



d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 2.94 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur, Perhubungan Dan Pengairan

NO	INDIKATOR KINERJA	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi/ Inefisiensi
1	Rasio Panjang jalan dengan jumlah penduduk.	103	70	16 (Efisien)
2	Rasio jaringan irigasi	91		
3	Presentase rumah tangga bersanitasi	64		
Rata - rata Capaian Kinerja			86	

Sumber data : Dinas PU dan Penataan Ruang Kab.Gowa dan Dinas Perhubungan Tahun 2021.

e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Tabel 2.95 : Pengukuran Kinerja Program Kegiatan dan Anggaran

No	Program dan Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
1	Program Pembangunan Jalan / Pemeliharaan Rutin Jalan	1,409,356,500	1,392,462,000	98
2	Program Pembangunan Jalan / Pemeliharaan Rutin Jembatan	297,062,208	281,296,310	94
3	Program Pemeliharaan Jalan / Pembangunan Jalan	279,885,543,955	66,686,618,216	23
4	Program pemeliharaan jalan Pembangunan Jembatan	15,921,262,310	5,341,393,003	33
5	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDM) /Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	14,878,751,000	10,298,495,562	69
6	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Peningkatan Bendung Irigasi	1,334,889,895	1,065,078,349	79
7	Pengelolaan & Pengembangan Sistem Drainase/ Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	3,496,771,000	2,349,434,650	67
8	Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah/ Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	3,675,260,000	3,675,260,000	100
Jumlah		320.898.896.868	91.090.038.090	70

Sumber data : Dinas PU dan Penataan Ruang Kab.Gowa tahun 2021

Berdasarkan tabel tersebut diatas, menunjukkan bahwa capaian kinerja 86% lebih besar daripada realisasi anggaran 70%. Terdapat efisiensi sebesar 16 % (realisasi kinerja - realisasi anggaran) berarti penggunaan anggaran berdampak terhadap target kinerja yang diharapkan.

g. Permasalahan dan solusi :

1. Pengurangan anggaran pada berbagai bidang termasuk pengurangan anggaran pada bidang irigasi.

Solusi : Pemanfaatan sumber air secara maksimal seperti air permukaan, air tanah dan air hujan.



Terbatasnya anggaran pada kegiatan rumah tangga bersanitasi menyebabkan tidak mencapai target yang ditetapkan.

Solusi : Pemberdayaan masyarakat dan pihak swasta berupa Corporate Social Responsibility {CSR} dapat diupayakan sehingga sanitasi dalam RT dan lingkungan dapat terwujud tanpa tergantung pada anggaran pemerintah.

Sasaran 14	Meningkatnya Pengendalian Penataan Ruang
-------------------	---

Realisasi sasaran meningkatnya pengendalian penataan ruang persentase ketaatan terhadap RTRW dapat dilihat pada tabel :

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Pengendalian Penataan Ruang

Tabel : 2.96 : Capaian Kinerja 2021

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian	Kinerja Naik/Turun
1	Persentase Ketaatan RTRW	Persen	97.20	80.91	78.40	96.89	Turun

**b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya :
Tabel 2.97 : Angka Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dari Sebelumnya**

NO	INDIKATOR SASARAN	Kondisi 2015(%)	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	68.74	70.75	65.07	71.79	72.44	77.20	78.40

Sumber Data: Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Gowa Tahun 2021

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan :

Indikator presentase ketaatan terhadap RTRW capaian sebesar 96.89% berkinerja **sangat tinggi**, namun belum mencapai target yang diharapkan dan terjadi penurunan capaian dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 capaian indikator ketaatan terhadap RTRW, sebesar 76.55%, ada 5987 IMB yang dikeluarkan dari Target 7194 IMB.

Program yang mendukung indikator kinerja ketaatan terhadap RTRW adalah :

Tabel 2.98

Program /Kegiatan	Target Tahun 2021	Target Capaian Akhir RPJMD	Realisasi TA.2021	Realisasi Capaian Akhir RPJMD
Tersedianya Dokumen Rencana Tata Ruang	2	Dok	12	Dok.

Ada 12 Dokumen (Dok) Target Program Kegiatan ini sampai akhir RPJMD, dengan Target Tahunan 2 Dok, Namun Pada Tahun 2021, Capaian Kinerja Program



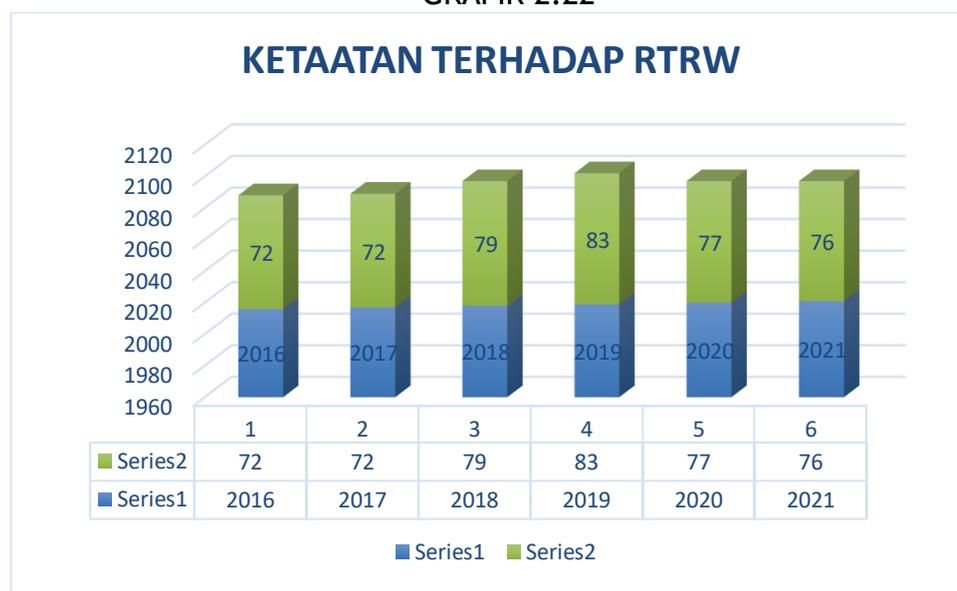
Kegiatan ini hanya 1 Dokumen yang dapat dilaksanakan, adapun ketidakcapaian Target Program ini dikarenakan adanya Refocusing Anggaran TA.2021 untuk penanganan Dampak Pandemi Covid 19.

Tabel 2.99 : program pemanfaatan ruang

Program /Kegiatan	Target Tahun 2021	Target Capaian Akhir RPJMD	Realisasi TA.2021	Realisasi Capaian Akhir RPJMD
Persentase Jumlah Bangunan Ber IMB	81.51	%	81.51	%
	4,661	IMB	44,826	IMB

Capaian Kinerja Kegiatan ini, indikatornya berdasarkan pemenuhan Target Capaian Bangunan Ber IMB yang dikeluarkan pertahun, dan berhubungan langsung dengan Target Capaian Bangunan Ber IMB. Samapai tahun 2021, Capaian Kinerja Program/Kegiatan ini hanya mencapai 76,5 %.

GRAFIK 2.22



d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 2.100 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	INDIKATOR KINERJA	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran	Efisiensi/ Inefisiensi
1	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	96.89	83.5	13.39

Sumber Data: Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Gowa Tahun 2021



e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Tabel 2.101 : Pengukuran Program dan Anggaran Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang

No	Program dan Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
1	Program Penyelenggaran Penataan Ruang /Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	929,661,137	866,678,500	93
2	Program Penyelenggaran Penataan Ruang/ Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	33,873,977	25,221,900	74
	Jumlah	963.535.114	891.900.400	83.5

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Dinas PUPR Kab. Gowa Tahun 2021

Berdasarkan tabel tersebut diatas, menunjukkan bahwa capaian kinerja 96.89% lebih besar daripada realisasi anggaran 83.5%. Terdapat efisiensi sebesar 13.39% (realisasi kinerja - realisasi anggaran) berarti penggunaan anggaran berdampak signifikan pada indikator sasaran.

f. Permasalahan

Adanya pemotongan anggaran untuk upaya pencegahan penyebaran Covid 19 sehingga target yang ditentukan tidak mencapai target dan pertambahan penduduk tidak bisa diimbangi dengan jumlah perizinan IMB yang dikeluarkan pemerintah daerah

Sasaran 15 : Meningkatnya Kualitas Perumahan yang Layak

a. Perbandingan antara target dan realisasi sasaran Meningkatnya Layanan Perumahan yang layak

Tabel 2.102 : Capaian indikator kinerja sasaran layanan perumahan yang layak.

NO	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2020	Pengukuran Tahun 2020			Kinerja (Naik/Turun)
				Target	Realisasi	Capaian	
1	Rasio Rumah Layak Huni.	Rasio	99.15	73.95	72.73	97.67	Turun

Sumber Data : Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, 2021

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya

Tabel 2.103 : Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Layanan Perumahan yang Layak.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Rasio Rumah Layak Huni.	Rasio	72.64	73.33	72	73	72.33	72.70	72.73

Sumber Data : Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, 2021



c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.

Perumahan yang layak merupakan salah satu sasaran utama pembangunan di Kabupaten Gowa, sebagai perwujudan pemenuhan hak - hak dasar masyarakat yang inklusif. Pemerintah Kabupaten Gowa menyadari bahwa setiap penduduk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri dan produktif.

Nilai sasaran sebesar 97.67% berkinerja **sangat tinggi** diatas 91%, namun tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan karena :

1. Pengurangan anggaran karena pandemi Covid 19.
2. Pendataan dan verifikasi penerima bantuan sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan target, namun masih perlu didukung dengan ketersediaan regulasi yang lebih detail.
3. Masih kurangnya kemampuan masyarakat penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dalam menyiapkan dokumen - dokumen administrasi sebagai persyaratan untuk pelaksanaan kegiatan.

Tabel 2.104 : Data Rumah Layak Huni Menurut Kecamatan Tahun 2021 Di Kabupaten Gowa

NO	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH (Unit)	RUMAH LAYAK HUNI(Unit)	PERSENTASE
1	Bontonompo	8321	5905	70.97
2	Bontonompo Selatan	6029	3867	64.14
3	Bajeng	13399	9390	70.08
4	Bajeng Barat	4853	2972	61.24
5	Pallangga	20995	15063	71.75
6	Barombong	7700	5869	76.22
7	Somba Opu	29590	25557	86.37
8	Bontomarannu	6630	5676	85.61
9	Pattallassang	4850	3283	67.69
10	Parangloe	4508	2671	59.25
11	Manuju	2984	1940	65.01
12	Tinggi Moncong	4688	3281	69.99
13	Tombolo Pao	5691	3177	55.82
14	Parigi	2772	1663	59.99
15	Bungaya	3356	1866	55.60
16	Bontolempangan	2823	1714	60.72
17	Tompobulu	6135	4334	70.64
18	Biringbulu	6850	5177	75.58

Sumber Data : Dinas Perumahan, Kawasan pemukiman dan Pertanahan 2021

d. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Program dan Anggaran.

Tabel 2.105 : Efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran Rumah layak Huni

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi/Inefisiensi
1	Rumah layak Huni	97.67	99	1.33

Sumber : Data Diolah



e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Tabel 2.106 : Pengukuran Target Kinerja Program Kegiatan dan Anggaran

Program dan Kegiatan	Anggaran		
	Target	Realisasi	%
Program Pengembangan Perumahan/Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	20.649.000	20.649.000	100
Program Pengembangan Perumahan/ Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	61.657.607	60.657.500	98
Jumlah	82.306.607	81.306.500	99

Sumber Data : Dinas Permukiman, Kawasan Perumahan dan Pertanahan Tahun 2021.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, menunjukkan bahwa capaian kinerja 97.67 % lebih kecil daripada realisasi anggaran 99%, Inefisiensi 1.33% (realisasi kinerja - realisasi anggaran) berarti penggunaan anggaran belum berdampak terhadap target kinerja yang diharapkan.

F. Permasalahan dan Solusi pemecahannya :

Letak Kabupaten Gowa yang berbatasan dengan Kota Makassar sehingga banyak pendatang dari kabupaten tetangga yang membangun gubuk gubuk tanpa memiliki alas hak atas lahan tersebut, karena menjadi persyaratan dalam peningkatan rumah layak huni.

Solusi : Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pembangunan gubuk gubuk liar utamanya di kota Sungguminasa dan sekitarnya.

Sasaran 16: Meningkatnya Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Terjadi perubahan sasaran berdasarkan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Gowa dari Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah dengan indicator Nilai SAKIP , katagori LPPD dan Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah menjadi sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dengan Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai SAKIP, Katagori LPPD, Opini BPK.

a. Perbandingan Antara target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah:

Tabel 2.107 :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian	Kinerja Naik/Menurun
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	87	B	CC	87	Konstan
2	Nilai SAKIP	Katagori	105	B	B	105.85	Konstan
3	Katagori Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Katagori	285.71	Tinggi {3.6618}			Konstan
4	Opini BPK terhadap Keuangan	Katagori	66.66	WTP	WDP	66.66	Menurun

Nilai RB dan SAKIP tahun 2021 adalah hasil LHE tahun 2020



b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya :

Tabel 2.108 : Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Pemerintah Daerah.

NO	INDIKATOR SASARAN	Tahun 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Indeks Reformasi Birokrasi				CC	CC	CC	CC
2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	CC	CC	B	B	B	B	B
3	Kategori Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	-
4	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	-

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan :

1.Reformasi Birokrasi :

Strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai Good Governance dan melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama delapan area perubahan yaitu :

1. Area manajemen perubahan.
2. Area penataan perundang - undangan.
3. Area penataan dan penguatan organisasi
4. Area penataan tatalaksana.
5. Area Penataan sistem manajemen SDM.
6. Area penguatan pengawasan.
7. Area Akuntabilitas Kinerja.
8. Area kualitas pelayanan publik.

Namun pada kenyataannya ada beberapa hal yang belum sepenuhnya terwujud sesuai dengan harapan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain :

1. Penerapan Reformasi Birokrasi masih berfokus pada pelaksanaan tingkat pemerintah daerah, penerapan pada tingkat organisasi perangkat daerah belum sepenuhnya merata dan berjalan secara optimal.
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi baru pada tataran pemenuhan dokumen belum pada tataran implementasi.
3. pembangunan Zona Integritas (ZI) dengan sasaran perubahan meningkatnya SKPD/unit kerja yang dicanangkan sebagai zona integritas menuju WBK/WBBM. Baru 1 {satu} organisasi perangkat daerah yang masuk Zona Integritas yaitu Dinas Penanaman Modal & Perizinan Satu Pintu dan belum ada perangkat daerah yang masuk WBK/WBBM.
4. Pelaporan LHKASN belum sepenuhnya mencapai 100% oleh ASN Pemkab.Gowa
5. Penilaian tunjangan tambahan penghasilan dengan sasaran perubahan meningkatnya kinerja pegawai melalui pemberian tunjangan tambahan penghasilan belum berdasarkan kinerja.
6. Agent Perubahan yang dibentuk berdasarkan SK Bupati belum memiliki rencana aksi yang nyata dan berkelanjutan.
7. Belum optimalnya system penataan perundangan - undangan terkait peta keterkaitan kebijakan pusat dan daerah.



Tabel 2.109 : Nilai Reformasi Birokrasi Kab.Gowa

2018	2019	2020	2021
50.04	52.39	52.20	

2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) :

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan sistem akuntabilitas keuangan dan dilakukan evaluasi atas kinerja tersebut.

- Tabel 2.110 : Nilai SAKIP Kab.Gowa

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
53.09	51.97	53.36	61.16	61.80	63.25	63,51

Faktor keberhasilan Pemerintah Kab.Gowa mendapat predikat “B” adalah komitmen dalam pimpinan dan jajarannya untuk memperbaiki dokumen SAKIP dari waktu ke waktu melalui coaching clinic SAKIP untuk SKPD dan kecamatan serta melakukan monitoring dan evaluasi SAKIP tiap semester.

Namun nilai tersebut belum optimal karena masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki/ ditingkatkan yaitu :

1. Ketidakselarasan penjabaran rumusan tujuan, sasaran dan indikator kinerja pada RPJMD, Renstra organisasi perangkat daerah, perjanjian kinerja hingga level terendah.
2. Penjabaran kinerja/cascade masih belum sempurna, belum menggambarkan hubungan kausalitas antar jenjang kinerja.
3. Hasil evaluasi kinerja inter belum memberikan hasil rekomendasi yang spesifik.

3.Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah {LPPD}

Penilaian LPPD dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kunci untuk setiap pengukuran yang secara otomatis akan menghasilkan peringkat kinerja daerah secara nasional yang dapat digunakan untuk menetapkan kebijakan pengembangan kapasitas pemerintahan daerah dalam rangka mendorong kompetisi antar daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Untuk penilaian LPPD tahun 20..... belum ada hasil dari Kementerian Dalam Negeri.

Tabel 2.111 : Nilai LPPD Kab.Gowa

Tahun	Nilai	Katagori
2011	2,7680	Tinggi
2012	3,2897	Sangat Tinggi
2013	3,1369	Sangat Tinggi
2014	3,1474	Sangat Tinggi
2015	3,2738	Sangat Tinggi
2016	3.3596	Sangat Tinggi
2017	3,2412	Sangat Tinggi
2018		Tidak nilai dari Kemendagri
2019	3,6618	Tinggi
2020	3.4906	Sangat Tinggi
2021	-	-



Penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah {LPPD} untuk tahun 2019 yang dirilis oleh Kemendagri tahun 2020 ada perubahan cara penilaian dari PP nomor 3 tahun 2007 menjadi PP nomor 13 tahun 2019 yang ditindaklanjuti dengan Permendagri nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan hal tersebut ada perubahan range nilai dari tahun - tahun sebelumnya. Target LPPD Kab.Gowa tahun 2020 adalah sangat tinggi dengan nilai range 3.0000 - 3.5000, realisasi LPPD Kab.Gowa adalah tinggi dengan nilai 3.6618. Walaupun nilai yang dikeluarkan Kemendagri katagori tinggi namun nilai LPPD Kab.Gowa lebih tinggi dari target maka dianggap memperoleh nilai sangat tinggi.

Hambatan yang dihadapi dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah kurangnya personil yang memadai dalam penyusunan LPPD.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi kaungan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemerintah Kabupaten Gowa telah meraih WTP sebanyak 9 kali berturut- turut. Penilaian WTP tahun 2019 belum ada hasil dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Tabel 2.112 : Realisasi Opini WTP Kab.Gowa :

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
WTP	WDP	-								

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 2.113: Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Pemerintah Daerah.

NO	INDIKATOR SASARAN	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi
1	Nilai RB	87		
2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	105.85		
3	Kategori Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			
4	Opini BPK terhadap laporan keuangan	66.66		
5	Capaian Belum ada hasil dari penilai eksternal			

**e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja .****Tabel 2.114 :**

No	Program , Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan /Sub kegiatan Peningkatan kinerja & RB	35.131.000	24.960.000	71
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan/ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	86.040.000	79.538.000	92
3	Program Pemerintahan & Kesra/Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	320.396.500	217.836.500	67.98
4	Program Pengelolaan Keuangan Daerah/Koordinasi & Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bid.Anggaran	15.350.000	7.500.000	48
5	Program Pengelolaan Keuangan Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Perda ttg APBD dan Perkada tentang APBD	256.488.570	197.501.500	77
6	Program Pengelolaan Keuangan Daerah/ Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah	41.242.000	41.236.000	99.98
7	Program Pengelolaan Keuangan Daerah /Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	182.735.500	138.888.250	76
	Rata-rata	937.383.570	707.460.250	75.47

f. Permasalahan dan solusi pemecahannya:

1. Pelaksanaan reformasi birokrasi di kab.Gowa belum optimal karena masih rendahnya pemahaman di tingkat SKPD tentang 8 area perubahan.
2. Laporan kinerja telah disusun hingga level perangkat daerah namun belum berfokus pada pencapaian kinerja serta analisis yang diberikan belum memberikan informasi atas kinerjanya.
3. Ada beberapa sasaran level kabupaten yang bersifat output sehingga dilakukan perubahan indikator kinerja utama kabupaten.
4. Belum optimalnya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan.

Solusi :

1. Melakukan rapat koordinasi RB dengan Tim RB Kabupaten sebagai penanggung jawab 8 area perubahan, dan mengkoordinasikan pada SKPD
2. Melakukan bimtek penyusunan laporan kinerja sehingga kualitas laporan dapat ditingkatkan.
3. Melakukan Coaching Clinic SAKIP.
4. Mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan intern instansi pemerintah.



Sasaran 17: Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik.

- a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi sasaran Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik.

Tabel 2.115 : Pengukuran Program Kinerja Indikator Sasaran Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4.01(Baik)	3,91{Baik}	97.50

- b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Sebelumnya Sasaran Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik .

Tabel 2.116 :

No.	Indikator Kinerja	satuan	2018			2019			2020			2021
			T	R	C{%}	T	R	C{%}	T	R	C	R
1.	Indeks Pelayanan Publik	Nilai Indeks	3,51 (Baik)	3,86 (Baik)	109,97	4,01 (Sangat Baik)	4,00 (Baik)	99,83	4,10 (Sangat Baik)	3,91 {Baik}	97,50	3,91

- c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan :

- Tahun 2021 belum ada hasil penilaian dari Kemenpan RB terkait dengan Indeks Pelayanan Publik.
- Hasil evaluasi pelayanan publik terhadap unit pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2020 memperoleh Indeks Pelayanan Publik dengan Nilai 3,91 berkategori Baik (B), dan untuk tahun 2021 belum ada hasil penilaian dari Kemenpan RB.
- Berdasarkan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada unit pelayanan publik:
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan nilai 4,18 berkategori Sangat Baik (A-), terjadi penilaian yang sama dari tahun 2019 yaitu 4,18 berkategori Sangat Baik (A-).
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nilai 3,64 berkategori Baik (B), terjadi penurunan nilai Indeks sebanyak 0,07 dari tahun 2019 yaitu 3,71 berkategori Baik (B).
- Penyelenggaraan Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2021, Inovasi Sahabat LAPOR telah berhasil terpilih sebagai Finalis Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik TOP 99 tingkat nasional dari Kementerian PANRB dan sebagai TOP 30 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
- Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik melalui Aplikasi SP4N-LAPOR pada tahun 2021 telah menerima aspirasi dan laporan sebanyak 86 laporan, dari pengaduan tersebut telah dikelola secara aktif dengan persentase tindak lanjut yaitu 100 persen.



Analisis Keberhasilan/Kegagalan:

1. Melaksanakan tindak lanjut dari rekomendasi perbaikan hasil evaluasi tahun sebelumnya;
2. Melakukan reviu terhadap kebijakan pelayanan yaitu dokumen Standar Pelayanan dengan mengacu pada ketentuan yang terbaru dan mempertimbangkan masukan dari masyarakat pengguna layanan;
3. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat dengan bekerja sama pihak eksternal yaitu Perguruan Tinggi sehingga setiap unsur pelayanan yang disurvei mendapatkan hasil yang lebih objektif dan mendalam sesuai dengan kondisi riil pada unit pelayanan publik.
4. Terbatasnya kapasitas gedung dan sarana prasarana pendukung layanan Administrasi Kependudukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Belum optimalnya pengembangan inovasi pelayanan publik untuk mendukung kemudahan dan kecepatan layanan administrasi kependudukan dan perizinan
6. Belum optimalnya kapasitas petugas layanan dalam memberikan pelayanan sesuai dengan budaya pelayanan prima

Solusi yang dilakukan:

1. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dan pemenuhan komponen penilaian kinerja pelayanan publik berdasarkan pedoman dari Ombudsman dan Kementerian PANRB
2. Melaksanakan pendampingan penciptaan, pengembangan dan pelembagaan inovasi pelayanan publik terhadap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
3. Melakukan sosialisasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui aplikasi SP4N-LAPOR kepada masyarakat pengguna layanan

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 2.117: Angka Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	INDIKATOR KUNERJA	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran	Efisiensi/ Inefisiensi
1	Indeks Pelayanan Publik	97.50	98.53	Inefisiensi {1.03}

Sumber Data: Sekretariat Daerah Kab.Gowa Tahun 2021

e. Analisis Program dan Anggaran

Tabel 2.118: Pengukuran Program Kegiatan dan Pendanaan

No	Program dan Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah/Fasilitasi Pelayanan Publik	56.773.000	55.335.000	97.46
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah/Monitoring, Evaluasi & Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik	42.068.000	41.904.000	99.61
Rata-rata		98.841.000	97.839.000	98.53



Berdasarkan tabel tersebut diatas, menunjukkan bahwa capaian kinerja lebih kecil sebesar 97.50 daripada realisasi anggaran 98.53%. Terdapat inefisiensi sebesar 1.03%(realisasi kinerja - realisasi anggaran) berarti masih perlu melakukan optimalisasi kinerja sehingga capaian kinerja lebih besar daripada anggaran yang digunakan.

f. Permasalahan dan solusi :

Kondisi kabupaten gowa yang sebagian daerah kecamatan berada di dataran tinggi sehingga akses masyarakat untuk mendapat pelayanan belum sepenuhnya dapat dipenuhi secepatnya.

Solusi :

Meningkatkan infrastruktur daerah sehingga simpul - simpul pemerintahan dapat terjangkau dengan mudah bagi masyarakat yang berada di daerah dataran tinggi.

Realisasi Anggaran Tahun 2021.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maka setiap tahunnya, maka telah ditetapkan PERDA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gowa. Struktur APBD Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pendapatan

Rencana Anggaran Pendapatan pada APBD Tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp. 2.144.411.192.535 - Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.119 : Anggaran Pendapatan pada APBD Tahun 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	PENDAPATAN	1.854.081.087.633.00	1.653.239.021.654.82	89.17
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	232.504.180.420	258.084.547.209.82	111.00
	Pendapatan Pajak Daerah	117.579.635.430	133.918.488.887.50	113.90
	Hasil Retribusi Daerah	51.131.043.203.00	46.619.291.303.25	97.04
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.020.000.000	4.069.728.664.00	81.07
	Lain-lain PAD Yang Sah	58.773.501.787.00	70.475.560.295.07	119.91
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.506.990.886.470.00	1.371.097.406.445.00	90.98
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.415.008.115.014.00	1.264.240.439.366.00	89.35
	Dana Perimbangan	1.233.931.443.014.00	1.230.496.629.366.00	99.72
	Dana Insentif Daerah (DID)	33.743.810.000.00	33.743.810.000	100
	Dana Desa	147.332.862.000.00	0	0
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	91.982.771.456.00	106.856.967.079.00	116.17
	Pendapatan Bagi Hasil	83.543.231.456.00	98.417.427.079.00	117.80
	Bantuan Keuangan	8.439.540.000.00	8.439.540.000.00	100.00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	114.586.020.743.00	24.057.068.000	20.99
	Pendapatan Hibah	24.057.068.000	24.057.068.000	100
	Lain – Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	90.528.952.743.00	0	0



2. Belanja

Tabel 2.120 : Belanja pada APBD Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	1.341.163.957.966.87	1.150.352.145.811.65	85.77
	Belanja Pegawai	759.699.880.110,25	704.438.113.508.00	92.73
	Belanja Barang & Jasa	527.596.177.273,62	408.046.768.072.45	77.34
	Belanja Bunga	5.055.000.000.00	0	0
	Belanja Hibah	45.622.190.565.00	34.815.636.613.20	76.31
	Belanja Bantuan Sosial	3.190.710.018.00	3.051.627.600.00	95.64
2	Belanja Modal	648.468.552.981.08	330.806.799.08	51.01
	Belanja Modal Tanah	7.978.687.000.00	7.887.613.541.00	98.86
	Belanja Modal Peralatan & Mesin	101.354.920.489.00	73.088.088.267.00	72.11
	Belanja Modal dan Bangunan	175.179.378.984.00	149.782.842.330.73	85.50
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	351.472.558.460.08	98.932.813.160.35	28.15
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.483.008.048.00	1.111.539.500.00	8.90

PENGHARGAAN YANG DITERIMA :

1. Indonesian Migrant Workers Award (IMWA) 2015 Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Kuching, Malaysia
2. Sertifikat Bina Satpol PP Terbaik sebagai Pembina Teknis Satpol Pendidikan dari Gubernur Sulawesi Selatan pada HUT Satpol PP Ke-66 Tahun 2016
3. Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas LKPD Kabupaten Gowa TA 2015 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
4. Juara III Pelaksana Terbaik Gotong Royong Kategori Kelurahan Tingkat Sulsel Tahun 2016 (Kelurahan Malakaji)
5. Penghargaan Honorary Police dari Kapolda Sulsel Tahun 2016
6. Penghargaan Koperasi dan UMKM Tahun 2016 Sebagai Peran Aktif dan Wujud Kesungguhan, Sikap dan Upaya dalam Pembinaan dan Kepedulian Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Gubernur Sulawesi Selatan
7. Penghargaan Terbaik I Kabupaten/Kota Peduli Kesehatan Olahraga dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016
8. Penghargaan sebagai Pemrakarsa Rekor Kerja Bhakti Gotong Royong Membersihkan Parit, Selokan/Got dan Sungai/Kali Terpanjang dan Peserta Terbanyak dari Lembaga Prestasi Rekor Indonesia Dunia (LPRID) Tahun 2016
9. Penghargaan sebagai Penyelenggara Rekor Kerja Bhakti Gotong Royong Membersihkan Parit, Selokan/Got dan Sungai/Kali Terpanjang dan Peserta Terbanyak dari Lembaga Prestasi Rekor Indonesia Dunia (LPRID) Tahun 2016
10. Penghargaan Pemecahan Rekor Pembakaran Gogos Terpanjang Sepanjang 696 meter dengan Jumlah Orang Terbanyak 696 orang dengan menggunakan pakaian adat dari Lembaga Prestasi Rekor Indonesia Dunia (LPRID) Tahun 2016 (Kecamatan Pallangga)
11. Penghargaan Inisiator Sekolah Ramah Anak dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 (SD Mangalli Kecamatan Pallangga)



12. Penghargaan Inisiator Puskesmas Ramah Anak dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 (Puskesmas Pallangga)
13. Juara III Lomba Penanaman dan Pemeliharaan Pohon Tahun 2015 Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan
14. Penghargaan atas WTP Tahun Anggaran 2015 dari Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan RI
15. Penghargaan Bina Marga sebagai Daerah dengan Kinerja Terbaik dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016
16. Penghargaan sebagai Percontohan Layanan Anak Integratif Nasional dari Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI
17. Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Tahun 2016 dari Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI
18. Penghargaan Terbaik Kedua Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan oleh Gubernur Sulsel. Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas LKPD Kabupaten Gowa TA 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
19. Penghargaan DAFA Award Tahun 2017 Madya Tingkat Kabupaten/Kota kepada Forum Anak Kabupaten Gowa dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
20. Juara Harapan III Desa Terbaik pada Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017. (Desa Panakukkang Kecamatan Pallangga)
21. Penghargaan Terbaik Keempat dalam Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2017 dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
22. Penghargaan Pemerintah Republik Indonesia atas Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012-2016 dari Kementerian Keuangan RI.
23. Penghargaan WOW Public Service Excellent 2017 Kategori Pelayanan Prima di Bidang Pendidikan di Era Marketing dari Lembaga Manajemen dan Pemasaran MarkPlus Inc.
24. Penghargaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Atas Sumbangsih Pemerintah Kabupaten Gowa Terhadap Pembangunan Sulawesi Selatan pada Peringatan HUT Sulsel Ke-348 Tahun.
25. Penghargaan Tokoh Pendorong Kemajuan 2017 Kategori Kepala Daerah versi Harian Berita Kota Makassar.
26. Penghargaan Universitas Indonesia Scholarship Award Tahun 2017 sebagai salah satu lembaga yang selama ini berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa utamanya dalam hal memberikan bantuan beasiswa kepada mahasiswa Gowa untuk bersekolah di Universitas Indonesia.
27. Penghargaan Pelaksana Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Terbaik I Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 pada Hari Kesehatan Nasional Ke-53 Tahun Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
28. Penghargaan Pemerintah Sulsel kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa atas Peraturan Daerah (Perda) Tentang TB yang mampu Meningkatkan Jumlah Penemuan Kasus TB Secara Aktif Mencapai 192/100 ribu Penduduk melalui Pos TB Desa.
29. Penghargaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Tahun 2017 dari Kementerian Pertanian RI.
30. Penghargaan Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Yaitu Koperasi Gabungan Kelompok Petani Kecil (KPK) dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.



31. Penghargaan Lembaga Prestasi Indonesia Dunia (LEPRID) sebagai Pemrakarsa Atraksi Gendang Tradisional Terbanyak yakni 1.000 orang Penabuh Gendang dengan jumlah gendang terbanyak yakni 1.000 buah Gendang.
32. Penghargaan Lembaga Prestasi Indonesia Dunia (LEPRID) atas Gerakan Periksa Payudara Sendiri (Sadari) di 697 Titik yang diikuti Sebanyak 13.477 orang peserta.
33. Penghargaan Swasti Saba Wiwerda atas Keberhasilan dalam Menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2017 untuk Klasifikasi Pembinaan dari Menteri Kesehatan RI.
34. Penghargaan Gubernur Sulsel atas Dedikasi Bupati Gowa Sebagai Pemrakarsa Kampung Literasi di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan pada Puncak Peringatan Hari Aksara Internasional Ke-52 Tahun 2017.
35. Juara Tembak Reaksi Executive Pangdam XIV Hasanuddin Cup pada Peresmian Lapangan Tembak Pistol Bakri Hasan Makodam XIV Hasanuddin.
36. Penghargaan BAPPENAS pada Persatuan Perusahaan Air Minum (Perpamsi) Award sebagai Kategori Pembina Terbaik Ketiga Kabupaten Berpenduduk Lebih dari 500.000 Jiwa.
37. Penghargaan Philip Kotler Center, Bupati Entrepreneurship Award kepada Bupati Gowa *For The Distinguished Accomplishment in Education Development* pada acara KIN ASEAN Forum.
38. Penghargaan Inisiator Lorong Terintegrasi Berbasis Masyarakat dari Gubernur Sulawesi Selatan.
39. Penghargaan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) atas prestasi dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 dengan Predikat Nilai "B".
40. Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kategori Kabupaten Terbaik I kepada Kabupaten Gowa atas Keberhasilan Menyusun Rencana Pembangunan dan Melaksanakan dengan Konsisten dari Gubernur Sulawesi Selatan.
41. Penghargaan Gubernur Sulawesi Selatan atas Kontribusi Kabupaten Gowa dalam Pembangunan di Sulawesi Selatan untuk Bidang Perekonomian.
42. Penghargaan Public Service of The Year Sulawesi Selatan 2018 kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa dari Lembaga Manajemen dan Pemasaran MarkPlus Inc.
43. Penghargaan Gubernur Sulawesi Selatan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa sebagai Kategori Terbaik dalam Inovasi Penanggulangan dan Pengendalian TBC Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
44. Penghargaan Menteri Dalam Negeri atas Prestasi Kinerja Status Sangat Tinggi Bintang Dua (**) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2016.
45. Top Pembina BUMD 2018 atas keberhasilan Bupati Gowa dalam berkontribusi dan memberikan dukungan kepada PDAM Tirta Je'neberang Kabupaten Gowa dari Majalah Bussiness News Indonesia dan Asia Bussiness Research Center.
46. Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas LKPD Kabupaten Gowa TA 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
47. Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tahun 2018 Kategori Pratama dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
48. Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2018 Bidang Sosial Budaya dari Koran Sindo.
49. Penghargaan Pemerintah Republik Indonesia atas Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2013-2017 dari Kementrian Keuangan RI.



50. Juara Harapan III pada Perlombaan Desa Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018. (Desa Kanjilo Kecamatan Barombong)
51. Penghargaan Juara II Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional Tahun 2018 Kategori Sekolah dengan Pencapaian Terbaik (Best Achievement) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (SMA Negeri 5 Kabupaten Gowa)
52. Penghargaan Puskesmas Tinggimoncong sebagai Puskesmas Pembina Sekolah Pemenang Juara II Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional Tahun 2018 Kategori Sekolah dengan Pencapaian Terbaik (Best Achievement) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
53. Penghargaan Jong Celebes Award kepada Adnan Purichta Ichsan YL, SH, MH sebagai Tokoh Harapan Pemuda dari Forum Kreativitas Pemuda Sulawesi Selatan.
54. Penghargaan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Kabupaten Layak Pemuda 2018 kepada Kabupaten Gowa Kategori Utama.
55. Penghargaan Piala Nakamukti dari International Indonesia Council For Small Bussiness (ICSB) yang diserahkan langsung oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia.
56. Penghargaan Indonesia Award 2018 kepada Kabupaten Gowa sebagai Daerah dengan Tata Kelola Keuangan Daerah Terbaik Se-Indonesia dari INews TV.
57. Penghargaan Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik Tahun 2018 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi RI.
58. Penghargaan Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atas Peran Aktif dan Dukungan dalam Mensukseskan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2018.
59. Penghargaan Gubernur Sulsel kepada Pemerintah Kabupaten Gowa sebagai Kabupaten yang memiliki Komitmen dalam Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
60. Penghargaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi kepada Pemerintah Kabupaten Gowa atas prestasinya dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 dengan Predikat Nilai "B".
61. Penghargaan Anugerah Kencana dari BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bupati Gowa atas Dedikasi dan Partisipasi dalam Membangun dan Menyukseskan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi Sulawesi Selatan.
62. Penghargaan Public Relations Indonesia Award (PRIA) Tahun 2019 Kategori Terpopuler di Media Sub Kategori Pemerintah Kabupaten dari PR Indonesia.
63. Penghargaan Gubernur Sulawesi Selatan Kepada Kabupaten Gowa sebagai Terbaik dalam Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 Kategori Konsistensi dan Pencapaian.
64. Penghargaan Gubernur Sulawesi Selatan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa atas Inovasi PAK ADNAN (Pelayanan Keliling Akte Kelahiran Administrasi Kependudukan) Sebagai Top Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019.
65. Penghargaan Gubernur Sulawesi Selatan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa atas Inovasi IMPIAN (Informasi Manajemen Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sebagai ASN) Sebagai Top Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019.
66. Penghargaan YWN Entrepreneurial Marketing Award as An Inspiring Regional Leader U-40 dari Marketeers dan HK&Co.



67. Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas LKPD Kabupaten Gowa TA 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
68. Sertifikat Apresiasi dari BPKP Provinsi Sulawesi Selatan atas Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Gowa dalam Pencapaian Level 3 Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa Pada Tahun 2019.
69. Penghargaan Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulawesi Selatan kepada Kabupaten Gowa sebagai Pemenang Kategori Humas Kab/Kota dengan Media Sosial Teraktif Tahun 2019
70. Penghargaan Manggala Karya Kencana Kepala BKKBN Kepada Bupati Gowa atas Prestasi yang Menonjol dan Komitmen serta Kepemimpinannya dalam Menggerakkan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga untuk Mewujudkan Keluarga Kecil, Bahagia, Sejahtera.
71. Penghargaan Pastika Parama dari Menteri Kesehatan RI atas Prestasi Pemerintah Daerah yang berhasil Menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Bebas Rokok.
72. Penghargaan Aditya Karya Mahatva Yodha (AKMY) Award 2018 Kategori Pembina Umum Terbaik Karang Taruna Kabupaten/Kota
73. Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tahun 2019 Kategori Pratama dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
74. Penghargaan Kategori Pemimpin Muda Pemersatu Pemuda dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).
75. Penghargaan sebagai Kabupaten Terbaik I pada Wilayah 3 (Meliputi Pulau Sulawesi, NTB, NTT, Maluku dan Papua) dalam rangka Dukungan Penyelenggaraan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) 2019 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI.
76. Penghargaan Anugerah Pendidikan Indonesia Kategori Bupati atas Jasa-jasa dan Kepeduliaan yang Tinggi dalam Upaya Peningkatan Kompetensi dan Mutu Pendidikan di Indonesia dari Ikatan Guru Indonesia (IGI).
77. Penghargaan atas Dukungan dalam Peningkatan Pelayanan Perumahan dan Penertiban Aset dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
78. Penghargaan Apresiasi Pembina Proklim Utama Tahun 2019 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
79. Penghargaan kepada Kabupaten Gowa sebagai Kebijakan Pemda dalam Mendorong Percepatan Akses Keuangan Daerah dari Otoritas Jasa Keuangan Regional VI Sulawesi, Maluku dan Papua.
80. Penghargaan kepada TPAKD Kabupaten Gowa sebagai Penggerak Percepatan Akses Keuangan Daerah dari Otoritas Jasa Keuangan Regional VI Sulawesi, Maluku dan Papua.
81. Penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Gowa atas Keberhasilannya Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2018 dengan Opini WTP dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.
82. Penghargaan sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik Tahun 2019 kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) dan RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Daerah
83. Penghargaan Gubernur Sulawesi Selatan kepada Puskesmas Bontonompo I, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa sebagai Peringkat Tiga Puskesmas Berprestasi Kategori Puskesmas Pedesaan.



84. Penghargaan Gubernur Sulawesi Selatan kepada Posyandu Lansia Tamanyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa sebagai Juara Keenam Lomba Posyandu Lansia Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
85. Penghargaan Trophy Proklamasi Utama pada Program Kampung Iklim (Proklamasi) tahun 2019 tingkat Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia kepada Dusun Buloa, Desa Rappolemba, Kecamatan Tompobulu.
86. Penghargaan Sertifikat Proklamasi Utama pada Program Kampung Iklim (Proklamasi) tahun 2019 tingkat Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia kepada Lingkungan Borong Raukang, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu.
87. Penghargaan Sertifikat Proklamasi Utama pada Program Kampung Iklim (Proklamasi) tahun 2019 tingkat Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia kepada Dusun Bontobila, Desa Julubori, Kecamatan Pallangga.
88. Penghargaan Sertifikat Proklamasi Utama pada Program Kampung Iklim (Proklamasi) tahun 2019 tingkat Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia kepada Lingkungan Tacciri, Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong.
89. Penghargaan Sertifikat Proklamasi Utama pada Program Kampung Iklim (Proklamasi) tahun 2019 tingkat Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia kepada Lingkungan Biring Balangi, Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong.
90. Penghargaan Sertifikat Proklamasi Utama pada Program Kampung Iklim (Proklamasi) tahun 2019 tingkat Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia kepada Lingkungan Malino, Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong.
91. Penghargaan Anugerah Ki Hajar 2019 Kategori Pertama Tingkat Kabupaten atas Implementasi TIK Pendidikan melalui Peningkatan Kompetensi SDM TIK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
92. Penghargaan Swasti Saba Wistara atas peran aktif dan upaya mensinergikan program serta pemberdayaan masyarakat dalam menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat tahun 2019 dari Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI.
93. Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi 2019 terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dari Ombudsman RI
94. Penghargaan kepada SD Negeri Unggulan Bontomanai sebagai Kategori Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Selatan.
95. Penghargaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Pemerintah Kabupaten Gowa atas Prestasinya sebagai Top 30 Instansi Pemerintah Penyelenggara Pengaduan Pelayanan Publik.
96. Penghargaan Gubernur Sulawesi Selatan kepada BUMDes Berprestasi Juara I BUMDes Bonto Sunggumanai, Desa Sunggumanai, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa.
97. Penghargaan Gubernur Sulawesi Selatan kepada Bupati Gowa sebagai Kepala Daerah yang Melakukan Pembinaan dan Motivasi Kepala Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Gowa dalam rangka Perlombaan BUMDes Berprestasi Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019.
98. Penghargaan Menteri Sosial RI kepada Bupati Gowa atas Partisipasi dalam Penanganan Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial.



99. Penghargaan Kepala Balai Bahasa Sulawesi Selatan kepada SMP Negeri 4 Pallangga sebagai Peserta Terbaik II dalam Aksi Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik melalui Penghargaan Wajah Bahasa Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019.
100. Penghargaan Pusat Transformasi Kebijakan Publik (Transformasi) dan Yayasan Peduli Nasional (YPN) kepada Bupati Gowa atas Komitmen dalam Pengelolaan Sampah melalui Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bank Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa.
101. Penghargaan Lembaga Prestasi Indonesia Dunia (LEPRID) kepada Pemerintah Kabupaten Gowa atas prestasi Penyelenggara Rekor Penanaman Akar Wangi (Vetiver) Secara Serentak dan Massal di Lokasi Terbanyak 71 Desa/Kelurahan pada 11 Kecamatan dengan Melibatkan Personil Masyarakat, ASN, TNI, Polri, Mahasiswa, Pelajar dan Karyawan.
102. Penghargaan Lembaga Prestasi Indonesia Dunia (LEPRID) kepada Bupati Gowa atas prestasi Pemrakarsa Rekor Penanaman Akar Wangi (Vetiver) Secara Serentak dan Massal di Lokasi Terbanyak 71 Desa/Kelurahan pada 11 Kecamatan dengan Melibatkan Personil Masyarakat, ASN, TNI, Polri, Mahasiswa, Pelajar dan Karyawan.
103. Penghargaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi (MENPAN-RB) kepada Pemerintah Kabupaten Gowa atas prestasinya dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 dengan Predikat Nilai B.
104. Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten Gowa atas Laporan Hasil Keuangan Daerah TA. 2019
105. Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Gowa atas Rekor Pembagian Masker Terbanyak Pada Tingkat Kabupaten
106. Penghargaan Lencana Panca Warsa I Gerakan Pramuka Tahun 2019 dari Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Selatan
107. Penganugerahan Tanda Penghargaan Lencana Darma Bakti Gerakan Pramuka Tahun 2020 dari Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
108. Penghargaan Gubernur Sulawesi Selatan atas Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Menekan Angka Kekerasan Terhadap Anak di Sulsel
109. Penghargaan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bupati Gowa atas dukungannya dalam Melampaui Target Pelaksanaan Sensus Penduduk Online di Kabupaten Gowa
110. Penghargaan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) kepada Pemerintah Kabupaten Gowa atas Prestasinya sebagai Kabupaten dengan Capaian Response Rate yang Melebihi Target dalam Pelaksanaan Sensus Penduduk Online
111. Penghargaan Natamukti dari International Council for Small Business (ICSB) kepada Pemerintah Kabupaten Gowa atas Perannya Memberdayakan UMKM pada Gerakan Sejuta Masker.
112. Penghargaan Gold Winner Category Industry dari MarkPlus Inc. kepada Pemerintah Kabupaten Gowa dalam Inovasi Pengembangan Telur Asin Menggunakan Media Pasir.
113. Penghargaan Silver Winner Category Trade dari MarkPlus Inc. kepada Pemerintah Kabupaten Gowa dalam Pembelian Online pada Pasar di Gowa untuk Memutus Mata Rantai Penularan Covid-19.
114. Penghargaan Wajah Bahasa Kantor Bupati 2020 sebagai Pemenang Terbaik I dari Balai Bahasa Sulawesi Selatan.
115. Apresiasi Pembinaan Proklim dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Pemerintah Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan yang telah mendukung Pelaksanaan Program Kampung Iklim di Daerah.



116. Penghargaan kepada Bupati Gowa atas Partisipasi dalam Kegiatan Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor dalam rangka Hari Keluarga Nasional Ke-27 Tahun 2020 dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
117. Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra kepada Bupati Gowa dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sebagai Kepala Daerah yang menetapkan dan menerapkan kebijakan pembangunan berkelanjutan.
118. Penghargaan Fajar Award 2020 kepada Bupati Gowa Kategori Konsisten Memajukan Sektor Pendidikan.
119. Penghargaan Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IV kepada Kabupaten Gowa atas Percepatan Pelayanan Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Lingkup Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Bekerjasama dengan Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar dengan Peringkat IX (Sembilan).
120. Penghargaan Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IV kepada Kabupaten Gowa atas Inovasi Pelayanan Terpadu Percepatan Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Lingkup Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Bekerjasama dengan Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar.
121. Penghargaan Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IV kepada Kabupaten Gowa atas Inovasi Pelayanan Terpadu Percepatan Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Lingkup Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Bekerjasama dengan Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar
122. Penghargaan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Indonesia Award 2021 sebagai Bupati Peduli Radio-Media Pemerintah.
123. Penghargaan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulsel kepada Bupati Gowa sebagai Kepala Daerah Peduli Media dan Pers Tahun 2021.
124. Penghargaan Public Relations Indonesia Award (PRIA) 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Gowa Kategori Pemerintah Kabupaten Terpopuler di Media Cetak 2020 dari Public Relations Indonesia.
125. Penghargaan Bawaslu Kabupaten Gowa kepada Bupati Gowa atas Kerjasama dan Partisipasinya dalam Menyukkseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2020.
126. Penghargaan Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Award 2021 kepada Bupati Gowa atas dukungan dan kepedulian terhadap perkembangan pers di Sulawesi Selatan.
127. Penghargaan Gubernur Sulawesi Selatan kepada Kabupaten Gowa sebagai Peringkat I atas Penilaian Kinerja Kabupaten Lokus dalam Pelaksanaan Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020.
128. Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tahun 2021 Kategori Pratama kepada Kabupaten Gowa dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
129. Penghargaan Tanda Lencana Melati dari Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka kepada Adnan Purichta Ichsan YL, SH, MH (Mabicab Kwarda Sulawesi Selatan) telah memberikan jasa dan pengabdian yang sangat besar artinya dan dinilai sangat bermanfaat bagi perkembangan Gerakan Pramuka dan gerakan kepramukaan di dunia.
130. Penghargaan Kabar Makassar Award 2021 kepada Adnan Purichta Ichsan YL, SH, MH sebagai Tokoh Inspiratif Muda.
131. Penghargaan Gubernur Sulawesi Selatan Kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa Atas Inovasi Sahabat Lapor Sebagai Top 30 Inovasi Pelayanan Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021.



132. Penghargaan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia kepada Kabupaten Gowa Sebagai Kabupaten Penerima Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2020 Kategori Madya.
133. Penghargaan Bank Indonesia Kepada Pemerintah Kabupaten Gowa sebagai Pemerintah Daerah Dengan Porsi Pendapatan Daerah melalui QRIS Terbanyak pada Toraja Highland Festival 2021.
134. Penghargaan TPAKD Kepada Pemerintah Kabupaten Gowa sebagai TPAKD terbaik dengan Program Pendampingan Kepada UMKM Sektor Peternakan Tahun 2021 pada Bulan Inklusi Keuangan 2021.
135. Penghargaan Harian Fajar kepada Bupati Gowa atas Inovasi Wisata Pendidikan di Kawasan Pengembangan Sapi Perah.
136. Penghargaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (BAKOHUMAS) Kementrian Kominfo kepada Pemerintah Kabupaten Gowa sebagai Terbaik III Anugerah Media Humas (AMH) 2021 Kategori Media Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
137. Penghargaan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan kepada Kabupaten Gowa sebagai Terbaik 2 Pemerintah Daerah Dengan Nilai Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Tertinggi dan Apresiasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Se-Sulawesi Selatan.
138. Penghargaan Gubernur Sulawesi Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Gowa atas Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Kategori Swasti Saba Wistara Tahun 2019 dan 2020. 139. Penganugerahan Tanda Penghargaan STBM dari Menteri Kesehatan kepada Kabupaten Gowa sebagai Kabupaten/Kota STOP BABS (SBS) Dalam Upaya Memobilisasi Masyarakat Umum Terlibat dalam Penyediaan Layanan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun 2021.
140. Penghargaan Menteri Pertanian RI kepada Bupati Gowa sebagai Penerima Anugrah Pratama Perkebunan Indonesia (APPI) Award 2021 Kategori Birokrasi.
141. Penghargaan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021 Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Kabupaten Gowa sebagai Badan Publik Cukup Informatif Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
142. Penghargaan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Gowa sebagai Pemerintah Kabupaten dengan Implementasi QRIS dalam rangka Mendukung Ekosistem Transaksi Digital. 143. Penghargaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Pemerintah Kabupaten Gowa Bagian Organisasi dan Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa atas Inovasi Sahabat Lapor sebagai Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021.



BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa *“Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas - luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.”*

Oleh karena itu, maka pada hakekatnya sesuai dengan aturan tersebut di atas, tugas pembantuan merupakan penyertaan tugas-tugas atau program-program Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten untuk turut dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan, dimana pelaksanaannya tercermin dari adanya kontribusi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi pemberi tugas pembantuan, dalam hal pembiayaan pembangunan.

3.1 TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN GOWA

Tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dituangkan dalam bentuk penyerahan tugas pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara umum untuk menunjang penyelenggaraan otonomi daerah dan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat kabupaten Gowa.

Sumber pembiayaan diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Tugas Pembantuan (APBN-TP) dengan jumlah anggaran yang bervariasi sesuai formula tersebut. SKPD yang bertanggungjawab dalam pengalokasian dan penatausahaan program ini terletak pada 3 (Tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gowa.

Urusan pemerintahan yang ditugaspembantukan kepada Kabupaten Gowa meliputi peningkatan usaha ekonomis produktif, pemeliharaan dan pemupukan semangat partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan, penerapan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan stimulan gotong royong. Sarana dan prasarana pendukung yang diberikan antara lain dengan perbaikan dan pembangunan sarana/prasarana serta dukungan ketersediaan operasional.

Adapun Tugas-tugas Pembantuan yang diterima dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa pada periode tahun 2021, menurut masing-masing pelaksana teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa;
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa;
3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa.



Tabel 3.1 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2021

No.	KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	Kementerian Pertanian	TP (DIPA. 018.03.4.199125) Tanggal 29 Januari 2019	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pembangunan Embung Pertanian	Pembangunan Embung Pertanian	Kab. Gowa	Rp. 240.000.000,-	Rp. 240.000.000,-
				Jaringan Irigasi Tersier	Jaringan Irigasi Tersier	Kab. Gowa	Rp.2.025.000.000,-	Rp.2.025.000.000,-
			Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Pertanian	Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Alat dan Mesin Pertanian	Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Alat dan Mesin Pertanian	Kab. Gowa	Rp. 15.000.000,-	Rp. 15.000.000,-
			Layanan Perkantoran	Layanan Dukungan Satker	Honor, ATK dan Perjalanan	Kab. Gowa	Rp. 100.000.000,-	Rp. 95.000.000,-
			Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	e-RDKK mendukung Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi	e-RDKK mendukung Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi	Kab. Gowa	Rp. 241.600.000,-	Rp. 241.600.000,-
				Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk dan Pestisida	Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk dan Pestisida	Kab. Gowa	Rp. 136.730.000,-	Rp. 136.730.000,-
			Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	Asuransi Pertanian	Asuransi Pertanian	Kab. Gowa	Rp. 19.700.000,-	Rp. 16.700.000,-
			Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	Optimasi Lahan	Optimasi Lahan	Kab. Gowa	Rp. 120.375.000,-	Rp. 120.375.000,-
				Perbaikan Infrastruktur Lahan Sawah	Perbaikan Infrastruktur Lahan Sawah	Kab. Gowa	Rp.2.842.500.000,-	Rp.2.842.500.000,-



Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

2	Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kinerja Tahun 2020 (DIPA. 018.08.199133/2020 Tgl 07 Januari 2020	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	Kab. Gowa	Rp. 30.000.000,-	Rp. 30.000.000,-
				Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	Kab. Gowa	Rp. 16.500.000,-	Rp. 16.500.000,-
				Layanan Keuangan	Belanja Honor Operasional Satker	Kab. Gowa	Rp. 27.000.000,-	Rp. 27.000.000,-
				Pasca Panen, Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Pengawasan, Pembinaan, Monev Sarana Pasca Panen	Kab. Gowa	Rp. 14.060.000,-	Rp. 14.060.000,-
3	Kementerian Ketenagakerjaan	Tugas Pembantuan DIPA- 026.13.2.452652/2021 Tanggal 23 November 2020	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Binalattas	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Gowa	Rp. 564.404.000,-	Rp.550.355.500,-
4	Kementerian Perdagangan	SP DIPA- 090.02.4.190244/2021	Peningkatan, Pengembangan Usaha, Koperasi dan UKM	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan	Pasar Rakyat Sapaya Kec. Bungaya	Rp.6.000.0000.000,-	Rp.5.703.543.600,-



3.2 TUGAS PEMBANTUAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN GOWA

Tugas pembantuan yang diberikan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa tidak ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa yang melaksanakan.

3.3 HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

- a. Tugas Pembantuan pada Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
Berdasarkan hasil capaian realisasi fisik dan keuangan atas tugas pembantuan, tidak ditemukan permasalahan dan hambatan yang terjadi selama pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Tugas Pembantuan pada Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
Berdasarkan hasil capaian realisasi fisik dan keuangan atas tugas pembantuan, tidak ditemukan permasalahan dan hambatan yang terjadi selama pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. Tugas Pembantuan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Berdasarkan hasil capaian realisasi fisik dan keuangan atas tugas pembantuan, tidak ditemukan permasalahan dan hambatan yang terjadi selama pelaksanaan program dan kegiatan.



BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Sebagai salah satu perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar, maka Dinas Pendidikan menerapkan Standar Pelayanan Minimal yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018. Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan terdiri dari 3 jenis pelayanan dasar yaitu :

1. Pendidikan Dasar, dengan indikator jumlah warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs);
2. Pendidikan Kesetaraan, dengan indikator jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan;
3. Pendidikan Anak Usia Dini, dengan indikator jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.

4.1.2 TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL OLEH DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, maka Pemerintah Kabupaten Gowa dalam hal ini Dinas Pendidikan menetapkan target pencapaian standar pelayanan minimal sebesar 100%.

4.1.3 REALISASI

Sesuai dengan hasil perhitungan atas target pencapaian standar pelayanan minimal, maka berikut disajikan realisasi atas penerapan standar pelayanan minimal :

Tabel 4.1 Realisasi SPM Urusan Pendidikan

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)		TARGET SPM	REALISASI SPM
I	PENDIDIKAN DASAR		
1	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	93.97%
II	PENDIDIKAN KESETARAAN		
2	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	100%
III	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI		
3	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	92.69%

4.1.4 ALOKASI ANGGARAN

Jumlah anggaran yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa adalah sebesar Rp 137.126.428.130,00.



4.1.5 DUKUNGAN PERSONIL

Jumlah pegawai yang melaksanakan jenis pelayanan dasar urusan pendidikan sebanyak 54 orang yang terdiri dari pejabat struktural dan pejabat fungsional umum.

4.1.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. **Permasalahan utama yang dihadapi yaitu :**
 - a. Masih rendahnya akses penduduk usia sekolah mendapatkan pendidikan disebabkan kondisi layanan pendidikan antar kecamatan belum berimbang.
 - b. Masih rendahnya kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
2. **Solusi yang ditempuh yaitu :**
 - a. Peningkatan akses layanan pendidikan sekaligus meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang merata.
 - b. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

4.2 URUSAN KESEHATAN

4.2.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Pembangunan kesehatan juga merupakan salah satu fokus dan indikator dalam pencapaian peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dinas Kesehatan merupakan organisasi perangkat daerah yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 terdiri dari 12 jenis pelayanan dengan 12 indikator utama :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, dengan indikator jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan;
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, dengan indikator jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan;
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, dengan indikator jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan;
4. Pelayanan Kesehatan Balita, dengan indikator jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan;
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, dengan indikator jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan;
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, dengan indikator jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan;
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, dengan indikator jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan;
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, dengan indikator jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan;
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, dengan indikator jumlah warga negara penderita *Diabetes Mellitus* yang mendapatkan layanan kesehatan;



10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat, dengan indikator jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan;
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB), dengan indikator jumlah warga negara terduga *tuberculosis* yang mendapatkan layanan kesehatan;
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*human immunodeficiency virus*), dengan indikator jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*) yang mendapatkan layanan kesehatan.

4.2.2 TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL OLEH DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, maka Pemerintah Kabupaten Gowa dalam hal ini Dinas Kesehatan menetapkan target pencapaian standar pelayanan minimal sebesar 100%.

4.2.3 REALISASI

Sesuai dengan hasil perhitungan atas target pencapaian standar pelayanan minimal, maka berikut disajikan realisasi atas penerapan standar pelayanan minimal :

Tabel 4.2 Realisasi SPM Urusan Kesehatan

	INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	TARGET SPM	CAPAIAN SPM
I	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL		
1	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
II	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN		
2	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
III	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR		
3	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
IV	PELAYANAN KESEHATAN BALITA		
4	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
V	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR		
5	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
VI	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF		
6	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
VII	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT		
7	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%



VIII	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI		
8	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
IX	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS		
9	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
X	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT		
10	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	100%
XI	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKOLOSIS (TB)		
11	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
XII	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS)		
12	Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%

4.2.4 ALOKASI ANGGARAN

Jumlah anggaran yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa adalah sebesar Rp 182.712.656.191,00.

4.2.5 DUKUNGAN PERSONIL

Jumlah pegawai yang melaksanakan jenis pelayanan dasar urusan kesehatan sebanyak 900 orang yang terdiri dari pejabat struktural, tenaga medis/kesehatan serta pejabat fungsional umum.

4.2.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Permasalahan yang dihadapi yaitu :

- 1) Masih rendahnya pemahaman masyarakat pentingnya pola hidup sehat.
- 2) Masih rendahnya tingkat pengetahuan keluarga tentang cakupan makanan yang bergizi.
- 3) Masih tingginya angka kematian bayi.

2. Solusi yang ditempuh yaitu :

- 1) Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pola hidup sehat.
- 2) Peningkatan promosi dan preventif bagi masyarakat akan pentingnya makanan yang bergizi bagi usia dini.
- 3) Peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan anak.



4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

4.3.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menerapkan Standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 terdiri dari 2 jenis pelayanan dasar dan 2 indikator yaitu :

1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari, dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari - hari;
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik, dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

4.3.2 TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL OLEH DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka Pemerintah Kabupaten Gowa dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menetapkan target pencapaian standar pelayanan minimal sebesar 100%.

4.3.3 REALISASI

Sesuai dengan hasil perhitungan atas target pencapaian standar pelayanan minimal, maka berikut disajikan realisasi atas penerapan standar pelayanan minimal :

Tabel 4.3 Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)		TARGET SPM	CAPAIAN SPM
I	PENYEDIAAN KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM SEHARI-HARI		
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari - hari	100%	79.60%
II	PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK		
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	73.32%

4.3.4 ALOKASI ANGGARAN

Jumlah anggaran yang disediakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa adalah sebesar Rp 4.113.701.000,-.

4.3.5 DUKUNGAN PERSONIL

Jumlah pegawai yang melaksanakan jenis pelayanan dasar urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebanyak 112 orang yang terdiri dari 29 pejabat struktural dan pejabat fungsional umum.



4.3.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Permasalahan yang dihadapi yaitu :

- 1) Masih rendahnya pelayanan sanitasi bagi rumah tangga.
- 2) Belum tersedianya lahan untuk TPU.
- 3) Masih terdapatnya kawasan permukiman yang minim sarana dan prasarana sanitasi yang layak.
- 4) Rendahnya kesadaran/peran serta masyarakat dalam menjaga dan memelihara saluran drainase.

2. Solusi yang ditempuh :

- 1) Peningkatan cakupan rumah tangga yang mengakses sanitasi.
- 2) Pengadaan lahan untuk TPU.
- 3) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan.
- 4) Pemeliharaan dan pembangunan saluran drainase.

4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

4.4.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan urusan yang mempunyai peranan penting dalam upaya mewujudkan ketersediaan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan peruntukkan lahan yang berwawasan lingkungan, nyaman, sehat dan aman.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menerapkan Standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 terdiri dari 2 jenis pelayanan dasar dan 2 indikator yaitu :

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota, dengan indikator jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni;
2. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

4.4.2 TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL OLEH DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka Pemerintah Kabupaten Gowa dalam hal ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menetapkan target pencapaian standar pelayanan minimal sebesar 100%.



4.4.3 REALISASI

Sesuai dengan hasil perhitungan atas target pencapaian standar pelayanan minimal, maka berikut disajikan realisasi atas penerapan standar pelayanan minimal :

Tabel 4.4 Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)		TARGET SPM	CAPAIAN SPM
I	PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA		
1	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%
II	FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		
2	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Tidak Dilaksanakan

4.4.4 ALOKASI ANGGARAN

Jumlah anggaran yang disediakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa adalah sebesar Rp. 20.649.000,-.

4.4.5 DUKUNGAN PERSONIL

Jumlah pegawai yang melaksanakan jenis pelayanan dasar urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sebanyak 31 orang yang terdiri dari 12 pejabat struktural dan pejabat fungsional umum.

4.4.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Permasalahan yang dihadapi yaitu :

- 1) Masih rendahnya kualitas rumah di Kabupaten Gowa.
- 2) Masih terdapatnya kawasan permukiman yang minim sarana dan prasarana sanitasi yang layak.
- 3) Rendahnya kesadaran/peran serta masyarakat dalam menjaga dan memelihara fasilitas umum.

2. Solusi yang ditempuh :

- 1) Peningkatan cakupan rumah yang berkualitas dan terjangkau.
- 2) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan.
- 3) Peningkatan akses kawasan permukiman melalui Program Kota Tanpa Kumuh.
- 4) Komitmen penganggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum.



4.5 URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Standar pelayanan minimal bidang ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 terdiri dari 5 jenis pelayanan dasar dengan 5 indikator yaitu :

1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada;
2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana, dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana;
3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran, dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

4.5.2 TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL OLEH DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Teknis Pelayanan Dasar pada Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Teknis Pelayanan Dasar pada Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Teknis Pelayanan Dasar pada Sub-Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kabupaten Gowa dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Dinas Pemadam Kebakaran menetapkan target pencapaian standar pelayanan minimal sebesar 100%.

4.5.3 REALISASI

Sesuai dengan hasil perhitungan atas target pencapaian standar pelayanan minimal, maka berikut disajikan realisasi atas penerapan standar pelayanan minimal :



Tabel 4.5 Realisasi SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)		TARGET SPM	CAPAIAN SPM
I	PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%
II	PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA		
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%
III	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA		
3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%
IV	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA		
4	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%
V	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN		
5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	96.77%

4.5.4 ALOKASI ANGGARAN

Jumlah anggaran yang disediakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa adalah sebesar Rp. 34.513.346.119,-.

4.5.5 DUKUNGAN PERSONIL

Jumlah pegawai yang melaksanakan jenis pelayanan dasar urusan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat sebanyak 79 orang yang terdiri dari 48 orang dari Satuan Polisi Pamong Praja, 15 orang dari Dinas Pemadam Kebakaran serta 16 orang dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

4.5.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Permasalahan yang dihadapi yaitu :

- 1) Masih rendahnya jumlah Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa.
- 2) Sosialisasi Peraturan Daerah yang masih kurang ke pedagang kaki lima dan pedagang asongan.
- 3) Masih terdapatnya bencana kebakaran yang tidak memenuhi *respon time* disebabkan karena lokasi yang jauh dari pos jaga pemadam kebakaran.

2. Solusi yang ditempuh :

- 1) Melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah.
- 2) Membentuk UPT Pemadam Kebakaran di beberapa kecamatan untuk memenuhi *respon time*.



4.6 URUSAN SOSIAL

4.6.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Dinas Sosial merupakan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 100 Tahun 2018 terdiri dari 5 jenis pelayanan dasar dan 5 indikator, yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti, dengan indikator jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti, dengan indikator jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti, dengan indikator jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti, dengan indikator jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti;
5. Perlindungan Dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap dan Pasca Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota, dengan indikator jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

4.6.2 TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL OLEH DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kabupaten Gowa dalam hal ini Dinas Sosial menetapkan target pencapaian standar pelayanan minimal sebesar 100%.

4.6.3 REALISASI

Sesuai dengan hasil perhitungan atas target pencapaian standar pelayanan minimal, maka berikut disajikan realisasi atas penerapan standar pelayanan minimal :

Tabel 4.6 Realisasi SPM Urusan Sosial

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)		TARGET SPM	CAPAIAN SPM
I	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI LUAR PANTI		
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%
II	REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TERLANTAR DI LUAR PANTI		
2	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%
III	REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DI LUAR PANTI		
3	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%
IV	REHABILITASI SOSIAL DASAR TUNA SOSIAL KHUSUSNYA GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI LUAR PANTI		



4	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%
V	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PADA SAAT TANGGAP DAN PASCA BENCANA BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA		
5	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%

4.6.4 ALOKASI ANGGARAN

Jumlah anggaran yang disediakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa adalah sebesar Rp 7.688.941.750,-.

4.6.5 DUKUNGAN PERSONIL

Jumlah pegawai yang melaksanakan jenis pelayanan dasar urusan sosial sebanyak 29 orang dengan 19 pejabat struktural dan pejabat fungsional umum lainnya ditambah dengan 295 pekerja sosial professional/tenaga kerja sosial.

4.6.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Permasalahan yang dihadapi yaitu :

- 1) Masih relatif tingginya angka kemiskinan yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial dan masalah sosial lainnya.
- 2) Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM yang bergerak pada penanganan masalah kesejahteraan sosial.

2. Solusi yang ditempuh :

- 1) Peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan melalui program dan kegiatan secara terpadu di berbagai sektor pembangunan.
- 2) Peningkatan minat dan kepedulian sosial dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.

4.7 PROGRAM DAN KEGIATAN

A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

• Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2021

a. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.121.237.198.302,36 dan terealisasi sebesar Rp.118.371.002.098,36 atau 97,64% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.69.521.000,- dan terealisasi sebesar Rp.68.936.000,- atau 99,16% dari alokasi anggaran.
- Pembangunan Perpustakaan Sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.736.988.000,- dan terealisasi sebesar Rp.734.136.100,- atau 99,61% dari alokasi anggaran.
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.421.841.000,- dan terealisasi sebesar Rp.419.779.000,- atau 99,51% dari alokasi anggaran.
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.360.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.13.399.341.566,- atau 87,24% dari alokasi anggaran.
- Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.995.023.700,- atau 90,46% dari alokasi anggaran.



- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.316.202.000,- dan terealisasi sebesar Rp.309.068.500,- atau 97,74% dari alokasi anggaran.
- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.825.139.000,- dan terealisasi sebesar Rp.678.991.400,- atau 82,29% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Perlengkapan Sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.911.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp.6.828.496.000,- atau 98,80% dari alokasi anggaran.
- Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.134.867.285,- dengan realisasi fisik dan keuangan 0 % dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.166.488,- dan terealisasi sebesar Rp.17.506.000,- atau 75,57% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.95.338.273.529,36 dan terealisasi sebesar Rp.94.919.723.832,36 atau 99,56% dari alokasi anggaran.

b. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.10.905.764.538,- dan terealisasi sebesar Rp.9.902.672.130,67 atau 90,80% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.991.078.000,- dan terealisasi sebesar Rp.5.842.614.744,67 atau 97,52% dari alokasi anggaran.
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.265.333.000,- dan terealisasi sebesar Rp.261.540.000,- atau 98,57% dari alokasi anggaran.
- Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.281.328.000,- dan terealisasi sebesar Rp.199.548.800,- atau 70,93% dari alokasi anggaran.
- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.947.307.000,- dan terealisasi sebesar Rp.940.381.000,- atau 99,27% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Perlengkapan Sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.621.160.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.618.567.900,- atau 99,84% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.57.540.538,- dan terealisasi sebesar Rp.35.700.000,- atau 62,04% dari alokasi anggaran.
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.379.166.000,- dan terealisasi sebesar Rp.209.920.000,- atau 55,36% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.362.852.000,- dan terealisasi sebesar Rp.794.399.686,- atau 58,29% dari alokasi anggaran.

c. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.5.562.562.800,- dan terealisasi sebesar Rp.5.369.670.936,- atau 96,53% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :



- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.978.898.800,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Perlengkapan PAUD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.660.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.658.364.998,- atau 99,75% dari alokasi anggaran.
- Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.639.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp.548.100.000,- atau 85,69% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.41.600.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.242.464.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.142.707.138,- atau 91,97% dari alokasi anggaran.

d. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.421.425.875,- dan terealisasi sebesar Rp.302.315.399,- atau 71,74% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.173.225.000,- dan terealisasi sebesar Rp.69.000.000,- atau 39,83% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.37.270.875,- dan terealisasi sebesar Rp.33.635.399,- atau 90,25% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.59.730.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.151.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp.139.950.000,- atau 92,56% dari alokasi anggaran.

B. BIDANG URUSAN KESEHATAN

• **Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2021**

a. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.182.712.656.191,- dan terealisasi sebesar Rp.163.888.589.646,- atau 89,70% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.033.335.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.436.440.900,- atau 60,41% dari alokasi anggaran.
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.526.326.000,- dan terealisasi sebesar Rp.310.071.364,- atau 58,91% dari alokasi anggaran.
- Pengelolaan Surveilans Kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.98.549.900,- dan terealisasi sebesar Rp.11.189.400,- atau 11,35% dari alokasi anggaran.
- Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.630.000,- dan terealisasi sebesar Rp.4.264.000,- atau 92,10% dari alokasi anggaran.



- Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.262.555.081,- dan terealisasi sebesar Rp.10.658.014.753,- atau 94,63% dari alokasi anggaran.
- Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.136.669.010.834,- dan terealisasi sebesar Rp.129.096.875.556,- atau 94,46% dari alokasi anggaran.
- Operasional Pelayanan Rumah Sakit, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.217.015.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.129.520.167,- atau 92,81% dari alokasi anggaran.
- Operasional Pelayanan Puskesmas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.954.086.376,- dan terealisasi sebesar Rp.19.841.230.006,- atau 73,61% dari alokasi anggaran.
- Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.947.148.000,- dan terealisasi sebesar Rp.400.983.500,- atau 20,59% dari alokasi anggaran.

C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

• Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2021

a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.438.441.000,- dan terealisasi sebesar Rp.336.601.329,- atau 76,77% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.48.421.000,- dan terealisasi sebesar Rp.48.387.900,- atau 99,93% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.79.138.000,- dan terealisasi sebesar Rp.79.082.000,- atau 99,93% dari alokasi anggaran.
- Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.310.882.000,- dan terealisasi sebesar Rp.209.131.429,- atau 67,27% dari alokasi anggaran.

b. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.3.675.260.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota.

D. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

• Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2021

a. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.20.649.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana.

E. BIDANG URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

• Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2021

a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.7.918.890.000,- dan terealisasi sebesar Rp.7.837.224.000,- atau 98,97% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam kegiatan :



- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.569.360.000,- dan terealisasi sebesar Rp.7.492.105.000,- atau 98,98% dari alokasi anggaran.
 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.178.530.000,- dan terealisasi sebesar Rp.175.919.000,- atau 98,54% dari alokasi anggaran.
 - Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.171.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.169.200.000,- atau 98,95% dari alokasi anggaran.
- b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**
Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.58.030.000,- dan terealisasi sebesar Rp.48.205.000,- atau 83,07% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
- c. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**
Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.24.957.327.999,- dan terealisasi sebesar Rp.493.559.747,- atau 1,98% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).
- d. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**
Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.300.000,- atau 65,00% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota.
- e. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**
Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.60.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp.55.702.000,- atau 91,62% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.
- f. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**
Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.516.298.120,- dan terealisasi sebesar Rp.1.492.895.000,- atau 98,46% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :
- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.490.873.800,- dan terealisasi sebesar Rp.1.467.663.000,- atau 98,44% dari alokasi anggaran.
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.424.320,- dan terealisasi sebesar Rp.25.232.000,- atau 99,24% dari alokasi anggaran.



F. BIDANG URUSAN SOSIAL

- **Kegiatan dan Realisasi Tahun 2021**

- a. **Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.125.387.500,- dan terealisasi sebesar Rp.114.875.000,- atau 91,62% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Permakanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.42.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.40.500.000,- atau 96,43% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Alat Bantu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.250.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.41.837.500,- dan terealisasi sebesar Rp.33.825.000,- atau 80,85% dari alokasi anggaran.
- Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp.27.300.000,- atau 96,47% dari alokasi anggaran.

- b. **Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.518.179.250,- dan terealisasi sebesar Rp.474.058.250,- atau 91,49% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

- c. **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.7.045.375.000,- dan terealisasi sebesar Rp.6.874.030.000,- atau 97,57% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penyediaan Makanan.



BAB V PENUTUP

Pemerintah Daerah memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai penyelenggara pemerintahan, sekaligus sebagai penyelenggara utama pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan di daerah. Perwujudan pelaksanaan Otonomi Daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab dan mampu menjawab tuntutan perkembangan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan, Pemerintah Daerah diwajibkan membuat dan menyampaikan capaian kinerja tahunan kepada Pemerintah dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Jika dilihat dari hasil yang dicapai, maka dapat dikatakan secara umum bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2021 mencapai kinerja cukup memuaskan, tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaannya, baik dari aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, regulasi maupun anggaran.

Atas capaian kinerja tersebut, Pemerintah Kabupaten Gowa dalam kesempatan ini juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa, serta seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Gowa yang telah memberikan support dan partisipasi konstruktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Gowa.

Demikian Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini disusun untuk memenuhi pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas program dan kegiatan yang telah dilakukan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Gowa Tahun 2021 ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan karena telah melalui tahapan reviu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa. Dengan harapan laporan ini dapat menjadi referensi dan sekaligus bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tahun-tahun yang akan datang.



BUPATI GOWA,

DITANDAI DAN PURICHTA ICHSAN YL, SH, MH